KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridhaNya, Pemerintah Aceh telah menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013, sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik *(good governance)* dan pemerintahan yang bersih *(clean government)*.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan yang menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017.

Secara substantif LAKIP merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja guna mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki melalui pengukuran dan analisis setiap indikator kinerja pada setiap Sasaran Strategis.

Penyusunan LAKIP Pemerintah Aceh tahun 2013 menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang secara normatif telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, dalam penyajian ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan laporan ini.

Demikian, kiranya laporan ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi, referensi dan bahan evaluasi kinerja Pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Terima kasih.

Banda Aceh, Maret 2014

GUBERNUR ACEH

dr. H. ZAINI ABDULLAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Aceh tahun 2013 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013 yang merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang penyusunannya dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2013 terdiri dari 31 sasaran strategis dengan 344 indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran rata-rata tingkat capaian sebesar 108,20% dengan kategori ***Sangat Baik.*** Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis sebagaimana tertera di bawah ini :

Sasaran I					
Meningkatnya Jumlah Peraturan Pelaksanaan UUPA yang harus diselesaikan 100 persen sampai Tahun 2015 (6 PP, 1 Perpres dan 21 Qanun Aceh)					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
1.1	Jumlah Penyelesaian Peraturan Turunan UU Pemerintah Aceh				
	a. Peraturan Pemerintah (dari 2 rancangan yang diajukan ke Pemerintah)	1	PP	0	0,00
	b. Peraturan Presiden (Perpres ttg Penyerahan Ktr BPN Aceh/ Kab/ Kota menjadi Perangkat Daerah)	1	Perpres	0	0,00
	c. Qanun Aceh	14	Qanun	22	157,14
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***52,38***

Sasaran II					
Meningkatnya implementasi UUPA dalam percepatan pembangunan dan menjaga keberlanjutan perdamaian					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
2.1	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Amanat UU PA dan aturan lainnya yang telah diimplimentasikan:				
	a. Peraturan Gubernur	80	Pergub	110	137,50
	b. Keputusan Gubernur	700	Kepgub	1003	143,29
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***140,39***

Sasaran III					
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang good governance dan clean government (perolehan dari WDP menjadi WTP, akuntabilitas, LAKIP Pemerintah Aceh dari CC menjadi B, indeks kepuasan masyarakat).					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
3.1	Persentase tingkat kehadiran Aparatur dalam peningkatan disiplin	100,00	%	98,00	98,00
3.2	Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan	75,00	%	75,00	100,00
3.3	Persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis/ fungsional sesuai bidang tupoksi	60,00	%	60,00	100,00
3.4	Predikat Sistem Akuntansi Keuangan (Opini BPK)	WTP	Predikat	WDP	80,00
3.5	Nilai rata-rata Persentase Capaian Kinerja SKPA sesuai Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	95,00	%	93,00	97,89
3.6	Rata-rata Jumlah Realisasi Anggaran SKPA	92,00	%	92,44	100,48
3.7	Jumlah kasus gugatan terhadap Pemerintah Aceh yang diselesaikan	5	Kasus	5	100,00
3.8	Jumlah tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan	168	LHP	135	80,36
3.9	Jumlah pengaduan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya yang ditindaklanjuti	35	Kasus	16	45,71
3.10	Persentase indikasi penyimpangan anggaran	3,00	%	1,70	56,67
3.11	Persentase Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh	15,00	%	6,13	40,87
3.12	Persentase Peningkatan profesionalisme PNS	10,00	%	17,44	174,40
3.13	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik:				
	a. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	86,66	Sangat Baik	86,66	100,00
	b. Rumah Sakit Ibu dan Anak	75,54	Baik	75,54	100,00
	c. Rumah Sakit Jiwa	76,00	Baik	76,00	100,00
	d. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	83,73	Sangat Baik	78,92	94,26
	e. Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh	75,00	Baik	71,38	95,17
	f. UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh	75,00	Baik	75,11	100,15
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***92,44***

Sasaran IV					
Meningkatnya pelayanan publik yang transparan (lama waktu perizinan dari 7 hari menjadi 3 hari dan tersedianya akses informasi dokumen publik (RPJPA, RTRWA, RPJMA, RKPA, Statistik Daerah, APBA, LKPJ, LPPD) pada website pemerintah).					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
4.1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100,00	%	100,00	100,00
4.2	Jumlah KK yang terdata dalam SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	1.460.000	KK	1.460.000	100,00
4.3	Persentase Jumlah Penduduk yang telah melakukan perekaman e_KTP	80,00	%	91,03	113,79
4.4	Jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan	6.296	Dok	4.171	66,25
4.5	Persentase pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui ULP / LPSE Provinsi Aceh	100,00	%	100,00	100,00
4.6	Persentase Dokumen pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang terintegrasi pada website Pemerintah	85,00	%	85,00	100,00
4.7	Jumlah Unit Layanan Publik yang telah menerapkan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)	6	Unit	6	100,00
4.8	Persentase organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran				
	a. Pemerintah Aceh	87,00	%	88,00	101,15
	b. Kab/Kota	75,00	%	80,00	106,67
4.9	Jumlah Unit Kerja yang menyusun SOP	5	Unit	5	100,00
4.10	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang menyusun standar Pelayanan	2	Unit	3	150,00
4.11	Jumlah penduduk yang terdata dalam data base kependudukan berbasis sosial	1.460.000	KK	1.460.000	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***103,15***

Sasaran V					
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh (meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pelaksanaan) dan meningkatnya persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen anggaran					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
5.1	Persentase keterwakilan masyarakat dalam Musrembang Pembangunan Aceh	100,00	%	100,00	100,00
5.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	74,50	%	38,00	51,01
5.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	35,50	%	44,63	125,72
5.4	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	60,00	%	60,00	100,00
5.5	Persentase peningkatan pembinaan politik daerah	10,00	%	10,00	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***95,35***

Sasaran VI					
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian.					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
6.1	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	30,00	%	30,00	100,00
6.2	Jumlah konflik masyarakat yang tertangani	30,00	kasus	25,00	83,33
6.3	Menurunkan jumlah pelanggaran qanun dan gangguan trantibum	30,00	%	38,52	128,40
6.4	Angka kriminalitas yang tertangani	20,00	%	20,00	100,00
6.5	Persentase penurunan tingkat kerawanan, kriminalitas dan gangguan ketertiban/ketentraman di masyarakat	50,00	%	62,00	124,00
6.6	Rasio pos siskamling per jumlah desa/ penduduk (PP No.6/2008)	6.461	Pos	7.784	120,48
6.7	Persentase penyelesaian kasus kewaspadaan dini masyarakat	60,00	%	55,00	91,67
6.8	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk (PP No. 6/2008)	459	Personil	229	49,78
6.9	Persentase penduduk yang memahami pencapaian perdamaian	60,00	%	60,00	100,00
6.10	Jumlah Rumah Sehat Sederhana bagi masyarakat PMKS, Mantan Kombatan, Tapol/Napol, Masyarakat Imbas konflik dan masyarakat korban bencana yang terbangun	4.918	Unit	5.006	101,79
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***99,94***

Sasaran VII					
Meningkatnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai Dinul Islam.					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
7.1	Jumlah Gampong dan Mukim yang dijadikan lokasi sosialisasi pelestarian adat istiadat	12	Gampong/ mukim	12	100,00
7.2	Persentase Jumlah Panduan atau Manual Pelaksanaan Hukum Adat yang dihasilkan	7	buku/ majalah	7	100,00
7.3	Jumlah Kelembagaan Adat yang dibentuk kembali dalam Masyarakat	1	Lembaga	1	100,00
7.4	Freukuensi festival dan event budaya Aceh	108	kali	108	100,00
7.5	Jumlah kunjungan wisatawan manca Negara ke Aceh	29.400	Orang	42.522	144,63
7.6	Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Aceh	997.620	Orang	1.075.626	107,82
7.7	Jumlah pengembangan objek pariwisata	20	Objek	20	100,00
7.8	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	53	buah	53	100,00
7.9	Jumlah grup kesenian	50	sanggar	50	100,00
7.10	Jumlah gedung Kesenian	4	buah	4	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***105,25***

Sasaran VIII					
Meningkatnya pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam.					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
8.1	Jumlah simulasi gampong percontohan bersyariah di Aceh	3	Gampong	3	100,00
8.2	Jumlah masyarakat dan muallaf yang dibina dalam wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil	240	orang	360	150,00
8.3	Jumlah Qari-Qariah yang berpartisipasi pada STQ dan MTQ Nasional/ Internasional	16	orang	16	100,00
8.4	Kasus Pelanggaran Qanun Syariat yang ditangani :				
	- Khamar	4	Kasus	3	75,00
	- Khalwat	5	Kasus	3	60,00
	- Maisir	65	Kasus	50	76,92
8.5	Jumlah persentase penyaluran infaq	100,00	%	80,00	80,00
8.6	Jumlah Peningkatan Muzakki yang membayar Zakat	200	orang	202	101,00
8.7	Persentase penyaluran Zakat (Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil)	100,00	%	86,22	86,22
8.8	Frekuensi Operasi Penegakan Syariat Islam	54	kali	54	100,00
8.9	Jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang direhab/ dibangun (Mesjid/ Meunasah/ pesantren/ dayah)	600	Unit	714	119,00
8.10	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,374	%	0,301	80,48
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***94,05***

Sasaran IX					
Meningkatnya peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai Dinul Islam dan mengangkat kembali budaya-budaya Aceh yang Islami					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
9.1	Jumlah Da'i yang ditempatkan pada daerah perbatasan dan terpencil	150	orang	150	100,00
9.2	Jumlah sertifikasi produk halal yang diterbitkan	30	Sertifikat	23	76,67
9.3	Jumlah Fatwa, Himbauan, Seruan danTaushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan Syariat Islam	10	Dokumen	8	80,00
9.4	Jumlah Kader Ulama yang terlatih	80	Orang	120	150,00
9.5	Frekuensi Dakwah Interaktif	23	kali	23	100,00
9.6	Jumlah Penerimaan Infaq/sadaqah	18.000.000.000	Rupiah	26.006.282.854	144,48
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***108,52***

Sasaran X					
Meningkatnya struktur perekonomian yang mantap berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
10.1	Pertumbuhan PDRB	6,6	%	5,36	81,21
10.2	Laju inflasi Aceh	5,00	%	4,18	83,60
10.3	PDRB per kapita	7,54	Juta	8,23	109,15
10.4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,00	%	27,22	97,21
10.5	Kontribusi sub sektor pertanian pangan terhadap PDRB	11,07	%	10,12	91,42
10.6	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	6,31	%	5,77	91,44
10.7	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	4,57	%	4,57	100,00
10.8	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (PSDH/DR)	1,58	%	1,91	120,89
10.9	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	7,9	%	9,56	121,01
10.10	Kontribusi sektor energi terhadap PDRB	0,42	%	0,53	126,19
10.11	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	4,47	%	4,85	108,50
10.12	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	16,05	Milyar	17,66	110,03
10.13	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	5,66	%	8,1	143,11
10.14	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	4.306.824.000.000	Rupiah	4.614.454.285.714	107,14
10.15	Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	2,5	%	10,26	410,40
10.16	Nilai ekspor non migas	95,643	US$	73,201	76,54
10.17	Jumlah negara tujuan ekspor	22	Negara	22	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***122,23***

Sasaran XI					
Berkembangnya sistem agribisinis yang mampu menyediakan produk-produk pertanian yang cukup, bermutu dan aman konsumsi					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
11.1	Jumlah produksi olahan perikanan	48	Ton	52,88	110,17
11.2	Jumlah jenis olahan hasil perikanan yang dikembangkan	10	Jenis	14	140,00
11.3	Persentase peningkatan agribisnis peternakan	5,00	%	11,50	230,00
11.4	Jumlah Komoditi Unggulan daerah yang dipromosikan	5	Komoditi	10	200,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**170,04**

Sasaran XII					
Pengembangan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai dengan Sumberdaya alam dan agro ekosistem wilayah					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
12.1	Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah :				
	a. Karet Kering	65.164	Ton	72.483	111,23
	b. Kelapa Sawit (CPO)	182.305	Ton	310.766	170,46
	c. Kopi (Biji Kering)	50.949	Ton	54.314	106,60
	d. Kakao (biji Kering)	37.582	Ton	36.661	97,55
12.2	Jumlah rehabilitasi/ pembangunan JUT dan JITUT :				
	a. JUT	134.972	Meter	135.877	100,67
	b. JITUT	131.119	Meter	151.095	115,24
12.3	Jumlah luas lahan yang dioptimasi	2.041	Ha	1.991	97,55
12.4	Jumlah alat dan mesin Pertanian untuk peningkatan produksi	2.435	unit	2.524	103,66
12.5	luas lahan yang diberikan Saprodi	9.561	Ha	9.993	104,52
12.6	Persentase luas lahan pengendalian OPT :				
	- Padi	52,00	%	86,24	165,85
	- Jagung	25,00	%	81,70	326,80
	- Kedelai	36,00	%	86,06	239,06
	- Kacang Tanah	10,00	%	87,00	870,00
	- Ubi Kayu	28,00	%	83,41	297,89
12.7	Jumlah kebun sumber bibit yang bangun	5	lokasi	5	100,00
12.8	Persentase bibit yg disertifikasi	100,00	%	100,00	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**194,19**

Sasaran XIII					
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah terpencil dan pesisir.					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
13.1	Jumlah Produksi perikanan	214.757	Ton	188.520,4	87,78
13.2	Cakupan bina kelompok nelayan	50	Kelp	30	60,00
13.3	Produksi perikanan kelompok nelayan	143.680	Ton	145.000	100,92
13.4	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang diberdayakan	20	Gapoktan/ LDPM	20	100,00
13.5	Jumlah Tenaga Penyuluh yang ditingkatkan Kemampuan dan Keterampilan	1.200	orang	1.200	100,00
13.6	Jumlah Pilot Percontohan yang dibangun sebagai media transfer teknologi ke petani	474	unit	474	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***91,45***

Sasaran XIV					
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
14.1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA)	12,00	%	12,24	102,00
14.2	Persentase Kekayaan Milik Pemerintah Aceh yang digunausahakan	30,00	%	30,00	100,00
14.3	Persentase jumlah aset yang terinventarisir	50,00	%	50,00	100,00
14.4	persentase peningkatan wajib pajak yang taat dalam membayar pajak	10,00	%	11,10	111,00
14.5	Jumlah Penerimaan Zakat	10.000.000.000	Rupiah	13.290.000.000	132,90
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***109,18***

Sasaran XV					
Menurunnya angka pengangguran terbuka Aceh					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
15.1	Persentase angka penggangguran terbuka	7,22	%	8,38	83,93
15.2	Rasio daya serap tenaga kerja	1:210	%	1:157	80,37
15.3	Angka partisipasi angkatan kerja	2.164.998	Orang	2.034.000	93,95
15.4	Angka sengketa pengusaha-pekerja dan penyelesaian per tahun	150	kasus	65	43,33
15.5	Pencari kerja yang ditempatkan	6.661	Orang	638	9,58
15.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	10	Kasus	8	80,00
15.7	Peningkatan Tenaga Kerja yang berkerja di sektor Pertanian	810.283	Orang	849.137	104,80
15.8	Persentase daya serap tenaga kerja sektor perindustrian	2,25	%	2,37	105,33
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***75,16***

Sasaran XVI					
Menurunnya angka kemiskinan dengan perbaikan pendapatan dan pemberdayaan kemandirian melalui perluasan lapangan usaha					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
16.1	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	17,5	%	17,72	98,74
16.2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	5,1	%	3,7	72,55
16.3	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	5,85	%	5,85	100,00
16.4	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	20,00	%	20,00	100,00
16.5	Jumlah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	71.460	Jiwa	80.342	112,43
16.6	Jumlah Fakir Miskin yang mendapat bantuan rumah dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	733	KK	774	105,59
16.7	Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	235	KK	235	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***98,47***

Sasaran XVII					
Meningkatnya Investasi Dalam Negeri dan Investasi Asing					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
17.1	Jumlah investor/perusahaan (PMDN/PMA)	69	Perusahaan	42	60,87
17.2	Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	2.000.000.000.000	Rupiah	5.091.120.831.883	254,56
17.3	Jumlah nilai rencana investasi	6.350.000.000.000,00	Rupiah	6.133.436.193.666,00	96,59
17.4	Persentase Kenaikan nilai rencana investasi	15,00	%	53,79	358,60
17.5	Jumlah regulasi dan kebijakan dibidang penanaman modal dan investasi yang tersusun	8	Dok	2	25,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***159,12***

Sasaran XVIII					
Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
18.1	Jumlah kelembagaan pertanian masyarakat yang dibina	290	unit	290	100,00
18.2	Jumlah kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir yang mandiri	4	Kab/Kota/ lembaga/Klp	5	125,00
18.3	Kelembagaan Pangan Masyarakat :				
	a. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	75	GAPOKTAN	72	96,00
	b. Lumbung Pangan Masyarakat	102	Klp	73	71,57
	c. Desa Mandiri Pangan	207	Desa	213	102,90
18.4	Populasi Koperasi	7.327	Unit	7.720	105,36
18.5	Persentase koperasi aktif	52,95	%	51	96,32
18.6	Jumlah Penyebaran BPR/LKM	28	Unit	79	282,14
18.7	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	82.306	Unit	82.706	100,49
18.8	Jumlah Penyaluran kredit untuk UMKM	13,81	Triliun	7,79	56,41
18.9	Persentase peningkatan Koperasi Berkualitas	2,00	%	2,90	145,00
18.10	Peningkatan Populasi UMKM	0,75	%	0,75	100,00
18.11	Peningkatan jumlah UMKM yang memanfaatkan Dana modal usaha	15,00	%	15,00	100,00
18.12	Jumlah pedagang yang tertampung pada pasar tradisional yang telah dibangun	25.000	Pedagang	25.000	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***112,94***

Sasaran XIX					
Tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang pendidikan pada tahun 2015.					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
19.1	Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	53,00	%	69,64	131,40
19.2	Jumlah anak yatim yang mendapat bantuan bea siswa pendidikan dasar dan menengah	116.666	Anak Yatim	115.658	99,14
19.3	Persentase Peningkatan Angka melek huruf (Tahun) usia 15+	97,10	%	97,21	100,11
19.4	Angka rata-rata lama sekolah	9,7	Tahun	11,99	123,61
19.5	Angka partisipasi kasar :				
	a. SD/MI/Paket A	105,00	%	108,55	103,38
	b. SMP/MTS/Paket B	100,00	%	102,55	102,55
	c. SMA/MA/Paket C	87,00	%	83,80	96,32
19.6	Angka pendidikan yang ditamatkan :				
	a. Tidak tamat SD/sederajat	10,00	%	10,03	100,30
	b. Tamat SD/sederajat	24,00	%	24,27	101,13
	c. Tamat SMP/sederajat	24,00	%	22,50	93,75
	d. Tamat SMA/sederajat	32,00	%	27,97	87,41
	e. Diploma I/II/III	4,35	%	12,44	285,98
19.7	Angka partisipasi murni :				
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,00	%	90,54	96,32
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	76,50	%	72,43	94,68
	c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	62,50	%	59,50	95,20
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***114,08***

Sasaran XX					
Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan.					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
20.1	Pendidikan dasar :				
	1. Angka partisipasi sekolah	99,41	%	99,35	99,94
	2. Rasio guru terhadap murid	12,00	%	19,00	158,33
	3 Rasio guru/murid per kelas rata-rata	45,00	%	22,00	48,89
20.2	Pendidikan menengah :				
	1. Angka partisipasi sekolah	95,60	%	74,44	77,87
	2. Rasio guru terhadap murid	10,00	%	17,00	170,00
20.3	Angka Putus Sekolah :				
	1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,07	%	0,10	142,86
	2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,16	%	0,23	143,75
	3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,13	%	0,28	215,38
20.4	Angka Kelulusan :				
	1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	82,00	%	97,80	119,27
	2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	85,00	%	99,27	116,79
	3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	85,00	%	99,34	116,87
	4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	106,00	%	105,39	99,42
	5. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	165,00	%	112,05	67,91
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***121,33***

Sasaran XXI					
Tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang kesehatan pada tahun 2015.					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
21.1	Umur harapan hidup	69	Tahun	68,9	99,86
21.2	Angka kematian ibu	143	/100.000 LH	173	89,51
21.3	Angka kematian bayi	20	/1000 LH	14	130,00
21.4	Angka kematian anak balita	40	/1000 LH	15	162,50
21.5	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	%	100,00	100,00
21.6	Prevalensi gizi kurang dan buruk	20,00	%	17,43	87,15
21.7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	50,00	%	80,00	160,00
21.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85,00	%	84,44	99,34
21.9	Cakupan kunjungan bayi	95,00	%	86,39	90,94
21.10	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat	70,00	%	69,63	99,47
21.11	Cakupan pemberian MP-ASI usia 6-24 bulan dari keluarga miskin	100,00	%	25,29	25,29
21.12	Cakupan pemberian ASI eksklusif	50,00	%	49,09	98,18
21.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	70,00	%	55,09	78,70
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***101,61***

Sasaran XXII					
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan sumberdaya kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah.					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
22.1	Rasio dokter umum per satuan penduduk	20	/100.000 pddk	30	150,00
22.2	Rasio dokter spesialis per satuan penduduk	10	/100.000 pddk	19	190,00
22.3	Rasio dokter gigi per satuan penduduk	5	/100.000 pddk	6	120,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***153,33***

Sasaran XXIII					
Meningkatnya penyediaan pelayanan medik spesialistik dan kesehatan jiwa serta tersedianya obat esensial di sarana pelayanan dasar dan rujukan.					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
23.1	Jumlah pasien kesehatan jiwa yang mengikuti terapi rehabilitasi dan terapi kerja (modalitas)	3.390	Pasien	5.789	170,77
23.2	Jumlah Pasien Jiwa yang bebas Pasung	24	Pasien Pasung	3	12,50
23.3	Jumlah pemulangan pasien (*dropping*) kesehatan jiwa	216	Pasien	133	61,57
23.4	Cakupan dan mutu pelayanan intensif (*Acut Care*)	2.555	Pasien	2.204	86,26
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***82,78***

Sasaran XIV					
Terjaminnya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin Aceh dengan jaminan kesehatan berbasis asuransi sosial atau Jaminan Kesehatan Masyarakat Aceh (JKMA).					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
24.1	Jumlah Penduduk yang mendapat fasilitas				
	a. Fasilitas JKA Murni	1.762.452	Jiwa	1.762.452	100,00
	b. Jaminan kesehatan melalui asurasi sosial lainnya	2.597.339	Jiwa	2.597.339	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***100,00***

Sasaran XXV					
Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
25.1	Cakupan penemuan kasus baru penyakit TB BTA +	60,00	%	47,81	79,68
25.2	Angka kesuksesan pengobatan TB >85	85	%	97,7	114,94
25.3	Angka kejadian (Incident Rate) DBD	45	/100.000 pddk	29	64,44
25.4	Cakupan prevalensi penyakit kusta	1	/100.000 pddk	1,2	120,00
25.5	Cakupan kabupaten/kota yang memasuki tahap eliminasi malaria	7	kab/kota	8	114,29
25.6	Desa siaga aktif	50,00	%	44,18	88,36
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***96,95***

Sasaran XXVI					
Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan secara berkelanjutan.					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
26.1	Jumlah Dokumen RPJMA 2012-2017	1	Dok	1	100,00
26.2	Jumlah Dokumen RKPA 2013	1	Dok	1	100,00
26.3	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2	Dok	2	100,00
26.4	Jumlah DED RTRW	8	Dok	8	100,00
26.5	Jumlah dokumen perencananaan sarana dan parasarana pengemb. wilayah srategis dan cepat tumbuh yang tersusun	29	Dok	56	193,10
26.6	Jumlah rencana tata ruang wilayah Kab/kota yang tersusun	14	Dok	14	100,00
26.7	Jumlah dokumen Penjabaran Program Pembangunan Aceh yang tersusun	1	Dok	1	100,00
26.8	Jumlah dokumen Penjabaran Program Pembangunan Aceh yang tersusun	1	Dok	1	100,00
26.9	Jumlah dokumen pemanfaatan tata ruang kab/kota yang tersusun	1	Dok	1	100,00
26.10	Jumlah Dokumen hasil pembahasan program/kegiatan TDBHMG Aceh 2013	1	Dok	1	100,00
26.11	Jumlah Publikasi Aceh Dalam Angka 2012	2	Buku	2	100,00
26.12	Jumlah Publikasi PDRB Tahunan/Triwulanan, Ringkasan Eksekutif bulanan Ekonomi Makro dan Sosial, Indikator Ekonomi bulanan	29	Buku	29	100,00
26.13	Jumlah buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat (Inkesmas) Aceh	1	Buku	1	100,00
26.14	Indikator Pembangunan Aceh 2013	1	Buku	1	100,00
26.15	Database Provinsi Aceh 2013	1	Buku	1	100,00
26.16	Sistem Informasi / Database Bidang Infrastruktur	1	Dok	1	100,00
26.17	Jumlah Dokumen hasil penelitian	29	Dok	29	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***105,48***

Sasaran XXVII					
Meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
27.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	60,63	%	60,11	99,14
27.2	Rasio Jaringan Irigasi	56,56	%	55,45	98,04
27.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	55,13	%	54,15	98,22
27.4	Permukiman layak huni	93,83	%	93,99	100,17
27.5	Panjang jalan	0,0039	Km/orang	0,00385	98,72
27.6	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	40,00	%	35,00	87,50
27.7	Lingkungan Permukiman	2,17	%	2,09	96,31
27.8	Rumah tangga pengguna air bersih	52,00	%	84,33	162,17
27.9	Rumah tangga pengguna listrik	90,00	%	100,00	111,11
27.10	Lingkungan pemukiman kumuh	6,18	%	6,01	97,25
27.11	Rumah layak huni	79,22	%	83,40	105,28
27.12	Panjang pembangunan saluran/gorong-gorong	187,17	meter	188,00	100,44
27.13	Jumlah Jaringan distribusi air bersih yang terbangun	27	desa	27	100,00
27.14	Panjang pembangunan Jalan	51,721	Km	54,289	104,97
27.15	Jumlah Pembangunan Jembatan	14	Unit	14	100,00
27.16	Jumlah sarana dan prasarana gedung pemerintah yang terbangun	2.218	Unit	2.572	115,96
27.17	Jumlah arus penumpang angkutan umum	8.480.783	orang/ tahun	1.640.537	19,34
27.18	Rasio ijin trayek	3.921	armada/ Penduduk	3.805	97,04
27.19	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	62	Unit	62	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***99,56***

Sasaran XXVIII					
Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkualitas.					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
28.1	Persentase penanganan sampah	75,00	%	60,87	81,16
28.2	Jumlah peralatan pendukung dan bangunan pengolahan sampah yang terbangun	48	Unit	48	100,00
28.3	Persentase Penduduk berakses air minum	40,00	%	38,59	96,48
28.4	Pencemaran status mutu air	47,00	%	36,67	78,02
28.5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	79,00	%	79,00	100,00
28.6	Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	79,00	%	35,48	44,91
28.7	Jumlah perusahaan yang tertib mengelola lingkungan	60	perusahaan	13	21,67
28.8	Jumlah kasus perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	4	Kasus	9	225,00
28.9	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	276	Ha	637	230,80
28.10	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat	224.745	Jiwa	224.745	100,00
28.11	Jumlah Escape Building yang dibangun	4	Unit	4	100,00
28.12	Panjang Pengaman Tebing Sungai yang dibangun	700	Meter	700	100,00
28.13	Jumlah jenis Diseminasi Informasi Lingkungan	12	Jenis	14	116,67
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***107,28***

Sasaran XXIX					
Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan Aceh.					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
29.1	Jumlah Ketersediaan cadangan pangan utama	150	Ton	150	100,00
29.2	Pola Konsumsi Pangan Harapan	80,60	Skor PPH	69,80	86,60
29.3	Jumlah Daerah Rawan Pangan	825	Klp/Desa	218	26,42
29.4	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang diberdayakan	15	LPM	15	100,00
29.5	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang diberdayakan	35	Desa	28	80,00
29.6	Nilai Tukar Nelayan	109,35	NTN	101,22	92,57
29.7	Nilai tukar petani	104,50	NTP	98,15	93,92
29.8	Nilai tukar petani Tanaman Pangan	113,93	NTP	109,02	95,69
29.9	Nilai tukar petani Tanaman Hortikultura	103,5	NTP	98,07	94,75
29.10	Kelembagaan Pangan Masyarakat				
	a. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	75	GAPOKTAN	73	97,33
	b. Lumbung Pangan Masyarakat	102	Kelompok	73	71,57
	c. Desa Mandiri Pangan	207	Desa	179	86,47
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***85,44***

Sasaran XXX					
Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
30.1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan :				
	a. Padi	1.996.717	Ton	1.956.847	98,00
	b. Jagung	156.243	Ton	167.173	107,00
	c. Kedelai	95.950	Ton	45.018	46,92
	d. Kc. Tanah	7.003	Ton	3.844	54,89
	e. Kc. Hijau	1.464	Ton	946	64,62
	f. Ubi Kayu	38.626	Ton	34.613	89,61
	g. Ubi Jalar	14.184	Ton	11.460	80,80
30.2	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan :				
	a. Padi	48,02	Ku/Ha	46,68	97,21
	b. Jagung	38,2	Ku/Ha	38,48	100,73
	c. Kedelai	14,11	Ku/Ha	14,72	104,32
	d. Kc. Tanah	12,2	Ku/Ha	12,38	101,48
	e. Kc. Hijau	10,59	Ku/Ha	10,53	99,43
	f. Ubi Kayu	128,62	Ku/Ha	127,49	99,12
	g. Ubi Jalar	105,77	Ku/Ha	106,01	100,23
30.3	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura :				
	a. Bawang Merah	2.850	Ton	1.071	37,58
	b. Kentang	8.815	Ton	2.529	28,69
	c. Cabe Besar	32.871	Ton	20.339	61,88
	d. Cabe Rawit	19.538	Ton	16.187	82,85
	e. Pisang	33.858	Ton	12.813	37,84
	f. Jeruk Besar	10.722	Ton	7.508	70,02
	g. Durian	10.378	Ton	2.544	24,51
	h. Rambutan	19.036	Ton	2.842	14,93
30.4	Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura				
	a. Bawang Merah	54,26	Ku/Ha	49,82	91,82
	b. Kentang	144	Ku/Ha	155	107,47
	c. Cabe Besar	103,88	Ku/Ha	103,66	99,79
	d. Cabe Rawit	121,28	Ku/Ha	125,19	103,22
	e. Pisang	610	Ku/Ha	146,6	24,03
	f. Jeruk Besar	373,81	Ku/Ha	113,93	30,48
	g. Durian	126,28	Ku/Ha	38,14	30,20
	h. Rambutan	60,27	Ku/Ha	32,26	53,53
30.5	Produksi Daging per tahun	30.002.424	Kg	31.402.476	104,67
30.6	Produksi telur pertahun	15.840.826	Kg	16.904.852	106,72
30.7	Populasi ternak pertahun	17.773.543	ekor	17.983.565	101,18
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***74,42***

Sasaran XXXI					
Meningkatnya eksplorasi sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan.					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Satuan**	**Realisasi**	**%**
31.1	Jumlah pengembangan energi alternatif/ terbarukan	13	Desa	18	138,46
31.2	Pertambangan tanpa ijin	27,24	%	12,42	45,59
31.3	Rasio ketersediaan daya listrik	83,00	%	83,24	100,29
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					***94,78***

Beberapa prestasi dengan anugerah penghargaan selama tahun 2013 sebagaimana berikut :

1. Penghargaan **Tun Perak** dari Kerajaan Malaysia, merupakan penghargaan kepada Pemerintah Aceh yang telah berjasa memperjuangkan kemajuan tamaddun melayu dan Islam di Aceh.
2. Penghargaan **Adi Bhakti Mina Bahari** dari Menteri Kelautan dan Perikanan, merupakan penghargaan yang diterima Pemerintah Aceh dalam bidang Kelautan dan Perikanan.
3. Penghargaan **Citra Pelayanan Prima** untuk RSUZA dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB
4. Penghargaan **Pangripta Pratama** (juara III) Perencanaan terbaik nasional dari kepala Bappenas
5. Penghargaan **Pembina terbaik nasional PNPM Mandiri** pedesaan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Aspek Operasional dari Mendagri
6. Penghargaan **Kihajar Award** dari Mendikbud
7. Penghargaan **Pendidikan Inklusi** dari Mendikbud
8. Penghargaan **Abdi Tani** dari Menteri Pertanian
9. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Menpan dan RB dengan predikat nilai **"CC"**
10. Penghargaan **Keterbukaan Informasi Publik** (juara III) dari Wakil Presiden

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF..... iii

DAFTAR ISI xxi

DAFTAR TABEL xxii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Kondisi Daerah 2

C. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur..... 3

1. Kelembagaan 3

2. Sumberdaya Aparatur 7

D. Sistematika Penulisan 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9

A. Perencanaan 9

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013..... 12

C. Penetapan Kinerja Tahun 2013..... 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 45

A. Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2013..... 45

B. Evaluasi Pengukuran Pencapaian Kinerja 46

C. Akuntabilitas Keuangan 220

D. Jumlah dan Realisasi APBA Tahun 2010-2013 ... 224

BAB IV PENUTUP 266

LAMPIRAN 1 PENGUKURAN KINERJA

LAMPIRAN 2 PENETAPAN KINERJA

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	*Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh*	*5*
Tabel 1.2	*Jumlah jabatan struktural menurut jenjang eselonering di lingkungan Pemerintah Aceh*	*7*
Tabel 1.3	*Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan jenis kelamin*	*7*
Tabel 1.4	*Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan*	*8*
Tabel 2.1	*Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan*	*12*
Tabel 2.2	*Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Aceh tahun 2013*	*13*
Tabel 2.3	*Penetapan Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2013*	*28*
Tabel 3.1	*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama*	*47*
Tabel 3.2	*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua*	*50*
Tabel 3.3	*Perbandingan Tingkat Capaian Tahun 2012 dengan Tahun 2013 Terhadap Sasaran Strategis Pertama*	*51*
Tabel 3.4	*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga*	*52*
Tabel 3.5	*Perbandingan Tingkat Capaian Tahun 2012 dengan Tahun 2013 terhadap Indikator Kinerja sasaran strategis ketiga*	*61*
Tabel 3.6	*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat*	*62*
Tabel 3.7	*Link Aplikasi Pemerintah Aceh Berbasis Web*	*67*
Tabel 3.8	*Perbandingan Tingkat Capaian Tahun 2012 dengan Tahun 2013 terhadap Indikator Kinerja sasaran strategis keempat*	*69*
Tabel 3.9	*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelima*	*70*
Tabel 3.10	*Perbandingan Tingkat Capaian Tahun 2012 dengan Tahun 2013 terhadap Indikator Kinerja sasaran strategis kelima*	*73*
Tabel 3.11	*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keenam*	*74*
Tabel 3.12	*Angka Kriminalitas di Aceh*	*81*
Tabel 3.13	*Rekapitulasi Konflik di Provinsi Aceh Tahun 2013*	*82*
Tabel 3.14	*Rumah Sehat Sederhana*	*84*
Tabel 3.15	*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketujuh*	*85*

Tabel 3.16 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2012 dengan tahun 2013 terhadap indikator kinerja sasaran strategis ketujuh 88
Tabel 3.17 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis kedelapan..... 89
Tabel 3.18 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2012 dengan tahun 2013 terhadap indikator kinerja sasaran strategis kedelapan 95
Tabel 3.19 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis kesembilan 95
Tabel 3.20 Nama-nama perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat halal tahun 2013 97
Tabel 3.21 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2012 dengan tahun 2013 terhadap indikator kinerja sasaran strategis kesembilan 101
Tabel 3.22 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis kesepuluh 102
Tabel 3.23 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2012 dengan tahun 2013 terhadap indikator kinerja sasaran strategis kesepuluh 111
Tabel 3.24 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis kesebelas 112
Tabel 3.25 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis duabelas 116
Tabel 3.26 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis tigabelas 123
Tabel 3.27 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis empatbelas..... 127
Tabel 3.28 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis limabelas..... 129
Tabel 3.29 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis enambelas 135
Tabel 3.30 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis tujuhbelas 139
Tabel 3.31 Perusahaan yang menanamkan modal 140
Tabel 3.32 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis delapanbelas..... 141
Tabel 3.33 Rekapitulasi database koperasi Aceh tahun 2013 ... 146
Tabel 3.34 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Triwulan III tahun 2013 147
Tabel 3.35 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Sembilan Belas 151
Tabel 3.36 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keduapuluh 158
Tabel 3.37 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

Duapuluh satu *162*
Tabel 3.38 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Duapuluh dua* *168*
Tabel 3.39 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Duapuluh tiga* *170*
Tabel 3.40 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Duapuluh empat* *172*
Tabel 3.41 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Duapuluh lima* *174*
Tabel 3.42 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Duapuluh enam* *177*
Tabel 3.43 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Duapuluh tujuh* *180*
Tabel 3.44 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Duapuluh delapan* *192*
Tabel 3.45 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Duapuluh sembilan* *200*
Tabel 3.46 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tigapuluh* *207*
Tabel 3.47 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tigapuluh satu* *217*
Tabel 3.48 *Perkembangan penertiban PETI di Aceh* *219*
Tabel 3.49 *Realisasi anggaran pendapatan dan pembiayaan Aceh Perubahan tahun 2013* *222*
Tabel 3.50 *Realisasi Anggaran Belanja Aceh Tahun 2013* *223*
Tabel 3.51 *Alokasi APBA tahun 2013 berdasarkan urusan/Satuan Kerja Perangkat Aceh* *223*
Tabel 3.52 *Jumlah dan Realisasi APBA dalam Kurun Waktu 2010-2013* *225*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2014.

Guna mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

Dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Aceh menganut prinsip *good governance* dan *clean government* dengan berpedoman pada azas umum penyelenggaraan pemerintahan antara lain azas transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas.

Untuk mewujudkan prinsip tersebut, salah satu instrumen yang dipergunakan dalam perencanaan pembangunan berbasis kinerja dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan dan menyampaikan informasi pelaksanaan pembangunan setiap tahun dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Pemerintah Aceh telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai media pertanggungjawaban untuk memperoleh informasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2013.

B. Kondisi Daerah

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan Ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Secara geografis Aceh terletak pada 01°58'37,2"- 06°04'33,6" Lintang Utara dan 94°57'57,6"- 98°17'13,2" Bujur Timur. Batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Malaka
Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Aceh

Aceh memiliki luas wilayah darat 5.677,081 km^2, wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.478,80 km^2 dan garis pantai sepanjang 2.698,89 km atau 1.677,01 mil. Secara administratif pada tahun 2013, Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong/desa dengan jumlah penduduk 4.791.924 jiwa.

C. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

1. Kelembagaan

Sebagai daerah otonomi khusus, Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangannya terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh yang terdiri dari 8 Sekretariat,

22 Dinas dan 18 Lembaga Teknis Daerah yang diatur dalam:

1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah dirubah dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007;
2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012;
3) Qanun Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4) Qanun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
5) Qanun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;
6) Qanun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali;
7) Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh; dan
8) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh.

Adapun nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh

No.	Satuan Kerja Perangkat Aceh	
I	**Sekretariat terdiri dari :**	
	1	Sekretariat Daerah Aceh
	2	Sekretariat DPRA
	3	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	4	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	5	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	6	Sekretariat Baitul Mal Aceh
	7	Sekretariat DPP KORPRI Aceh
	8	Sekretariat Wali Nenggro/Keurukon Katibul Wali
II	**Dinas terdiri dari :**	
	1	Dinas Syariat Islam
	2	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
	3	Dinas Kesehatan
	4	Dinas Pertambangan dan Energi
	5	Dinas Kelautan dan Perikanan
	6	Dinas Sosial
	7	Dinas Keuangan Aceh
	8	Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh
	9	Dinas Pendidikan
	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	11	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika
	12	Dinas Kehutanan
	13	Dinas Perkebunan
	14	Dinas Pengairan
	15	Dinas Bina Marga
	16	Dinas Cipta Karya
	17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	18	Dinas Koperasi dan UKM
	19	Dinas Pemuda dan Olahraga
	20	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	21	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
	22	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

III	**Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :**	
	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	3	Badan Arsip dan Perpustakaan
	4	Badan Pemberdayaan Masyarakat
	5	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	6	Badan Investasi dan Promosi
	7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	8	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
	9	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
	10	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
	11	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
	12	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
	13	Inspektorat Aceh
	14	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
	15	Rumah Sakit Jiwa
	16	Rumah Sakit Ibu dan Anak
	17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
	18	Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta

Sumber : Biro Organisasi Setda Aceh, Januari 2014

Berdasarkan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) tersebut di atas, terdapat 1.169 jabatan struktural menurut jenjang eselonering sebagaimana dalam tabel 1.2. berikut ini :

Tabel 1.2
Jumlah jabatan struktural menurut jenjang eselonering di lingkungan Pemerintah Aceh

No.	Eselon	Jumlah
1	I b	1
2	II a	46
3	II b	20
4	III a	321
5	III b	31
6	IV a	892
J u m l a h		1311

Sumber : Biro Organisasi Setda Aceh kondisi Januari 2014

2. Sumber Daya Aparatur

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Pemerintah Aceh kondisi pada 31 Desember 2013 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 9.160 dengan komposisi menurut Golongan, Jenis Kelamin sebagaimana tertera pada tabel 1.3. di bawah ini :

Tabel 1.3.
Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan jenis kelamin

No	GOL.	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1	IV	703	299	1.002	10,93 %
2	III	3.247	2.486	5.733	62,58 %
3	II	1.563	721	2.284	24,93 %
4	I	128	13	141	1,53 %
JUMLAH		5.641	3.519	9.160	100,00

Sumber : BKPP Aceh, 31 Desember 2013

Sedangkan menurut kualifikasi tingkat pendidikan masih didominasi strata 1 sebanyak 4.297 orang atau 46,91% dari jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dalam tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PNS	PERSENTASE
1	S3	16	0,17
2	S2	1.079	11,77
3	S1	4.297	46,91
4	D4	117	1,27
5	D3	923	10,07
6	D2	15	0,16
7	D1	38	0,41
8	SLTA	2.468	26,94
9	SLTP	138	1,50
10	SD/MI	69	0,75
	JUMLAH	9.160	100,00

Sumber :BKPP Aceh, 31 Desember 2013

D. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Aceh tahun 2013 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang, kondisi daerah, kelembagaan dan sumberdaya aparatur.

BAB II : **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, dengan sub bahasan RPJMA yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2013.

BAB III : **Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan tentang Pengukuran Capaian Kinerja, Evaluasi Pengukuran Pencapaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : **Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2013 dan upaya kedepan untuk perbaikan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Berdasarkan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan : a. Nilai-nilai Islam; b. Sosial Budaya; c. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; d. Keadilan dan pemerataan; dan e. Kebutuhan, dalam ayat (2) mengamanatkan perencanaan pembangunan Aceh/ Kabupaten/Kota disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pemerintah Aceh telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012–2017 sebagaimana ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 sebagai panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu lima tahunan.

Dalam rangka mewujudkan sinergisitas pelaksanaan pembangunan, keterkaitan antar dokumen perencanaan yang bersifat tahunan juga telah dilakukan Pemerintah Aceh dengan menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Secara sistematis, keterkaitan dokumen Perencanaan Pemerintah Aceh dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. RPJMA Tahun 2012-2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 merupakan suatu tahapan rencana pembangunan Aceh yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan dalam kurun waktu lima tahunan. Komponen perencanaan jangka menengah Pemerintah Aceh terdiri dari :

a). Visi

Visi Pemerintah Aceh tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

”Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan,dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki”.

b). Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi Pemerintah Aceh tahun 2012-2017 sebagai berikut :

1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga yang abadi.
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat.
3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.
4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaat SDA.

c). Tujuan

Tujuan Pembangunan Aceh ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi sebagaimana tercantum dalam RPJMA tahun 2012-2017, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui penyelesaian peraturan pelaksana dan Implementasi UUPA untuk menjaga perdamaian abadi.
2. Mewujudkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan.
3. Mewujudkan struktur ekonomi dan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal.
4. Mewujudkan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan

No	Misi	Tujuan
1.	Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga yang abadi	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui penyelesaian peraturan pelaksana dan Implementasi UUPA untuk menjaga perdamaian abadi
2.	Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat	Mewujudkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan
3.	Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia	Mewujudkan struktur ekonomi dan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal
4.	Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan.	Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan
5.	Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaat SDA	Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaat SDA

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh(RPJMA) tahun 2012-2017 yang berisikan perencanaan yang bersifat makro sehingga perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro setiap tahun yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan(RKT).

Penyusunan RKT Pemerintah Aceh Tahun 2013 yang mengacu pada RPJMA tahun 2012-2017 dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Aceh tahun 2013 sebagaimana tertera dalam tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan(RKT) Pemerintah Aceh tahun 2013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya jumlah peraturan pelaksana UUPA yang harus diselesaikan 100 persen sampai tahun 2015 (6 PP, 1 Perpres dan 21 Qanun Aceh).	Jumlah Penyelesaian Peraturan Turunan UU Pemerintah Aceh a. Peraturan Pemerintah (dari 2 rancangan yang diajukan ke Pemerintah) b. Peraturan Presiden (Perpres ttg Penyerahan Ktr BPN Aceh/Kab/Kota menjadi Perangkat Daerah) c. Qanun Aceh	 1 PP 1 Pepres 14 Qanun
2	Meningkatnya implementasi UUPA dalam percepatan pembangunan dan menjaga keberlanjutan perdamaian	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Amanat UU PA dan aturan lainnya yang telah diimplimentasikan: a. Peraturan Gubernur b. Keputusan Gubernur	 80 Pergub 700 Kepgub
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang good governance dan clean government (perolehan dari WDP menjadi WTP, akuntabilitas, LAKIP Pemerintah Aceh dari CC menjadi B, indeks kepuasan masyarakat).	Persentase tingkat kehadiran Aparatur dalam peningkatan disiplin Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan Persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai bidang tupoksi Predikat Sistem Akuntansi Keuangan (Opini BPK) Nilai rata-rata Persentase Capaian Kinerja SKPA sesuai Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Rata-rata Jumlah Realisasi Anggaran SKPA Jumlah kasus gugatan terhadap Pemerintah Aceh yang diselesaikan	95 % 75 % 60 % WTP 95 % 92 % 5 Kasus

(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan	168 LHP
		Jumlah pengaduan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya yang ditindaklanjuti	35 Kasus
		Persentase indikasi penyimpangan anggaran	3 %
		Persentase Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh	15 %
		Persentase Peningkatan profesionalisme PNS	10 %
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik :	
		a.Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	86,66 Sangat Baik
		b.Rumah Sakit Ibu dan Anak	75,54 Baik
		c. Rumah Sakit Jiwa	76 Baik
		d. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	83,73 Sangat Baik
		e. Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh	75 Baik
		f. UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh	75 Baik
4	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan (lama waktu perizinan dari 7 hari menjadi 3 hari dan tersedianya akses informasi dokumen publik (RPJPA, RTRWA, RPJMA, RKPA, Statistik Daerah, APBA, LKPJ, LPPD) pada website pemerintah).	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100 %
		Jumlah KK yang terdata dalam SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	1.460.000 KK
		Persentase Jumlah Penduduk yang telah melakukan perekaman e_KTP	80 %
		Jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan	6.296 izin/non izin
		Persentase pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui ULP / SPSE Provinsi Aceh	100 %
		Persentase Dokumen pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang terintegrasi pada website Pemerintah	85 %
		Jumlah Unit Layanan Publik yang telah menerapkan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)	6 Unit
		Persentase organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	
		a. Pemerintah Aceh	85 %
		b. Kab/Kota	75 %
		Jumlah Unit Kerja yang menyusun SOP	5 Unit

(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang menyusun standar Pelayanan	2 Unit
		Jumlah penduduk yang terdata dalam data base kependudukan berbasis sosial	1.460.000 KK
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh (meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pelaksanaan) dan meningkatnya persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen anggaran).	Persentase keterwakilan masyarakat dalam Musrembang Pembangunan Aceh	100 %
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	74,5 %
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta (pekerja upahan non pertanian)	30,6 %
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	35,5 %
		Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	60 %
		Persentase peningkatan pembinaan politik daerah	10 %
6	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian.	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	30 %
		Jumlah konflik masyarakat yang tertangani	30 kasus
		Menurunkan jumlah pelanggaran qanun dan gangguan trantibum	5 %
		Angka kriminalitas yang tertangani	20 %
		Persentase penurunan tingkat kerawanan, kriminalitas dan gangguan ketertiban/ketentraman di masyarakat	50 %
		Rasio pos siskamling per jumlah desa/ penduduk (PP No.6/2008)	6.461 Pos
		Persentase penyelesaian kasus kewaspadaan dini masyarakat	60 %
		Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk (PP No. 6/2008)	459 Personil
		Persentase penduduk yang memahami pencapaian perdamaian	60 %
		Jumlah Rumah Sehat Sederhana bagi masyarakat PMKS, Mantan Kombatan, Tapol/Napol, Masyarakat Imbas konflik dan masyarakat korban bencana yang terbangun	4.918 Unit

(1)	(2)	(3)	(4)	
7	Meningkatnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai Dinul Islam.	Jumlah Gampong dan Mukim yang dijadikan lokasi sosialisasi pelestarian adat istiadat	12	gampong/mukim
		Persentase Jumlah Panduan atau Manual Pelaksanaan Hukum Adat yang dihasilkan	7	buku/majalah
		Jumlah Kelembagaan Adat yang dibentuk kembali dalam Masyarakat	1	Lembaga
		Freukuensi festival dan event budaya Aceh	108	kali
		Jumlah kunjungan wisatawan manca Negara ke Aceh	29.400	Orang
		Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Aceh	997.620	Orang
		Jumlah pengembangan objek pariwisata	20	Objek
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	53	buah
		Jumlah grup kesenian	50	sanggar
		Jumlah gedung Kesenian	4	buah
8	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam.	Jumlah simulasi gampong percontohan bersyariah di Aceh	3	Gampong
		Jumlah masyarakat dan muallaf yang dibina dalam wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil	240	orang
		Jumlah Qari-Qariah yang berpartisipasi pada STQ dan MTQ Nasional/ Internasional	16	orang
		Kasus Pelanggaran Qanun Syariat yang ditangani :		
		- Khamar	90	Kasus
		- Khalwat	101	Kasus
		- Maisir	473	Kasus
		Jumlah persentase penyaluran infaq	100	%
		Jumlah Peningkatan Muzakki yang membayar Zakat	200	orang
		Persentase penyaluran Zakat (Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil)	100	%
		Jumlah Kelompok Pengajian Masyarakat yang dibina	3.000	Kelompok Pengajian
		Frekuensi Operasi Penegakan Syariat Islam	54	kali
		Frekuensi pelaksanaan kajian keagamaan bagi Pejabat/Aparatur	9	Kali

(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang direhab/dibangun (Mesjid/ Meunasah/ pesantren/ dayah)	600 Unit
		Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,374 %
9	Meningkatnya peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai Dinul Islam dan mengangkat kembali budaya-budaya Aceh yang Islami	Jumlah Da'i yang ditempatkan pada daerah perbatasan dan terpencil	150 orang
		Jumlah sertifikasi produk halal yang diterbitkan	30 Sertifikat
		Jumlah Fatwa, Himbauan, Seruan danTaushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan Syariat Islam	10 Dokumen
		Jumlah Kader Ulama yang terlatih	80 Orang
		Frekuensi Dakwah Interaktif	23 kali
		Jumlah Penerimaan Infaq/sadaqah	18 Milyar
10	Meningkatnya struktur perekonomian yang mantap berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.	Pertumbuhan PDRB	6,6 %
		Laju inflasi Aceh	5 %
		PDRB per kapita	7,54 Juta
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28 %
		Kontribusi sub sektor pertanian pangan terhadap PDRB	11,07 %
		Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	6,31 %
		Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	4,57 %
		Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (PSDH/DR)	1,58 %
		Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	7,9 %
		Kontribusi sektor energi terhadap PDRB	0,42 %
		Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	4,47 %
		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	16,05 Milyar
		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	5,66 %
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	4.306.824.000.000 Rupiah
		Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	2,5 %
		Persentase pertubuhan ekspor non migas	2 %
		Jumlah negara tujuan ekspor	22 Negara

(1)	(2)	(3)	(4)	
11	Berkembangnya sistem agribisinis yang mampu menyediakan produk-produk pertanian yang cukup, bermutu dan aman konsumsi	Jumlah produksi olahan perikanan	48	Ton
		Jumlah jenis olahan hasil perikanan yang dikembangkan	10	Jenis
		Persentase peningkatan agribisnis peternakan	5	%
		Jumlah Komoditi Unggulan daerah yang dipromosikan/ dipamerkan	5	Komoditi
12	Pengembangan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai dengan Sumberdaya alam dan agro ekosistem wilayah	Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah	65.164	Ton (Karet Kering)
			182.305	Ton Kelapa Sawit (CPO)
			50.949	Ton Kopi (Biji Kering)
			37.582	Ton Kakao (biji Kering)
		Jumlah rehabilitasi/ pembangunan JUT dan JITUT	JUT 134.972	meter
			JITUT 131.119	meter
		Jumlah luas lahan yang dioptimasi	2.041	Ha
		Jumlah alat dan mesin Pertanian untuk peningkatan produksi	2.435	unit
		luas lahan yang diberikan Saprodi	9.561	Ha
		Persentase luas lahan pengendalian OPT :		
		- Padi	52	%
		- Jagung	25	%
		- Kedelai	36	%
		- Kacang Tanah	10	%
		- Ubi Kayu	28	%
		Jumlah kebun sumber bibit yang bangun	5	lokasi
		Persentase bibit yang disertifikasi	100	%
13	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah terpencil dan pesisir.	Jumlah Produksi perikanan	214.757	Ton
		Cakupan bina kelompok nelayan	50	Kelp
		Produksi perikanan kelompok nelayan	143.680	Ton
		Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang diberdayakan	20	Gapoktan/ LDPM
		Jumlah Tenaga Penyuluh yang ditingkatkan Kemampuan dan Keterampilan	1.200	orang
		Jumlah Pilot Percontohan yang dibangun sebagai media transfer teknologi ke petani	474	unit

(1)	(2)	(3)	(4)
14	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA)	12 %
		Persentase Kekayaan Milik Pemerintah Aceh yang digunausahakan	30 %
		Persentase jumlah aset yang terinventarisir	50 %
		Persentase peningkatan wajib pajak yang taat dalam membayar pajak daerah	10 %
		Jumlah Pemerimaan Zakat	10 Milyar
15	Menurunnya angka pengangguran terbuka Aceh	Persentase angka pengganggguran terbuka	7,22 %
		Persentase daya serap tenaga kerja	0,1875 %
		Angka partisipasi angkatan kerja	2.164.998 Orang
		Angka sengketa pengusaha-pekerja dan penyelesaian per tahun	150 kasus
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,94 Persen
		Pencari kerja yang ditempatkan	6.661 Orang
		Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	10 Kasus
		Peningkatan Tenaga Kerja yang berkerja di sektor Pertanian	810.283 Orang
		Persentase daya serap tenaga kerja sektor perindustrian	2,25 %
16	Menurunnya angka kemiskinan dengan perbaikan pendapatan dan pemberdayaan kemandirian melalui perluasan lapangan usaha	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	17,5 %
		Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	5,1 Persen
		Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	5,85 Persen
		Persentase Penurunan Jumlah PMKS	20 %
		Jumlah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	71.460 jiwa
		Jumlah Fakir Miskin yang mendapat bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	733 KK
		Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	235 KK
17	Meningkatnya Investasi Dalam Negeri dan Investasi Asing	Jumlah investor/perusahaan (PMDN/PMA)	69 Perusahaan
		Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	2.000.000.000.000 Rupiah
		Jumlah nilai rencana investasi	6.350.000.000.000 Rupiah
		Persentase Kenaikan nilai rencana investasi	15 %

(1)	(2)	(3)	(4)	
		Jumlah regulasi dan kebijakan dibidang penanaman modal dan investasi yang tersusun	8	dokumen
18	Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal	Jumlah kelembagaan pertanian masyarakat yang dibina	290	unit
		Jumlah kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir yang mandiri	4	Kab/Kota/lembaga atau kelompok
		Kelembagaan Pangan Masyarakat		
		a. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	75	GAPOKTAN
		b. Lumbung Pangan Masyarakat	102	Klp
		c. Desa Mandiri Pangan	207	Desa
		Populasi Koperasi	7.327	Unit
		Persentase koperasi aktif	52,95	%
		Jumlah Penyebaran BPR/LKM	28	Unit
		Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	82.306	Unit
		Jumlah Penyaluran kredit untuk UMKM	13,81	Triliun
		Persentase Jumlah Koperasi Aktif	62	%
		Persentase peningkatan Koperasi Berkualitas	2	%
		Peningkatan Populasi UMKM	0,75	%
		Peningkatan jumlah UMKM yang memanfaatkan Dana modal usaha	15	%
		Persentase peningkatan informasi Pengembangan Kawasan Industri Aceh	30	%
		Jumlah pedagang yang tertampung pada pasar tradisional yang telah dibangun	25.000	Pedagang

19	Tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang pendidikan pada tahun 2015.	Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	53	%
		Jumlah anak yatim yang mendapat bantuan bea siswa pendidikan dasar dan menengah	116.666	Anak Yatim
		Persentase Peningkatan Angka melek huruf (Tahun) menjadi	97,10	%
		Angka rata-rata lama sekolah	9,7	Tahun
		Angka partisipasi kasar		
		a. SD/MI/Paket A	105	%
		b. SMP/MTS/Paket B	100	%
		c. SMA/MA/Paket C	87	%
		Angka pendidikan yang ditamatkan		
		a. Tidak/belum pernah bersekolah	4	%
		b. Tidak tamat SD/sederajat	10	%
		c. Tamat SD/sederajat	24	%
		d. Tamat SMP/sederajat	24	%
		e. Tamat SMA/sederajat	32	%
		f. Diploma I/II/III	4,35	%
		g. Diploma IV/SI	0,26	%
		h. S2/S3	0,26	%
		i. SLTP+	57,15	%
		Angka partisipasi murni		
		a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94	%
		b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	76,5	%
		c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	62,5	%
20	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan.	Pendidikan dasar		
		Angka partisipasi sekolah	99,41	%
		Rasio guru terhadap murid	12	%
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata	45	%
		Pendidikan menengah		
		Angka partisipasi sekolah	95,6	%
		Rasio guru terhadap murid	10	%
		Angka Putus Sekolah		

(1)	(2)	(3)	(4)
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,07 %
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,16 %
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,13 %
		Angka Kelulusan	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	82 %
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	85 %
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	85 %
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	106 %
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	165 %
21	Tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang kesehatan pada tahun 2015.	Umur harapan hidup	69 Tahun
		Angka kematian ibu	143 /100.000 LH
		Angka kematian bayi	20 /1000 LH
		Angka kematian anak balita	40 /1000 LH
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %
		Prevalensi gizi kurang dan buruk	20 %
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	50 %
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85 %
		Cakupan kunjungan bayi	95 %
		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat	70 %
		Cakupan pemberian MP-ASI usia 6-24 bulan dari keluarga miskin	100 %
		Cakupan pemberian ASI eksklusif	50 %
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	70 %
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,2 2,6
		Cakupan peserta KB aktif	55 %
		Akses sanitasi dasar	50 %
22	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan sumberdaya kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah.	Rasio dokter umum per satuan penduduk	20 /100.000 pddk
		Rasio dokter spesialis per satuan penduduk	10 /100.000 pddk
		Rasio dokter gigi per satuan penduduk	5 /100.000 pddk

(1)	(2)	(3)	(4)
23	Meningkatnya penyediaan pelayanan medik spesialistik dan kesehatan jiwa serta tersedianya obat esensial di sarana pelayanan dasar dan rujukan.	Jumlah pasien kesehatan jiwa yang mengikuti terapi rehabilitasi dan terapi kerja (modalitas)	3.390 Pasien
		Jumlah Pasien Jiwa yang bebas Pasung	24 Pasien Pasung
		Jumlah pemulangan pasien (*dropping*) kesehatan jiwa	216 Pasien
		Cakupan dan mutu pelayanan intensif *(Acut Care*)	2555 Pasien
24	Terjaminnya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin Aceh dengan jaminan kesehatan berbasis asuransi sosial atau Jaminan Kesehatan Masyarakat Aceh (JKMA).	Jumlah Penduduk yang mendapat fasilitas JKMA :	
		a. Fasilitas JKA Murni	1.762.452 Jiwa
		b. Jaminan kesehatan melalui asurasi sosial lainnya	2.597.339 Jiwa
25	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.	Cakupan penemuan kasus baru penyakit TB BTA +	60 %
		Angka kesuksesan pengobatan TB	>85 %
		Angka kejadian (Incident Rate) DBD	45 /10.000 pddk
		Cakupan prevalensi penyakit kusta	1 /10.000 pddk
		Cakupan kabupaten/kota yang memasuki tahap eliminasi malaria	7 kab/kota
		Desa siaga aktif	50 %
26	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan secara berkelanjutan.	Jumlah Dokumen RPJMA 2012-2017	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKPA 2013	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKPA yang ditetapkan	2 Dokumen
		Jumlah DED RTRW yang tersusun	8 dokumen
		Jumlah dokumen perencananaan sarana dan parasarana pengembangan wilayah srategis dan cepat tumbuh yang tersusun	29 dokumen
		Jumlah rencana tata ruang wilayah Kab/kota yang tersusun	128 dokumen
		Jumlah dokumen Penjabaran Program Pembangunan Aceh yang tersusun	1 dokumen
		Jumlah dokumen Penjabaran Program Pembangunan Aceh yang tersusun	1 dokumen
		Jumlah dokumen pemanfaatan tata ruang kab/kota yang tersusun	1 dokumen

(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Penelitian Pembangunan Daerah	
		Jumlah Dokumen hasil pembahasan program/kegiatan TDBHMG Aceh 2013	1 Dokumen
		Jumlah Publikasi Aceh Dalam Angka 2012	2 Buku
		Jumlah Publikasi PDRB Tahunan/Triwulanan, Ringkasan Eksekutif bulanan Ekonomi Makro dan Sosial, Indikator Ekonomi bulanan	29 Buku
		Jumlah buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat (Inkesmas) Aceh	1 Buku
		Buku Indikator Pembangunan Aceh 2013	1 Buku
		Buku Database Provinsi Aceh 2013	1 Buku
		Sistem Informasi / Database Bidang Infrastruktur	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen hasil penelitian	29 Dokumen
27	Meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	60,63 %
		Rasio Jaringan Irigasi	56,56 %
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	55,13 %
		Permukiman layak huni	93,83 %
		Panjang jalan	0,0039 Km/orang
		Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	57,2 %
		Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	73,28 %
		Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	34,99 %
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	40 %
		Lingkungan Permukiman	2,17 %
		Rumah tangga pengguna air bersih	52 %
		Rumah tangga pengguna listrik	90 %
		Rumah tangga ber-Sanitasi	55,13 %
		Lingkungan pemukiman kumuh	6,18 %
		Rumah layak huni	79,22 %
		Panjang pembangunan saluran/gorong-gorong	187,168 meter

(1)	(2)	(3)	(4)	
		Jumlah Jaringan distribusi air bersih yang terbangun	27	desa
		Panjang pembangunan Jalan	51,721	Km
		Jumlah Pembangunan Jembatan	14	Unit
		Jumlah sarana dan prasarana gedung pemerintah yang terbangun	2218	Unit
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	8.480.783	orang/tahun
		Rasio ijin trayek	3.921	izin/armada
		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	62	Unit
28	Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkualitas.	Persentase penanganan sampah	75	%
		Jumlah peralatan pendukung dan bangunan pengolahan sampah yang terbangun	48	Unit
		Persentase Penduduk berakses air minum	40	%
		Pencemaran status mutu air	47	%
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	79	%
		Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	79	%
		Jumlah perusahaan yang tertib mengelola lingkungan	60	perusahaan
		Jumlah kasus perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	4	Kasus
		Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	276	Ha
		Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat	224.745	Jiwa
		Jumlah Escape Building yang dibangun	4	Unit
		Panjang Pengaman Tebing Sungai yang dibangun	700	Meter
		Jumlah jenis Diseminasi Informasi Lingkungan	12	jenis diseminasi
29	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan Aceh.	Jumlah Ketersediaan cadangan pangan utama	150	Ton
		Pola Konsumsi Pangan Harapan	80,6	Skor PPH
		Jumlah Daerah Rawan Pangan	825	Klp/Desa
		Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang diberdayakan	15	LPM
		Jumlah Desa Mandiri Pangan yang diberdayakan	35	Desa

(1)	(2)	(3)	(4)
		Nilai Tukar Nelayan	109,35 NTN
		Nilai tukar petani	104,50 Persen
		Nilai tukar petani Tanaman Pangan	113,93 NTP
		Nilai tukar petani Tanaman Hortikultura	103,5 NTP
		Kelembagaan Pangan Masyarakat	
		a. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	75 GAPOKTAN
		b. Lumbung Pangan Masyarakat	102 Kelompok
		c. Desa Mandiri Pangan	207 Desa
30	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	
		a. Padi :	1.996.717 Ton
		b. Jagung :	156.243 Ton
		c. Kedelai :	95.950 Ton
		d. Kc. Tanah :	7.003 Ton
		e. Kc. Hijau :	1.464 Ton
		f. Ubi Kayu :	38.626 Ton
		g. Ubi Jalar :	14.184 Ton
		Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan	
		a. Padi	48,02 Ku/Ha
		b. Jagung	38,2 Ku/Ha
		c. Kedelai	14,11 Ku/Ha
		d. Kc. Tanah	12,2 Ku/Ha
		e. Kc. Hijau	10,59 Ku/Ha
		f. Ubi Kayu	128,62 Ku/Ha
		g. Ubi Jalar	105,77 Ku/Ha
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	
		a. Bawang Merah	2.850 Ton
		b. Kentang	8.815 Ton
		c. Cabe Besar	32.871 Ton
		d. Cabe Rawit	19.538 Ton
		e. Pisang	33.858 Ton
		f. Jeruk Besar	10.722 Ton
		g. Durian	10.378 Ton
		h. Rambutan	19.036 Ton

(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura	
		a. Bawang Merah	330 Ku/Ha
		b. Kentang	1.013 Ku/Ha
		c. Cabe Besar	553 Ku/Ha
		d. Cabe Rawit	610 Ku/Ha
		e. Pisang	505,82 Ku/Ha
		f. Jeruk Besar	416,59 Ku/Ha
		g. Durian	107,47 Ku/Ha
		h. Rambutan	59,65 Ku/Ha
		Produksi Daging per tahun	30.002.424 Kg
		Produksi telur pertahun	15.840.826 Kg
		Populasi ternak pertahun	17.773.543 ekor
		Perluasan areal luas baku lahan sawah	26.749 Ha
31	Meningkatnya eksplorasi sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan.	Jumlah pengembangan energi alternatif/ terbarukan	13 Desa
		Pertambangan tanpa ijin	27,24 %
		Rasio ketersediaan daya listrik	83 %

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Pada tahun 2013 Pemerintah Aceh telah menetapkan perjanjian kinerja yang merupakan pernyataan komitmenyang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun. Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2013 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka membangun manajemen kinerja yang

berorientasi pada hasil. Penetapan Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2013 sebagaimana tertera pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3

Penetapan Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatnya jumlah peraturan pelaksana UUPA yang harus diselesaikan 100 persen sampai tahun 2015 (6 PP, 1 Perpres dan 21 Qanun Aceh).	1.1	Jumlah Penyelesaian Peraturan Turunan UU Pemerintah Aceh		
			a. Peraturan Pemerintah (dari 2 rancangan yang diajukan ke Pemerintah)	1	PP
			b. Peraturan Presiden (Perpres ttg Penyerahan Ktr BPN Aceh/ Kab/ Kota menjadi Perangkat Daerah)	1	Pepres
			c. Qanun Aceh	14	Qanun
2	Meningkatnya implementasi UUPA dalam percepatan pembangunan dan menjaga keberlanjutan perdamaian	2.1	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Amanat UU PA dan aturan lainnya yang telah diimplimentasikan:		
			a. Peraturan Gubernur	80	Pergub
			b. Keputusan Gubernur	700	Kepgub

3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang good governance dan clean government (perolehan dari WDP menjadi WTP, akuntabilitas, LAKIP Pemerintah Aceh dari CC menjadi B, indeks kepuasan masyarakat).	3.1	Persentase tingkat kehadiran Aparatur dalam peningkatan disiplin	100,00	%
		3.2	Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan	75,00	%
		3.3	Persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis/ fungsional sesuai bidang tupoksi	60,00	%
		3.4	Predikat Sistem Akuntansi Keuangan (Opini BPK)	WTP	Predikat
		3.5	Nilai rata-rata Persentase Capaian Kinerja SKPA sesuai Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	95,00	%
		3.6	Rata-rata Jumlah Realisasi Anggaran SKPA	92,00	%
		3.7	Jumlah kasus gugatan terhadap Pemerintah Aceh yang diselesaikan	5	Kasus
		3.8	Jumlah tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan	168	LHP
		3.9	Jumlah pengaduan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya yang ditindaklanjuti	35	Kasus
		3.10	Persentase indikasi penyimpangan anggaran	3,00	%
		3.11	Persentase Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh	15,00	%
		3.12	Persentase Peningkatan profesionalisme PNS	10,00	%
		3.13	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik:		
			a. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	86,66	Sangat Baik
			b. Rumah Sakit Ibu dan Anak	75,54	Baik
			c. Rumah Sakit Jiwa	76,00	Baik
			d. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	83,73	Sangat Baik
			e. Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh	75,00	Baik
			f. UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh	75,00	Baik

4	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan (lama waktu perizinan dari 7 hari menjadi 3 hari dan tersedianya akses informasi dokumen publik (RPJPA, RTRWA, RPJMA, RKPA, Statistik Daerah, APBA, LKPJ, LPPD) pada website pemerintah).	4.1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100,00	%
		4.2	Jumlah KK yang terdata dalam SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	1.460.000	KK
		4.3	Persentase Jumlah Penduduk yang telah melakukan perekaman e_KTP	80,00	%
		4.4	Jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan	6.296	Dok
		4.5	Persentase pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui ULP / LPSE Provinsi Aceh	100,00	%
		4.6	Persentase Dokumen pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang terintegrasi pada website Pemerintah	85,00	%
		4.7	Jumlah Unit Layanan Publik yang telah menerapkan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)	6	Unit
		4.8	Persentase organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran		
			a. Pemerintah Aceh	87,00	%
			b. Kab/Kota	75,00	%
		4.9	Jumlah Unit Kerja yang menyusun SOP	5	Unit
		4.10	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang menyusun standar Pelayanan	2	Unit
		4.11	Jumlah penduduk yang terdata dalam data base kependudukan berbasis sosial	1.460.000	KK
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh (meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pelaksanaan) dan meningkatnya persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen anggaran	5.1	Persentase keterwakilan masyarakat dalam Musrembang Pembangunan Aceh	100,00	%
		5.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	74,50	%
		5.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	35,50	%
		5.4	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	60,00	%
		5.5	Persentase peningkatan pembinaan politik daerah	10,00	%

6	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian.	6.1	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	30,00	%
		6.2	Jumlah konflik masyarakat yang tertangani	30,00	kasus
		6.3	Menurunkan jumlah pelanggaran qanun dan gangguan trantibum	30,00	%
		6.4	Angka kriminalitas yang tertangani	20,00	%
		6.5	Persentase penurunan tingkat kerawanan, kriminalitas dan gangguan ketertiban/ketentraman di masyarakat	50,00	%
		6.6	Rasio pos siskamling per jumlah desa/ penduduk (PP No.6/2008)	6.461	Pos
		6.7	Persentase penyelesaian kasus kewaspadaan dini masyarakat	60,00	%
		6.8	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk (PP No. 6/2008)	459	Personil
		6.9	Persentase penduduk yang memahami pencapaian perdamaian	60,00	%
		6.10	Jumlah Rumah Sehat Sederhana bagi masyarakat PMKS, Mantan Kombatan, Tapol/Napol, Masyarakat Imbas konflik dan masyarakat korban bencana yang terbangun	4.918	Unit
7	Meningkatnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai Dinul Islam.	7.1	Jumlah Gampong dan Mukim yang dijadikan lokasi sosialisasi pelestarian adat istiadat	12	Gampong/ mukim
		7.2	Persentase Jumlah Panduan atau Manual Pelaksanaan Hukum Adat yang dihasilkan	7	buku/ majalah
		7.3	Jumlah Kelembagaan Adat yang dibentuk kembali dalam Masyarakat	1	Lembaga
		7.4	Freukuensi festival dan event budaya Aceh	108	kali

		7.5	Jumlah kunjungan wisatawan manca Negara ke Aceh	29.400	Orang
		7.6	Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Aceh	997.620	Orang
		7.7	Jumlah pengembangan objek pariwisata	20	Objek
		7.8	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	53	buah
		7.9	Jumlah grup kesenian	50	sanggar
		7.10	Jumlah gedung Kesenian	4	buah
8	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam.	8.1	Jumlah simulasi gampong percontohan bersyariah di Aceh	3	Gampong
		8.2	Jumlah masyarakat dan muallaf yang dibina dalam wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil	240	orang
		8.3	Jumlah Qari-Qariah yang berpartisipasi pada STQ dan MTQ Nasional/ Internasional	16	orang
		8.4	Kasus Pelanggaran Qanun Syariat yang ditangani : - Khamar - Khalwat - Maisir	 4 5 65	 Kasus Kasus Kasus
		8.5	Jumlah persentase penyaluran infaq	100,00	%
		8.6	Jumlah Peningkatan Muzakki yang membayar Zakat	200	orang
		8.7	Persentase penyaluran Zakat (Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil)	100,00	%
		8.8	Frekuensi Operasi Penegakan Syariat Islam	54	kali
		8.9	Jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang direhab/ dibangun (Mesjid/ Meunasah/ pesantren/ dayah)	600	Unit
		8.10	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,374	%

9	Meningkatnya peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai Dinul Islam dan mengangkat kembali budaya-budaya Aceh yang Islami	9.1	Jumlah Da'i yang ditempatkan pada daerah perbatasan dan terpencil	150	orang
		9.2	Jumlah sertifikasi produk halal yang diterbitkan	30	Sertifikat
		9.3	Jumlah Fatwa, Himbauan, Seruan danTaushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan Syariat Islam	10	Dokumen
		9.4	Jumlah Kader Ulama yang terlatih	80	Orang
		9.5	Frekuensi Dakwah Interaktif	23	kali
		9.6	Jumlah Penerimaan Infaq/sadaqah	18.000.000.000	Rupiah
10	Meningkatnya struktur perekonomian yang mantap berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.	10.1	Pertumbuhan PDRB	6,6	%
		10.2	Laju inflasi Aceh	5,00	%
		10.3	PDRB per kapita	7,54	Juta
		10.4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,00	%
		10.5	Kontribusi sub sektor pertanian pangan terhadap PDRB	11,07	%
		10.6	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	6,31	%
		10.7	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	4,57	%
		10.8	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (PSDH/DR)	1,58	%
		10.9	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	7,9	%

		10.10	Kontribusi sektor energi terhadap PDRB	0,42	%
		10.11	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	4,47	%
		10.12	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	16,05	Milyar
		10.13	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	5,66	%
		10.14	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	4.306.824.000.000	Rupiah
		10.15	Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	2,5	%
		10.16	Nilai ekspor non migas	95,643	US$
		10.17	Jumlah negara tujuan ekspor	22	Negara
11	Berkembangnya sistem agribisinis yang mampu menyediakan produk-produk pertanian yang cukup, bermutu dan aman konsumsi	11.1	Jumlah produksi olahan perikanan	48	Ton
		11.2	Jumlah jenis olahan hasil perikanan yang dikembangkan	10	Jenis
		11.3	Persentase peningkatan agribisnis peternakan	5,00	%
		11.4	Jumlah Komoditi Unggulan daerah yang dipromosikan	5	Komoditi
12	Pengembangan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai dengan Sumberdaya alam dan agro ekosistem wilayah	12.1	Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah :		
			a. Karet Kering	65.164	Ton
			b. Kelapa Sawit (CPO)	182.305	Ton
			c. Kopi (Biji Kering)	50.949	Ton
			d. Kakao (biji Kering)	37.582	Ton
		12.2	Jumlah rehabilitasi/ pembangunan JUT dan JITUT :		
			a. JUT	134.972	Meter
			b. JITUT	131.119	Meter
		12.3	Jumlah luas lahan yang dioptimasi	2.041	Ha
		12.4	Jumlah alat dan mesin Pertanian untuk peningkatan produksi	2.435	unit

		12.5	luas lahan yang diberikan Saprodi	9.561	Ha
		12.6	Persentase luas lahan pengendalian OPT :		
			- Padi	52,00	%
			- Jagung	25,00	%
			- Kedelai	36,00	%
			- Kacang Tanah	10,00	%
			- Ubi Kayu	28,00	%
		12.7	Jumlah kebun sumber bibit yang bangun	5	lokasi
		12.8	Persentase bibit yg disertifikasi	100,00	%
13	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah terpencil dan pesisir.	13.1	Jumlah Produksi perikanan	214.757	Ton
		13.2	Cakupan bina kelompok nelayan	50	Kelp
		13.3	Produksi perikanan kelompok nelayan	143.680	Ton
		13.4	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang diberdayakan	20	Gapoktan/ LDPM
		13.5	Jumlah Tenaga Penyuluh yang ditingkatkan Kemampuan dan Keterampilan	1.200	orang
		13.6	Jumlah Pilot Percontohan yang dibangun sebagai media transfer teknologi ke petani	474	unit
14	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	14.1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA)	12,00	%
		14.2	Persentase Kekayaan Milik Pemerintah Aceh yang digunausahakan	30,00	%
		14.3	Persentase jumlah aset yang terinventarisir	50,00	%
		14.4	Persentase peningkatan wajib pajak yang taat dalam membayar pajak daerah	10,00	%
		14.5	Jumlah Penerimaan Zakat	10.000.000.000	Rupiah

15	Menurunnya angka pengangguran terbuka Aceh	15.1	Persentase angka pengganggguran terbuka	7,22	%
		15.2	Rasio daya serap tenaga kerja	1:210	%
		15.3	Angka partisipasi angkatan kerja	2.164.998	Orang
		15.4	Angka sengketa pengusaha-pekerja dan penyelesaian per tahun	150	kasus
		15.5	Pencari kerja yang ditempatkan	6.661	Orang
		15.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	10	Kasus
		15.7	Peningkatan Tenaga Kerja yang berkerja di sektor Pertanian	810.283	Orang
		15.8	Persentase daya serap tenaga kerja sektor perindustrian	2,25	%
16	Menurunnya angka kemiskinan dengan perbaikan pendapatan dan pemberdayaan kemandirian melalui perluasan lapangan usaha	16.1	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	17,5	%
		16.2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	5,1	%
		16.3	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	5,85	%
		16.4	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	20,00	%
		16.5	Jumlah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	71.460	Jiwa
		16.6	Jumlah Fakir Miskin yang mendapat bantuan rumah dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	733	KK
		16.7	Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	235	KK
17	Meningkatnya Investasi Dalam Negeri dan Investasi Asing	17.1	Jumlah investor/perusahaan (PMDN/PMA)	69	Perusahaan
		17.2	Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	2.000.000.000.000	Rupiah
		17.3	Jumlah nilai rencana investasi	6.350.000.000.000,00	Rupiah
		17.4	Persentase Kenaikan nilai rencana investasi	15,00	%
		17.5	Jumlah regulasi dan kebijakan dibidang penanaman modal dan investasi yang tersusun	8	Dok

18	Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal	18.1	Jumlah kelembagaan pertanian masyarakat yang dibina	290	unit
		18.2	Jumlah kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir yang mandiri	4	Kab/Kota/ lembaga/Klp
		18.3	Kelembagaan Pangan Masyarakat :		
			a. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	75	GAPOKTAN
			b. Lumbung Pangan Masyarakat	102	Klp
			c. Desa Mandiri Pangan	207	Desa
		18.4	Populasi Koperasi	7.327	Unit
		18.5	Persentase koperasi aktif	52,95	%
		18.6	Jumlah Penyebaran BPR/LKM	28	Unit
		18.7	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	82.306	Unit
		18.8	Jumlah Penyaluran kredit untuk UMKM	13,81	Triliun
		18.9	Persentase peningkatan Koperasi Berkualitas	2,00	%
		18.10	Peningkatan Populasi UMKM	0,75	%
		18.11	Peningkatan jumlah UMKM yang memanfaatkan Dana modal usaha	15,00	%
		18.12	Jumlah pedagang yang tertampung pada pasar tradisional yang telah dibangun	25.000	Pedagang
19	Tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang pendidikan pada tahun 2015.	19.1	Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	53,00	%
		19.2	Jumlah anak yatim yang mendapat bantuan bea siswa pendidikan dasar dan menengah	116.666	Anak Yatim
		19.3	Persentase Peningkatan Angka melek huruf (Tahun) Usia 15+	96,10	%
		19.4	Angka rata-rata lama sekolah	9,7	Tahun
		19.5	Angka partisipasi kasar :		
			a. SD/MI/Paket A	105,00	%
			b. SMP/MTS/Paket B	100,00	%
			c. SMA/MA/Paket C	87,00	%

		19.6	Angka pendidikan yang ditamatkan :		
			a. Tidak/belum pernah bersekolah	4,00	%
			b. Tidak tamat SD/sederajat	10,00	%
			c. Tamat SD/sederajat	24,00	%
			d. Tamat SMP/sederajat	24,00	%
			e. Tamat SMA/sederajat	32,00	%
			f. Diploma I/II/III	4,35	%
		19.7	Angka partisipasi murni :		
			a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,00	%
			b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	76,50	%
			c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	62,50	%
20	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan.	20.1	Pendidikan dasar :		
			1. Angka partisipasi sekolah	99,41	%
			2. Rasio guru terhadap murid	12,00	%
			3 Rasio guru/murid per kelas rata-rata	45,00	%
		20.2	Pendidikan menengah :		
			1. Angka partisipasi sekolah	95,60	%
			2. Rasio guru terhadap murid	10,00	%
		20.3	Angka Putus Sekolah :		
			1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,07	%
			2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,16	%
			3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,13	%
		20.4	Angka Kelulusan :		
			1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	82,00	%
			2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	85,00	%
			3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	85,00	%
			4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	106,00	%
			5. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	165,00	%

21	Tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang kesehatan pada tahun 2015.	21.1	Umur harapan hidup	69	Tahun
		21.2	Angka kematian ibu	143	/100.000 LH
		21.3	Angka kematian bayi	20	/1000 LH
		21.4	Angka kematian anak balita	40	/1000 LH
		21.5	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	%
		21.6	Prevalensi gizi kurang dan buruk	20,00	%
		21.7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	50,00	%
		21.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85,00	%
		21.9	Cakupan kunjungan bayi	95,00	%
		21.10	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat	70,00	%
		21.11	Cakupan pemberian MP-ASI usia 6-24 bulan dari keluarga miskin	100,00	%
		21.12	Cakupan pemberian ASI eksklusif	50,00	%
		21.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	70,00	%
22	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan sumberdaya kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah.	22.1	Rasio dokter umum per satuan penduduk	20	/100.000 pddk
		22.2	Rasio dokter spesialis per satuan penduduk	10	/100.000 pddk
		22.3	Rasio dokter gigi per satuan penduduk	5	/100.000 pddk
23	Meningkatnya penyediaan pelayanan medik spesialistik dan kesehatan jiwa serta tersedianya obat esensial di sarana pelayanan dasar dan rujukan.	23.1	Jumlah pasien kesehatan jiwa yang mengikuti terapi rehabilitasi dan terapi kerja (modalitas)	3.390	Pasien
		23.2	Jumlah Pasien Jiwa yang bebas Pasung	24	Pasien Pasung
		23.3	Jumlah pemulangan pasien (*dropping*) kesehatan jiwa	216	Pasien
		23.4	Cakupan dan mutu pelayanan intensif *(Acut Care*)	2.555	Pasien

24	Terjaminnya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin Aceh dengan jaminan kesehatan berbasis asuransi sosial atau Jaminan Kesehatan Masyarakat Aceh (JKMA)	24.1	Jumlah Penduduk yang mendapat fasilitas JKMA a. Fasilitas JKA Murni b. Jaminan kesehatan melalui asurasi sosial lainnya	 1.762.452 2.597.339	 Jiwa Jiwa
25	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.	25.1	Cakupan penemuan kasus baru penyakit TB BTA +	60,00	%
		25.2	Angka kesuksesan pengobatan TB >85	85	%
		25.3	Angka kejadian (Incident Rate) DBD	45	/100.000 pddk
		25.4	Cakupan prevalensi penyakit kusta	1	/100.000 pddk
		25.5	Cakupan kabupaten/kota yang memasuki tahap eliminasi malaria	7	kab/kota
		25.6	Desa siaga aktif	50,00	%
26	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan secara berkelanjutan.	26.1	Jumlah Dokumen RPJMA 2012-2017	1	Dok
		26.2	Jumlah Dokumen RKPA 2013	1	Dok
		26.3	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2	Dok
		26.4	Jumlah DED RTRW	8	Dok
		26.5	Jumlah dokumen perencananaan sarana dan parasarana pengemb. wilayah srategis dan cepat tumbuh yang tersusun	29	Dok
		26.6	Jumlah rencana tata ruang wilayah Kab/kota yang tersusun	14	Dok
		26.7	Jumlah dokumen Penjabaran Program Pembangunan Aceh yang tersusun	1	Dok
		26.8	Jumlah dokumen Penjabaran Program Pembangunan Aceh yang tersusun	1	Dok
		26.9	Jumlah dokumen pemanfaatan tata ruang kab/kota yang tersusun	1	Dok
		26.10	Jumlah Dokumen hasil pembahasan program/kegiatan TDBHMG Aceh 2013	1	Dok
		26.11	Jumlah Publikasi Aceh Dalam Angka 2012	2	Buku
		26.12	Jumlah Publikasi PDRB Tahunan/Triwulanan, Ringkasan Eksekutif bulanan Ekonomi Makro dan Sosial, Indikator Ekonomi bulanan	29	Buku
		26.13	Jumlah buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat (Inkesmas) Aceh	1	Buku
		26.14	Indikator Pembangunan Aceh 2013	1	Buku
		26.15	Database Provinsi Aceh 2013	1	Buku
		26.16	Sistem Informasi / Database Bidang Infrastruktur	1	Dok
		26.17	Jumlah Dokumen hasil penelitian	29	Dok

27	Meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah	27.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	60,63	%
		27.2	Rasio Jaringan Irigasi	56,56	%
		27.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	55,13	%
		27.4	Permukiman layak huni	93,83	%
		27.5	Panjang jalan	0,0039	Km/orang
		27.6	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	40,00	%
		27.7	Lingkungan Permukiman	2,17	%
		27.8	Rumah tangga pengguna air bersih	52,00	%
		27.9	Rumah tangga pengguna listrik	90,00	%
		27.10	Lingkungan pemukiman kumuh	6,18	%
		27.11	Rumah layak huni	79,22	%
		27.12	Panjang pembangunan saluran/gorong-gorong	187,17	meter
		27.13	Jumlah Jaringan distribusi air bersih yang terbangun	27	desa
		27.14	Panjang pembangunan Jalan	51,721	Km
		27.15	Jumlah Pembangunan Jembatan	14	Unit
		27.16	Jumlah sarana dan prasarana gedung pemerintah yang terbangun	2.218	Unit
		27.17	Jumlah arus penumpang angkutan umum	8.480.783	orang/ tahun
		27.18	Rasio ijin trayek	3.921	armada/ Penduduk
		27.19	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	62	Unit

28	Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkualitas.	28.1	Persentase penanganan sampah	75,00	%
		28.2	Jumlah peralatan pendukung dan bangunan pengolahan sampah yang terbangun	48	Unit
		28.3	Persentase Penduduk berakses air minum	40,00	%
		28.4	Pencemaran status mutu air	47,00	%
		28.5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	79,00	%
		28.6	Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	79,00	%
		28.7	Jumlah perusahaan yang tertib mengelola lingkungan	60	perusahaan
		28.8	Jumlah kasus perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	4	Kasus
		28.9	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	276	Ha
		28.10	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat	224.745	Jiwa
		28.11	Jumlah Escape Building yang dibangun	4	Unit
		28.12	Panjang Pengaman Tebing Sungai yang dibangun	700	Meter
		28.13	Jumlah jenis Diseminasi Informasi Lingkungan	12	Jenis
29	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan Aceh.	29.1	Jumlah Ketersediaan cadangan pangan utama	150	Ton
		29.2	Pola Konsumsi Pangan Harapan	80,60	Skor PPH
		29.3	Jumlah Daerah Rawan Pangan	825	Klp/Desa
		29.4	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang diberdayakan	15	LPM
		29.5	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang diberdayakan	35	Desa
		29.6	Nilai Tukar Nelayan	109,35	NTN
		29.7	Nilai tukar petani	104,50	NTP
		29.8	Nilai tukar petani Tanaman Pangan	113,93	NTP
		29.9	Nilai tukar petani Tanaman Hortikultura	103,5	NTP
		29.10	Kelembagaan Pangan Masyarakat		
			a. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	75	GAPOKTAN
			b. Lumbung Pangan Masyarakat	102	Kelompok
			c. Desa Mandiri Pangan	207	Desa

30	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan	30.1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan :		
			a. Padi	1.996.717	Ton
			b. Jagung	156.243	Ton
			c. Kedelai	95.950	Ton
			d. Kc. Tanah	7.003	Ton
			e. Kc. Hijau	1.464	Ton
			f. Ubi Kayu	38.626	Ton
			g. Ubi Jalar	14.184	Ton
		30.2	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan :		
			a. Padi	48,02	Ku/Ha
			b. Jagung	38,2	Ku/Ha
			c. Kedelai	14,11	Ku/Ha
			d. Kc. Tanah	12,2	Ku/Ha
			e. Kc. Hijau	10,59	Ku/Ha
			f. Ubi Kayu	128,62	Ku/Ha
			g. Ubi Jalar	105,77	Ku/Ha
		30.3	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura :		
			a. Bawang Merah	2.850	Ton
			b. Kentang	8.815	Ton
			c. Cabe Besar	32.871	Ton
			d. Cabe Rawit	19.538	Ton
			e. Pisang	33.858	Ton
			f. Jeruk Besar	10.722	Ton
			g. Durian	10.378	Ton
			h. Rambutan	19.036	Ton
		30.4	Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura		
			a. Bawang Merah	54,26	Ku/Ha
			b. Kentang	144	Ku/Ha
			c. Cabe Besar	103,88	Ku/Ha
			d. Cabe Rawit	121,28	Ku/Ha
			e. Pisang	610	Ku/Ha
			f. Jeruk Besar	373,81	Ku/Ha
			g. Durian	126,28	Ku/Ha
			h. Rambutan	60,27	Ku/Ha
		30.5	Produksi Daging per tahun	30.002.424	Kg
		30.6	Produksi telur pertahun	15.840.826	Kg
		30.7	Populasi ternak pertahun	17.773.543	ekor

31	Meningkatnya eksplorasi sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan.	31.1	Jumlah pengembangan energi alternatif/ terbarukan	13	Desa
		31.2	Pertambangan tanpa ijin	27,24	%
		31.3	Rasio ketersediaan daya listrik	83,00	%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Aceh merupakan rangkaian dan mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMA Tahun 2017.

Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai, berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2013.

A. Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2013

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*performance gap*). Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan Pemerintah Aceh untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan dua rumus, yaitu :

a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik ***(Progres Positif)*** dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian ***(Progres Negatif)***, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{(Realisasi)-(Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setia sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	76% sampai 100%	Baik
3.	55% sampai 75%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

B. Evaluasi Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pemerintah Aceh tahun 2013 berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target-target kinerja yang telah diperjanjikan/ ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Pemerintah Aceh tahun 2013, diukur dan dianalis tingkat keberhasilan/ kegagalan

yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Aceh Tahun 2013 dengan menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran dan analisis kinerja tersebut, dilakukan pada setiap indikator kinerja dan target kinerja setiap Sasaran Strategis, dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai selama kurun waktu satu tahun, sebagai berikut :

1.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya Jumlah Peraturan Pelaksanaan UUPA yang harus diselesaikan 100 persen sampai Tahun 2015 (6 PP, 1 Perpres dan 21 Qanun Aceh)

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
1.1	Jumlah Penyelesaian Peraturan Turunan UU Pemerintah Aceh				
	a. Peraturan Pemerintah (dari 2 rancangan yang diajukan ke Pemerintah)	1	PP	0	0,00
	b. Peraturan Presiden (Perpres ttg Penyerahan Ktr BPN Aceh/ Kab/ Kota menjadi Perangkat Daerah)	1	Pepres	0	0,00
	c. Qanun Aceh	14	Qanun	22	157,14
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**52,38**

Berdasarkan pengukuran dari 3 (tiga) indikator kinerja Sasaran Strategis *"Meningkatnya Jumlah Peraturan Pelaksanaan UUPA yang harus diselesaikan 100 persen sampai dengan Tahun 2015 (6 PP, 1 Perpes dan 21 Qanun Aceh)"* diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **52,38%** atau dikategorikan

Kurang. Rendahnya tingkat capaian ini disebabkan oleh 2 (dua) indikator kinerja yang realisasinya belum mencapai target, yaitu :

Indikator kinerja *Peraturan Pemerintah (dari 2 rancangan yang diajukan ke Pemerintah)* yang ditargetkan 1 Peraturan Pemerintah sampai dengan akhir tahun 2013 belum dapat terealisasi hal ini disebabkan Pemerintah Pusat belum menetapkan peraturan pemerintah tersebut yaitu *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Migas Aceh*. Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat berkaitan dengan RPP dimaksud ada beberapa substansi yang belum disepakati yaitu Pemerintah Aceh dalam membahas RPP Migas mengacu kepada MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang mengamanatkan Pengelolaan Migas dari 12 sampai dengan 200 Mil, sedangkan Pemerintah Pusat dalam pembahasan RUU dimaksud mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Migas yang mengamanatkan bahwa 0-4 Mil kewenangan Kabupaten/kota, sedangkan 4–12 Mil kewenangan Provinsi, 12–200 Mil kewenangan Nasional, dan tentang pembentukan BP-Migas Aceh, menurut Pemerintah Pusat pengelolaan Migas adalah urusan negara yang tidak bisa diserahkan ke lembaga lain. Sedangkan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah Bersifat Nasional di Aceh, dari 32 Kewenangan, hanya 1 (satu) Kewenangan yang belum ada kesepahaman bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh yaitu Kewenangan di Bidang Pertanahan, dimana Pemerintah Aceh menginginkan sub kewenangan bidang Pertanahan sejumlah 11 item, sedangkan Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Aceh hanya memiliki 6 (enam) sub kewenangan.

Dari permasalahan yang ada, Pemerintah Aceh telah membentuk tim bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan rapat-rapat secara maraton guna mempercepat lahirnya Peraturan Pemerintah tersebut.

Indikator Kinerja *Peraturan Presiden (Perpres ttg Penyerahan Ktr BPN Aceh/ Kab/ Kota menjadi Perangkat Daerah)* yang ditargetkan 1 (satu) Peraturan Presiden sampai dengan akhir tahun 2013, belum dapat direalisasikan. Adapun Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyerahan urusan Pertanahan (BPN) Aceh tersebut, hingga saat ini, draftnya sudah disampaikan kepada Presiden melalui Sekretaris Negara untuk ditandatangani.

Dalam upaya mempercepat lahirnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tersebut Pemerintah Aceh akan melakukan pertemuan dengan Menkumham dan lembaga terkait lainnya agar Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sebagai turunan yang diamanahkan dalam UUPA dapat diselesaikan sebelum berakhir jabatan Presiden SBY.

Terhadap indikator kinerja *Qanun Aceh* yang ditargetkan 14 qanun mampu direalisasikan melebihi target yaitu sebanyak 22 qanun atau tingkat capaiannya sebesar 157,14%. Tingginya realisasi tingkat capaian melebihi target yang telah ditetapkan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Aceh dan DPRA untuk mempercepat lahirnya Qanun yang merupakan turunan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tingkat capaian ini mengalami peningkatan sebesar 46,67% bila dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2012 yaitu sebanyak 15 Qanun.

2.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya Implementasi UUPA dalam Percepatan Pembangunan dan Menjaga Keberlanjutan Perdamaian

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
2.1	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Amanat UU PA dan aturan lainnya yang telah diimplimentasikan:				
	a. Peraturan Gubernur	80	Pergub	110	137,50
	b. Keputusan Gubernur	700	Kepgub	1003	143,29
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**140,39**

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis "*Meningkatnya Implementasi UUPA dalam Percepatan Pembangunan dan Menjaga Keberlanjutan Perdamaian*" sebagaimana dalam tabel 3.2, bahwa rata-rata persentase capaian pada tahun 2013 sebesar **140,39%** dapat dikategorikan ***Sangat Baik.*** Tingkat keberhasilan ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu:

Indikator kinerja jumlah *Peraturan Gubernur* yang ditargetkan sebanyak 80 Peraturan Gubernur, dengan tingkat capaian sebesar 137,50%. Tingginya pencapaian kinerja indikator tersebut, disebabkan banyaknya draft Peraturan Gubernur yang disusun oleh SKPA terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing dan dapat diselesaikan serta ditandatangani oleh Gubernur pada Tahun 2013.

Indikator kinerja *Keputusan Gubernur* yang ditargetkan sebanyak 700 Keputusan mampu direalisasikan sebanyak 1.003 Keputusan Gubernur atau dengan tingkat capaian sebesar 143,29%. Tingginya realisasi tingkat capaian dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Aceh tetap berkomitmen dalam mengimplimentasikan UUPA dalam Percepatan Pembangunan dan Menjaga Keberlanjutan Perdamaian sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai daerah otonomi khusus dan mewujudkan *self government*.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Tahun 2013 dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja Tahun 2012 terhadap indikator Jumlah Peraturan Perundang-undangan Amanat UUPA dan aturan lainnya yang telah diimplimentasikan dalam bentuk penetapan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Aceh mengenai peningkatan sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Tingkat Capaian Tahun 2012
dengan Tahun 2013 Terhadap Indikator Jumlah Peraturan
Perundang-undangan Amanat UUPA dan Aturan Lainnya yang
telah diimplimentasikan.

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013	
		Capaian	Target	Capaian
a.	Peraturan Gubernur	94	80	110
b.	Keputusan Gubernur	864	700	1003

Berdasarkan tabel di atas, jumlah peraturan perundang-undangan Amanat UUPA dan aturan lainnya yang telah diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Aceh terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan pada tahun 2013

sebanyak 110 dokumen, meningkat sebanyak 24 dokumen dari tahun 2012, demikian juga terhadap jumlah keputusan gubernur meningkat sebanyak 139 dokumen dari tahun 2012.

3.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance dan Clean Government (perolehan dari WDP menjadi WTP, Akuntabilitas, LAKIP Pemerintah Aceh dari CC menjadi B, Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 13 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
3.1	Persentase tingkat kehadiran Aparatur dalam peningkatan disiplin	100,00	%	98,00	98,00
3.2	Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan	75,00	%	75,00	100,00
3.3	Persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis/ fungsional sesuai bidang tupoksi	60,00	%	60,00	100,00
3.4	Predikat Sistem Akuntansi Keuangan (Opini BPK)	WTP	Predikat	WDP	80,00
3.5	Nilai rata-rata Persentase Capaian Kinerja SKPA sesuai Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	95,00	%	93,00	97,89
3.6	Rata-rata Jumlah Realisasi Anggaran SKPA	92,00	%	92,44	100,48

3.7	Jumlah kasus gugatan terhadap Pemerintah Aceh yang diselesaikan	5	Kasus	5	100,00
3.8	Jumlah tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan	168	LHP	135	80,36
3.9	Jumlah pengaduan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya yang ditindaklanjuti	35	Kasus	16	45,71
3.10	Persentase indikasi penyimpangan anggaran	3,00	%	1,70	56,67
3.11	Persentase Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh	15,00	%	6,13	40,87
3.12	Persentase Peningkatan profesionalisme PNS	10,00	%	17,44	174,40
3.13	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik:				
	a. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	86,66	Sangat Baik	86,66	100,00
	b. Rumah Sakit Ibu dan Anak	75,54	Baik	75,54	100,00
	c. Rumah Sakit Jiwa	76,00	Baik	76,00	100,00
	d. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	83,73	Sangat Baik	78,92	94,26
	e. Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh	75,00	Baik	71,38	95,17
	f. UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh	75,00	Baik	75,11	100,15
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**92,44**

Berdasarkan hasil pengukuran 13 indikator kinerja sasaran strategis *"Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance dan Clean Goverment (perolehan dari WDP menjadi WTP, Akuntabilitas, LAKIP Pemerintah Aceh dari CC menjadi B, Indeks Kepuasan Masyarakat"*, diperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **92,44**% atau dikategorikan ***Baik***.

Baiknya rata-rata perolehan dimaksud didukung oleh tingkat capaian realisasi beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang tingkat capaiannya belum mencapai target, secara rinci analisis pencapaian indikator sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Peningkatan kehadiran aparatur yang ditargetkan sebesar 100% mampu direalisasikan sebesar 98% dengan tingkat capaian sebesar 98%, belum optimalnya tingkat capaian indikator kinerja ini selain disebabkan kesadaran aparatur pemerintah dalam mematuhi ketentuan kehadiran belum maksimal. Selain hal tersebut, belum semua SKPA menerapkan sistem Absensi secara elektronik karena mesin absensi elektronik yang sudah pernah diadakan tidak sesuai lagi dengan adanya perubahan Nomor Induk Pegawai (dari 9 digit sekarang 18 digit).
b. Indikator Kinerja Predikat Sistem Akuntansi Keuangan (Opini BPK) yang ditargetkan mendapat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), hanya mampu direalisasikan mendapat Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 80%.

   Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan tahun 2012, Pemerintah Aceh mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Hal tersebut disebabkan beberapa temuan yaitu :

   - Pendapatan dan Belanja BLUD dapat dikonsolidasikan pada anggaran dan realisasi LRA;
   - Nilai Piutang Dana Bergulir dapat disajikan sesuai metode *Net Realizable Value*;
   - Investasi permanen dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
   - Pencatatan aset tetap didukung dengan rincian data aset yang memadai;
   - Menetapkan tujuan dan jangka waktu pembentukan dana cadangan dalam qanun;

- Nilai utang pajak yang merupakan bagian dari utang jangka pendek lainnya dapat diketahui nilai wajarnya;
- Mengkonversikan pendapatan jasa layanan BLUD berdasarkan SAP dan menyajikan pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah;
- Realisasi atas pencairan SP2D-LS atas Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat bencana alam banjir bandang Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012 dapat dipertanggungjawabkan.

c. Indikator Kinerja Nilai rata-rata persentase capaian kinerja SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh tahun 2013 dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 95% dapat dicapai melebihi target yaitu sebesar 93% dengan persentase tingkat capaian kinerja sebesar 97,89%. Nilai capaian tersebut telah menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh SKPA. Hasil evaluasi rekapitulasi tingkat capaian Kinerja yang dirata-ratakan dan dibagi keseluruhan jumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang terdiri dari 6 (enam) sekretariat, 22 dinas dan 18 lembaga teknis daerah atau berjumlah 47 Unit diperoleh capaian kinerja sebesar 96,3%. Kontribusi Kinerja terbesar disumbangkan oleh 21 SKPA yang terdiri atas Sekretariat DPRA, Dinas Perikanan, Bappeda, Inspektorat Aceh, Sekretariat Daerah Aceh, Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, Mobilitas Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, RSU Jiwa Aceh, RSU Zainoel Abidin Banda Aceh, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Investasi dan Promosi Aceh, Sekretariat Baitul Mal Aceh, Dinas Bina Marga, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Keuangan Aceh, dan Pendapatan dan Kekayaan Aceh.

d. Indikator Kinerja Rata-rata jumlah realisasi anggaran SKPA, pada tahun 2013 ditargetkat 92% terealisasi 92,44% dengan persentase tingkat capaian 100,48%. Hal ini disebabkan APBA-P disahkan pada akhir Oktober, 3 (tiga) bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran, sehingga beberapa program dan kegiatan yang bersifat fisik tidak dapat dilaksanakan. Selain itu ada beberapa proyek fisik besar yang tidak dapat diselesaikan oleh rekanan karena adanya permasalahan baik yang bersifat eksternal maupun internal.

e. Indikator Kinerja Jumlah tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, dari target 168 LHP dapat realisasi 135 LHP dengan persentase tingkat capaian sebesar 80,36%. Upaya yang dilakukan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan antara lain Pelaksanaan pengawasan internal secara terbuka; Penanganan kasus-kasus pengaduan (Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya); Inventarisasi temuan pengawasan; Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan; Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.213.856.000,-

f. Indikator Kinerja Pengaduan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya yang ditindaklanjuti, yang ditargetkan 35 Kasus hanya terealisasi sebanyak 16 Kasus, atau tingkat capaian sebesar 45,71%. Pada tahun 2013 berdasarkan data Inspektorat Aceh, kasus pengaduan masyarakat sampai dengan akhir tahun 2013 berjumlah 16 Kasus dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap capaian sebesar 45,71% pada indikator ini bukan berarti kinerjanya belum optimal akan tetapi kasus pengaduan

masyarakat yang diterima pada tahun 2013 hanya 16 kasus atau lebih rendah dari target yang ditetapkan.

g. Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh pada tahun 2013 terealisasi sebesar 6,13% dari yang ditargetkan 15%. Berdasarkan Hasil Evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai/rating Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh mengalami peningkatan sebesar 3,08 point. Belum optimalnya capaian kinerja indikator ini, sesuai dengan rekomendasi Kementerian PAN dan RB, dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

- Perencanaan Kinerja, Dokumen RPJMA Pemerintah Aceh dan Renstra SKPA belum dimanfaatkan sebagai alat mengendalikan dan memperbaiki kinerja serta tidak selarasnya dokumen PK dengan dokumen RPJMA 2007-2012. Akan tetapi dokumen RPJMA yang digunakan sebagai acuan dokumen PK tahun 2013 merupakan dokumen transisi.
- Pengukuran Kinerja, Beberapa indikator kinerja yang digunakan pada Renstra SKPA Revisi tidak dapat diukur secara objektif, tidak menggambarkan hasil dan tidak relevan untuk mengukur tingkat capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, sehingga hasil pengukuran kinerja tidak dapat dimanfaaatkan untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian kinerja karena belum mencerminkan kinerja yang sesungguhnya.
- Pelaporan Kinerja, LAKIP Pemerintah Aceh dan SKPA belum sepenuhnya membuat pembanding antara tingkat realisasi indikator kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu

dan belum menyampaikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian kinerja.

- Evaluasi Kinerja, Pedoman/ Juklak Evaluasi Akuntabilitas Internal yang ditetapkan Pemerintah Aceh belum sepenuhnya selaras dengan Peraturan Menpan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti (dimanfaatkan) untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan unit kerja.
- Capaian Kinerja, Pencapaian kinerja Pemerintah Aceh masih belum optimal, ada beberapa tingkat capaian indikator kinerja yang tidak dapat dibandingkan dengan tingkat capaian tahun sebelumnya, belum optimalnya capaian kinerja beberapa sektor dibandingkan dengan capaian kinerja Pemerintah Provinsi lainnya dan belum optimalnya capaian kinerja penilaian *stakeholder*.

Upaya Pemerintah Aceh untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja antara lain akan melakukan Penguatan Komitmen Pimpinan, melakukan kerjasama dan dengan *stakeholder* terkait untuk mensinergikan antara Sistem Perencanaan Pembangunan, Sistem AKIP dan Sistem Akuntansi Pemerintah melalui penyelarasan perencanaan kinerja.

Sedangkan 8 (delapan) indikator kinerja yang tingkat capaiannya mencapai target atau melebihi target, yaitu :

h. Indikator kinerja Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan ditargetkan sebesar 75% mampu direalisasikan sebesar 75% dengan tingkat capaian sebesar 100%. Salah satu langkah ditempuh yaitu diikutsertakannya

pejabat struktural pada diklat perjenjangan baik di dalam daerah maupun keluar daerah.

i. Indikator Kinerja Persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis/ fungsional sesuai bidang tupoksi, ditargetkan sebesar 60% dan mampu direalisasikan sebesar 60% dengan tingkat capaian 100%, kegiatan yang dilakukan antara lain dengan mengikutsertakan aparatur dilingkungan Pemerintah Aceh pada diklat teknis/ fungsional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

j. Indikator Kinerja Jumlah kasus gugatan terhadap Pemerintah Aceh yang diselesaikan yang ditargetkan 5 kasus terealisasi 5 kasus dengan persentase tingkat capaian 100%. Penyelesaian kasus gugatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh sudah memiliki hukum tetap (*inkracht van gewijsde)*.

k. Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik.

- Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin ditargetkan 86,66 (sangat Baik) dapat direalisasi sebesar 86,66 (sangat Baik) dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%.
- Rumah Sakit Ibu dan Anak ditargetkan 75,54 (sangat baik) dapat direalisai sebesar 75, 54 (sangat baik) dengan tingkat capaian sebesar 100%.
- Rumah Sakit Jiwa ditargetkan 76 (baik) terealisasi sebesar 76 (baik) dengan tingkat capaian sebesar 100%.
- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ditargetkan 83,73 (baik) terealisasi sebesar 78,92 % dengan tingkat capaian sebesar 100%.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh ditargetkan 75 (baik) terealisasi sebesar 71,28 (baik) dengan persentase tingkat capaian sebesar 94,26%.

- UPTD Wilayah I DPKA ditargetkan sebesar 75 (baik) terealisasi sebesar 75,11 (baik) dengan persentase tingkat capaian sebesar 95,17%.

Tugas pokok Pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang diberikan hanya dapat dinilai oleh masyarakat pengguna jasa layanan. Untuk menjawab permasalahan terhadap pelayanan yang diberikan tersebut, salah satu parameter yang digunakan adalah pengukuran terhadap indeks kepuasan masyarakat. Demikian juga halnya terhadap Pemerintah Aceh, untuk tahun 2013 telah dilakukan survei pada beberapa unit pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Unit pelayanan tersebut diantaranya adalah RSUD ZA, RSIA, RSJ, BP2T, Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, UPTD Wil I DPKA. Nilai survey IKM yang dilaksanakan pada unit tersebut sudah mendapat kategori ”baik” yang memiliki nilai rata-rata sebesar 77,27%. Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat bahwa nilai yang diperoleh atas survey IKM dilingkungan Pemerintah Aceh sudah mulai baik.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Tahun 2013 dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja Tahun 2012 terhadap beberapa indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Tingkat Capaian Tahun 2012
dengan Tahun 2013 terhadap Indikator Kinerja
sasaran strategis ketiga

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013	
		Capaian	Target	Capaian
1.	Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur dalam peningkatan Disiplin	98 %	100 %	98 %
2.	Persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai bidang tupoksi	15 %	60 %	60 %
3.	Jumlah Kasus gugatan terhadap Pemerintah Aceh yang diselesaikan	5 Kasus	5 Kasus	5 kasus
4.	Jumlah Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Hasil pemeriksaan	170 LHP	168 LHP	168 LHP

Berdasarkan tabel di atas, dari 4 (empat) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator yang mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu Persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai bidang tupoksi pada tahun 2013 meningkat sebesar 300% dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen Pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang amanah melalui peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.

Sedangkan tingkat kehadiran aparatur dalam peningkatan disiplin dan jumlah kasus gugatan terhadap Pemerintah Aceh yang diselesaikan masih dapat dipertahankan realisasinya dari tahun sebelumnya.

	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
4.	*Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan (Lama Waktu Perizinan dari 7 Hari menjadi 3 Hari dan tersedianya Akses Informasi Dokumen Publik (RPJPA, RTRWA, RPJMA, RKPA, Statistik Daerah, APBA, LKPJ, LPPD) Pada Website Pemerintah.*

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 11 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis keempat

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
4.1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100,00	%	100,00	100,00
4.2	Jumlah KK yang terdata dalam SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	1.460.000	KK	1.460.000	100,00
4.3	Persentase Jumlah Penduduk yang telah melakukan perekaman e_KTP	80,00	%	91,03	113,79
4.4	Jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan	6.296	Dok	4.171	66,25
4.5	Persentase pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui ULP / LPSE Provinsi Aceh	100,00	%	100,00	100,00
4.6	Persentase Dokumen pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang terintegrasi pada website Pemerintah	85,00	%	85,00	100,00
4.7	Jumlah Unit Layanan Publik yang telah menerapkan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)	6	Unit	6	100,00
4.8	Persentase organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran				
	a. Pemerintah Aceh	87,00	%	88,00	101,15
	b. Kab/Kota	75,00	%	80,00	106,67
4.9	Jumlah Unit Kerja yang menyusun SOP	5	Unit	5	100,00
4.10	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang menyusun standar Pelayanan	2	Unit	3	150,00
4.11	Jumlah penduduk yang terdata dalam data base kependudukan berbasis sosial	1.460.000	KK	1.460.000	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**103,15**

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis *"Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan (Lama Waktu Perizinan dari 7 Hari menjadi 3 Hari dan tersedianya Akses Informasi Dokumen Publik (RPJPA, RTRWA, RPJMA, RKPA, Statistik Daerah, APBA, LKPJ, LPPD) Pada Website Pemerintah"* diperoleh

rata-rata persentase capaian sebesar **103,15%** dengan kategori ***Sangat Baik***.

Optimalnya capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh 10 indikator kinerja yang tingkat capaiannya mencapai target atau ada yang melebihi target, kecuali hanya 1 (satu) indikator kinerja yang tingkat capaiannya belum mencapai target yaitu :

a. *indikator Jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan*, ditargetkan sebanyak 6.296 Izin/Non Izin, hanya dapat terealisasi sebanyak 4.171 Izin/non izin atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 66,25%. Rendahnya tingkat capaian tersebut antar lain disebabkan adanya perubahan kebijakan dalam pemberian surat izin perawat (SIP), surat izin Bidan (SIB), surat izin Perawat Gigi, Surat izin radiografer, surat izin fisioterapi tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah, tetapi menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam PerMenKes Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.04/I/V.2/01949.1/2011 tentang keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP).

Sedangkan 10 indikator kinerja tingkat capaiannya mencapai target atau melebihi target, yaitu :

b. Indikator kinerja persentase penyelesaian pengaduan masyarakat, yang ditargetkan sebesar 100% mampu direalisasikan sebesar 100%, dengan persentase tingkat capaian 100%. Peningkatan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan terus menjadi isu nasional yang perlu mendapat penanganan serius dari setiap pemerintah daerah.

Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja tersebut melalui kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang efisien, efektif dan akuntabel bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Salah satu wujud praktik demokrasi dalam pelayanan publik adalah memberi kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan *(complaint)* atau pengaduan terhadap pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemberi layanan.

Untuk menjawab permasalah tersebut, pemerintah Aceh terus berupaya merespon berbagai keluhan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat. Pada tahun 2013, Pemerintah Aceh telah menyelesaikan sebesar 95% pengaduan yang disampaikan melalui penyediaan sistem pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat *(www.sms.acehprov.go.id)*.

c. Indikator kinerja jumlah KK yang terdata dalam SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), dengan target sebanyak 1.460.000 KK mampu direalisasikan sebanyak target yang telah ditetapkan dengan persentase tingkat capaian 100%. Dan Indikator kinerja jumlah Penduduk yang terdata dalam data base kependudukan berbasis sosial, ditargetkan sebanyak 1.460.000 KK dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Pendataan terhadap 1.460.000 KK yang tersebar di Provinsi Aceh sudah dilaksanakan, dan juga menjadi database kependudukan berbasis sosial. Ini merupakan bukti nyata Pemerintah Aceh dalam melaksanakan proses pembangunan secara transparan, terintegrasi dan berbasis teknologi.

d. Indikator kinerja persentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP. Pada tahun 2013, Pemerintah Aceh menargetken sebanyak 80% telah melaksanakan perekaman e-KTP, hingga akhir tahun mampu direalisasikan sebanyak 91,03% penduduk, dengan persentase tingkat capaian sebesar 113%. Tingginya tingkat capaian tersebut disebabkan adanya kebijakan nasional yang mewajibkan penggunaan KTP elektronik sampai dengan tahun 2013 secara gratis. Kebijakan tersebut berlaku pada setiap provinsi di Indonesia.

e. Indikator persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui ULP/LPSE Provinsi Aceh dapat direalisasikan sebesar 100%. Capaian ini merupakan komitmen pemerintah aceh untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan pengadaan barang dan jasa secara terpadu. Pada tahun 2013, jumlah paket pengadaan Pemerintah Aceh mencapai 3246 paket dan proses pelaksanaannya melalui Unit Layanan Pengadaan secara elektronik.

f. Indikator kinerja persentase dokumen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi pada website pemerintah ditargetkan 85% dengan realisasi 85% atau persentase tingkat capaian sebesar 100%.

   Salah satu kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh adalah Reformasi Birokrasi. Sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh adalah pengintergrasian

pelayanan informasi berbasis teknologi. Pada tahun 2013, pelayanan informasi telah dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Aceh melalui pengintegrasian berbagai dokumen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada website Pemerintah Aceh yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik di luar maupun dalam negeri. Dokumen tersebut meliputi RPJPA, RTRWA, RKPA, Statistik Daerah, APBA, LKPJ, LPPD, LAKIP dan beberapa dokumen lainnya.

g. Indikator kinerja jumlah Unit Layanan Publik yang telah menerapkan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK), ditargetkan 6 (enam) unit SKPA dan Badan pelayanan Publik yang menerapkan TIK, dari target tersebut semuanya dapat dicapai/direalisasikan dengan menghasilkan 9 (sembilan) aplikasi yang telah dapat digunakan oleh masyarakat, dari 6 (enam) SKPA dan Badan serta aplikasi yang dikelola yaitu :

1. Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh (Dishubkomintel) mengelola Aplikasi PPID dan SMS *Gate Way*, aplikasi PPID yaitu aplikasi yang melayani publik terhadap kebutuhan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana. Aplikasi SMS *Gate Way* yaitu aplikasi yang menangani pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan aceh.
2. Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) mengelola aplikasi E-Aset dan E-Samsat, aplikasi E-Aset yaitu aplikasi yang menangani pengelolaan aset Aceh dan aplikasi E-samsat yaitu aplikasi yang melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor.

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (Bappeda) mengelola aplikasi *E-Planning* yaitu aplikasi yang menangani tentang perencanaan dan pembangunan daerah Aceh.
4. Biro Administrasi Pembangunan Aceh mengelola aplikasi LPSE Aceh yaitu aplikasi Sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
5. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh mengelola aplikasi LPSDM yaitu aplikasi yang mengelola beasiswa aceh.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh mengelola E-Perizinan yaitu aplikasi yang menangani tentang perizinan-perizinan dengan sederhana, transparansi, tepat waktu dan Amanah.

Tabel 3.7
Link Aplikasi Pemerintah Aceh Berbasis Web

NO	SKPA PENGELOLA	APLIKASI BERBASIS WEB	NAMA LINK
1	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	*ppid.acehprov.go.id*
		SMS Gate Way	*sms.acehprov.go.id*
2	Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh	E-Aset	*e-aset.acehprov.go.id*
		E-Samsat	*e-samsat.acehprov.go.id*
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	E-Pelanning	*e-rencana.acehprov.go.id*
		P2K	*p2k.acehprov.go.id*
4	Biro Administrasi Pembangunan	LPSE	*Lpse.acehprov.go.id*
5	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh	LPSDM	*lpsdm.acehprov.go.id*
6	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh	E-Perizinan	*e-perizinan.acehprov.go.id*

h. Indikator kinerja jumlah unit kerja yang menyusun SOP dengan target sebanyak 5 (lima) unit, mampu direalisasikan seluruhnya dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Optimalnya pencapaian kinerja terhadap indikator ini membuktikan bahwa Pemerintah Aceh mempunyai komitmen

yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menindaklanjuti regulasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sampai dengan saat ini Pemerintah Aceh telah menetapkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Aceh. Adapun unit kerja yang telah menyusun SOP di lingkungan Pemerintah Aceh adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), RSUDZA, RSUIA, RSJ dan Dinas Keuangan Aceh.

i. Indikator kinerja jumlah Unit Pelayanan Publik yang menyusun standar pelayanan, ditargetkan sebanyak 2 Unit dan dapat direalisasikan sebanyak 3 Unit dengan tingkat capaian sebesar 150%. Unit pelayanan publik yang telah menyusun Standar Pelayanan yaitu Rumah Sakit Umun dr. Zainoel Abidin, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Tahun 2013 dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja Tahun 2012 terhadap beberapa indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.8
Perbandingan Tingkat Capaian Tahun 2012
dengan Tahun 2013 terhadap Indikator Kinerja sasaran
strategis keempat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013	
		Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%
2.	Jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan	5.883 Dok	6.296 Dok	4.171 Dok
3.	Persentase organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	86%	87%	88%

Berdasarkan tabel di atas, dari 3 (tiga) indikator kinerja yang dilakukan perbandingan, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya menurun bila dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu jumlah dokumen izin dan non izin yang diterbitkan terjadi penurunan jumlahnya sebesar 1.712 dokumen dari tahun 2012.

Namun demikian, terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya masih dapat dipertahankan dan meningkat dari tahun 2012, diantaranya penyelesaian pengaduan masyarakat yang pada tahun 2013 mampu direalisasikan sebesar 100%, realisasi tersebut juga terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 100%. Persentase organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran juga terjadi peningkatan pada tahun 2013 yaitu sebesar 88%, realisasi tersebut terjadi peningkatan sebesar 2% dari tahun 2012.

	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
5.	*Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Aceh (Meningkatnya Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan, Pengawasan dan Pelaksanaan) dan Meningkatnya Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Dokumen Anggaran*

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.9 di bawah ini :

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis kelima

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
5.1	Persentase keterwakilan masyarakat dalam Musrembang Pembangunan Aceh	100,00	%	100,00	100,00
5.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	74,50	%	38,00	51,01
5.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	35,50	%	44,63	125,72
5.4	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	60,00	%	60,00	100,00
5.5	Persentase peningkatan pembinaan politik daerah	10,00	%	10,00	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**95,35**

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis "*Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Aceh (Meningkatnya Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan, Pengawasan dan Pelaksanaan) dan Meningkatnya Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Dokumen Anggaran*" diperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **95,35%** dan dapat dikategorikan ***Baik.***

Optimalnya capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh 4 (empat) indikator melebihi target, kecuali hanya 1 (satu) indikator kinerja yang tingkat capaiannya belum mencapai target sebagai berikut :

a. Indikator kinerja persentase keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang Pembangunan Aceh yang ditargetkan sebesar 100%, mampu direalisasikan sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%. Tercapainya tingkat capaian ini membuktikan bahwa Pemerintah Aceh dalam melaksanakan pembangunan telah melibatkan peran dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelenggaraan negara yang melibatkan 3 (tiga) pilar utama yang saling mendukung, yaitu peran pemerintah, swasta dan masyarakat.

b. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah yang ditargetkan sebesar 74,50%, mampu direalisasikan sebesar 38% dengan tingkat capaian sebesar 51,01%.
   Representasi perempuan dalam menjalankan roda pemerintahan di Aceh juga menjadi perhatian Pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Tahun 2013 Pemerintah Aceh telah merealisasikan sebesar 38% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Persentase tersebut sudah proporsional dengan jumlah aparatur yang ada dalam lembaga eksekutif.

c. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Aceh terus mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan makin bertambahnya jumlah angkatan kerja perempuan yang mampu direalisasikan sebesar sebesar 44,63% dengan persentase tingkat capaian sebesar 125,72%. Tingginya capaian tersebut diantaranya disebabkan peran ”ganda” perempuan dan komitmen mereka untuk aktif di dalam pasar kerja. Perempuan cenderung keluar dari pasar kerja ketika masa perkawinan, melahirkan dan

mengasuh anak dan kemudian kembali kedunia kerja ketika anak-anak sudah dewasa. Selain itu semakin terbukanya kesempatan pendidikan bagi perempuan di berbagai bidang akan diikuti oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

d. Persentase pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP ditargetkan 60% dan direalisasikan sebesar 60% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. LSM/Ormas adalah wadah untuk menyalurkan aspirasi terhadap keberlanjutan pembangunan daerah yang lebih baik. Langkah yang ditempuh dalam rangka pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP yaitu dengan memfasilitasi pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari bantuan Hibah kepada 17 Organisasi Masyarakat dan yang bersumber dari bantuan sosial diberikan bantuan kepada 19 Organisasi Masyarakat.

e. Persentase pembinaan politik daerah, yang terealisasi 100%, kegiatan dalam mencapai target pada tahun 2013 ini berupa Fasilitas pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRA tahun 2013, dengan jumlah suara 1.784.496 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik, selain itu, meningkatnya pendirian Ormas/LSM sebagai wadah menyalurkan aspirasi terhadap keberlanjutan pembangunan daerah yang lebih baik yang merupakan keberhasilan dari program pembinaan politik daerah berupa sosialisasi, bimtek dan talkshow.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Tahun 2013 dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja Tahun 2012 terhadap beberapa indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Tingkat Capaian Tahun 2012
dengan Tahun 2013 terhadap Indikator Kinerja
sasaran strategis kelima

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013	
		Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	25,8 %	74,5 %	38,00 %
2.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	33,4 %	35,5 %	44,63 %
3.	Persentase Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	40 %	60 %	60,00 %
4.	Persentase Peningkatan Pembinaan Politik Daerah	70 %	10 %	10,00 %

Berdasarkan perbandingan dari 4 (empat) indikator sebagaimana tersebut dalam tabel 3.10 adanya peningkatan realisasi setiap indikator dari tahun 2012 dengan tahun 2013 sebagai berikut :

1. Indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah pada tahun 2013 sebesar 38,00%, terjadi peningkatan sebesar 12,20% dari tahun 2012 yaitu sebesar 25,80%.
2. Indikator Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan juga mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 44,63% dari tahun 2012 sebesar 33,4%.
3. Indikator Persentase Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP mengalami peningkatan sebesar 20% pada tahun 2013 yaitu sebesar 60% dari tahun 2012 sebesar 40%.
4. Indikator Persentase Peningkatan Pembinaan Politik Daerah mengalami peningkatan menjadi 80% atau terjadi peningkatan sebesar 10% dari capaian tahun 2012 yaitu sebesar 70%.

6.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Keberlanjutan Perdamaian

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 10 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.11 di bawah ini :

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keenam

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
6.1	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	30,00	%	30,00	100,00
6.2	Jumlah konflik masyarakat yang tertangani	30,00	kasus	25,00	83,33
6.3	Menurunkan jumlah pelanggaran qanun dan gangguan trantibum	30,00	%	38,52	128,40
6.4	Angka kriminalitas yang tertangani	20,00	%	20,00	100,00
6.5	Persentase penurunan tingkat kerawanan, kriminalitas dan gangguan ketertiban/ketentraman di masyarakat	50,00	%	62,00	124,00
6.6	Rasio pos siskamling per jumlah desa/ penduduk (PP No.6/2008)	6.461	Pos	7.784	120,48
6.7	Persentase penyelesaian kasus kewaspadaan dini masyarakat	60,00	%	55,00	91,67
6.8	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk (PP No. 6/2008)	459	Personil	229	49,78
6.9	Persentase penduduk yang memahami pencapaian perdamaian	60,00	%	60,00	100,00
6.10	Jumlah Rumah Sehat Sederhana bagi masyarakat PMKS, Mantan Kombatan, Tapol/Napol, Masyarakat Imbas konflik dan masyarakat korban bencana yang terbangun	4.918	Unit	5.006	101,79
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**99,94**

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis *"Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Keberlanjutan*

Perdamaian" dapat diperoleh capaian sebesar **99,94%** atau tergolong ***Baik***.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh 7 (tujuh) indikator mencapai/melebihi target, kecuali hanya 3 (tiga) indikator kinerja yang tingkat capaiannya belum mencapai target. Analisis setiap capaian indikator kinerja sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Jumlah konflik Masyarakat yang tertangani, dari 30 kasus yang ditargetkan yang mampu ditangani sebanyak 25 kasus dengan tingkat capaian sebesar 83,33%. Adapun konflik-konflik yang dimaksud adalah :
   - Kasus eks karyawan Perusahaan PDKS yang menuntut hak-hak karyawan yang belum diselesaikan oleh perusahaan di Kabupaten Simeulue.
   - Kasus Demo menuntut penundaan pelantikan anggota DPRK Penggganti Antar Waktu di Kabupaten Aceh Singkil.
   - Kasus Unjuk Rasa di Kantor KIP terkait Pilkada di Kabupaten Aceh Selatan.
   - Kasus fatwa MPU tentang Aliran sesat Tgk ahmad Barmawi di Kabupaten Aceh Selatan.
   - Demo menuntut pengembalian lahan warga yang masuk HGU PT. Padang Palma Permai (PPP) Kabupaten Aceh Timur.
   - Kasus konflik antara warga dengan PLTA Peusangan di Kabupaten Aceh Tengah.
   - Demo Warga menolak Qanun Wali Nanggroe di Kabupaten Aceh Tengah.
   - Unjuk rasa warga terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap masalah lahan warga.

- Kasus penghadangan truk batubara milik rekanan PLTU Nagan Raya dan milik PT. Mifa oleh masayarakat di Kabupaten Aceh Barat.
- Kasus pendudukan lahan PT. Prima Aceh Argo Lestari (PAAL) di Kabupaten Aceh Barat.
- Kasus Fraksi PKS-PPP yang menolak Rancangan Qanun RTRW Aceh Besar menjadi Qanun.
- Warga tolak pembangunan Waduk Rio di Kabupaten Pidie.
- Kasus Pendangkalan Aqidah di Kabupaten Bireuen.
- Kasus Anggota DPRK Kota Lhokseumawe yang mempermasalahkan perpindahan tempat rapat di Kota Lhokseumawe.
- Demo warga terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Kasus Warga yang memprotes Mapolres yang menangkap warga di Kabupaten Gayo Lues.
- Kasus konflik eks pekarya (tenaga kontrak) dengan PT. Pertamina EP Rantau di Kabupaten Aceh Tamiang.
- Kasus masyarakat yang menolak kehadiran perusahaan tambang emas PT. Emas Mineral Murni /PT EMM di Kabupaten Nagan Raya.
- Kasus aksi demo warga ke Kantor Camat Darul Makmur di Alue Bilie di Kabupaten Nagan Raya.
- Kasus pendukung Bupati demo tandingan ke DPRK di Kabupaten Bener Meriah.
- Kasus Massa yang memprotes proses peemungutan dan penghitungan suara Pilkada.
- Kasus Unjuk rasa Guru SMP di Kabupaten Pidie Jaya.
- Demo massa dan kericuhan di kantor Gubernur Aceh.

- Demo Mahasiswa Akademi Keperawatan (AKPER) Cut Nyak Dhien ke DPRA.
- Demo mahasiswa terhadap rektorat Universitas Malikulsaleh di Kota Lhokseumawe.

b. Indikator kinerja *persentase penyelesaian konflik pertanahan*, ditargetkan sebesar 30% dan mampu direalisasikan sesuai dengan target yaitu sebesar 30% atau dengan tingkat capaian sebesar 100%. Melalui program Penataan, Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.920.200.000,-, yang dilakukan melalui pembentukan tim Kajian Keberatan atas lokasi Rencana Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang melibatkan unsur-unsur terkait yang bertugas melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dan melakukan inventarisasi pengadaan tanah.

Pada tahun 2013 konflik pertanahan di Aceh yang terjadi sebanyak 43 kasus yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu:

1. Sengketa/ konflik pertanahan yang telah diselesaikan melalui tim fasilitasi penyelesaian sengketa/ konflik pertanahan Aceh sebanyak 5 (lima) kasus yaitu:
   - Sengketa lahan HGU PT. Sumber Utama Makmur(SUM) di Kabupaten Aceh Singkil;
   - Permasalahan ganti rugi tanah untuk pembangunan markas/komplek/kompi E-113/Jaya di Kabupaten Pidie;
   - Sengketa lahan HGU PT. Karya Tanah Subur(KTS) di Kabupaten Aceh Barat;
   - Kasus hak pakai Nomor 1 Tahun 1982 aset Pemerintah Aceh di Kabupaten aceh Tengah;

- Sengketa lahan HGU PT. Ubertraco/ Nafasindo di Kabupaten Aceh Singkil.

2. Sengketa/ konflik pertanahan yang masih dalam proses mediasi penyelesaian yang difasilitasi oleh tim fasilitasi penyelesaian sengketa/ konflik pertanahan aceh sebanyak 13 kasus yaitu:
   - Sengketa lahan HGU PT. Bumi Flora di Kabupaten Aceh Timur;
   - Sengketa lahan HGU PT. Rundeng Putra Persada di Kabupaten Aceh Singkil;
   - Sengketa lahan HGU PT. Mitra Sejati Sejahtera Bersama di Kota Subulussalam;
   - Sengketa lahan Suak Indrapuri di Kabupaten Aceh Barat;
   - Sengketa lahan Kompi Brimobda Aceh di Kabupaten Aceh Selatan;
   - Sengketa tanah Blang Padang Kota Banda Aceh antara Pemerintah Aceh dengan Kodam Iskandar Muda;
   - Sengketa lahan HGU PT. Rundeng Nusantara di Kota Subulussalam;
   - Sengketa tanah HGU PT. Dua Perkasa Lestari di Kabupaten Aceh Barat Daya;
   - Sengketa HGU PT. MPLI di Kabupaten Aceh Tamiang;
   - Sengketa lahan izin lokasi PT. Anugerah Sekumur di Kabupaten Aceh Tamiang;
   - Sengketa HGU PT. Sinarkaloi Perkasa Indo di Kabupaten Aceh Tamiang;
   - Kasus status tanah asrama mahasiswa Aceh di Jogjakarta;

- Kasus Resettlement Blang Lancang Rancong di Kota Lhokseumawe.

3. Sengketa/ konflik dalam proses penyelesaian pada instansi terkait (Dinas Kehutanan Aceh, Dinas Perkebunan Aceh, Biro Perekonomian Setda Aceh dan Kanwil BPN Aceh) sebanyak 15 kasus yaitu :
   - Sengketa lahan HGU PT. Jaya Bani Utama;
   - Sengketa tanah Desa Lambaro Skep di Kota Banda Aceh;
   - Sengketa tanah di Kelurahan Peuniti Kota Banda Aceh;
   - Sengketa lahan HGU PT. Parasawita di Kabupaten Aceh Tamiang;
   - Sengketa lahan HGU PT. Surya Panen Subur di Kabupaten Nagan Raya;
   - Sengketa lahan HGU PT. Fajar Baizuri di Kabupaten Nagan Raya;
   - Sengketa lahan HGU PT. Patria Kamoe di Kabupaten Aceh Timur;
   - Sengketa lahan HGU PT. Blangkara Company di Kabupaten Aceh Utara;
   - Sengketa lahan HGU PT. Gotong Royong di Kabupaten Pidie Jaya;
   - Sengketa lahan HGU PT. Batu Gede di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Abdya;
   - Sengketa lahan HGU antara PT. Delima Makmur dengan PT. Dalanta Anugerah Persada;
   - Sengketa lahan HGU PT. Putri Hijau di Kabupaten Aceh Timur;
   - Sengketa lahan HGU antara PT. Surya Panen Subur 2 dengan PT. Gelora Sawita Makmur;

- Sengketa lahan HGU PT. Sari Inti Rakyat di Kabupaten Aceh Barat;
- Sengketa tanah di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh besar.

c. Indikator Kinerja menurunkan jumlah pelanggaran qanun dan gangguan trantibum ditargetkan sebesar 30% dan mampu direalisasikan sebesar 38%. Optimalnya realisasi tersebut disebabkan pada tahun 2012 sebanyak 4.317 Kasus, tahun 2013 sebanyak 2.654 kasus. Dalam rangka meningkatkan pengawasan pelaksanaan perda/qanun, pergub, kepgub dan ingub tentang trantibum, telah dilakukan berbagai upaya antara lain, pelaksanaan patroli wilayah perbatasan, melakukan razia PNS, razia siswa, melakukan pengamanan terhadap unjuk rasa, pengamanan terhadap pejabat, penertiban perda/qanun, pergub, kepgub dan ingub, pengamanan pelaksanaan hari-hari besar agama, dan pengamanan hari-hari besar nasional.

d. Indikator Kinerja angka kriminalitas yang tertangani target 20% dan direalisasikan 20% dengan persentase tingkat capaian 100%. Untuk melihat angka kriminalitas yang terjadi di Provinsi Aceh dapat di lihat pada tabel 3.12 di berikut ini :

Tabel 3.12
Angka Kriminalitas di Aceh

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Insiden	Tewas	Cedera	Penculikan	Kekerasan Seksual	Bangunan Rusak
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH BARAT	13	1	8	0	3	1
2	ACEH BARAT DAYA	7	2	5	0	0	0
3	ACEH BESAR	16	3	7	0	1	3
4	ACEH JAYA	5	0	3	0	0	3
5	ACEH SELATAN	3	0	2	0	0	1
6	ACEH SINGKIL	2	0	1	0	0	0
7	ACEH TAMIANG	13	3	3	0	5	1
8	ACEH TENGAH	7	0	5	0	0	0
9	ACEH TENGGARA	5	4	1	1	0	0
10	ACEH TIMUR	41	4	16	5	3	0
11	ACEH UTARA	48	4	18	0	25	4
12	BANDA ACEH	17	0	9	1	5	1
13	BENER MERIAH	1	0	1	0	0	0
14	BIREUEN	27	4	16	0	7	1
15	GAYO LUES	5	3	2	0	0	0
16	LANGSA	20	1	14	0	2	0
17	LHOKSEUMAWE	31	2	19	0	4	3
18	NAGAN RAYA	6	1	3	0	0	0
19	PIDIE	19	2	11	0	0	0
20	PIDIE JAYA	9	1	6	0	1	0
21	SIMEULUE	2	0	1	1	1	0
22	SUBULUSSALAM	5	1	2	0	2	0
Grand Total		**302**	**36**	**153**	**8**	**59**	**18**

Sumber : Badan Kesbangpolinmas Aceh 2013

e. Indikator Kinerja Persentase penurunan tingkat kerawanan, kriminalitas, dan gangguan ketertiban/ ketentraman di masyarakat terealisasi 62% dari yang ditargetkan sebesar 50%. Berdasarkan data dari Sistem Nasional Pengendalian Kekerasan (SNPK) Aceh, penurunan tingkat gangguan keamanan dari tahun 2012 sebanyak 835 kasus, menjadi 620 kasus pada tahun 2013.

f. Indikator kinerja Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ penduduk. Jumlah pos siskamling pada tahun 2013 berjumlah 7.784 pos, hal ini melebihi target yang direncanakan sebanyak 6.461 pos dan disebabkan adanya 2 pos dalam satu desa, sehingga melebihi dari yang direncanakan yang 1 pos/desa.

g. Indikator kinerja Persentase penyelesaian kasus kewaspadaan dini masyarakat yang ditargetkan sebesar 60%, hanya mampu terealisasi sebesar 55% dengan persentase tingkat capaian

sebesar 91,67%. Adapun kasus kewaspadaan dini masyarakat Aceh terjadi meliputi:

a. Konflik berlatar belakang Tanah dan Lahan;

b. Konflik berlatar belakang Suku dan Agama;

c. Konflik berlatar belakang tata batas dan politik;

d. Konflik berlatar belakang industrial.

Secara rinci kasus-kasus tersebut diatas sebagaimana tertera pada tabel 3.13 di bawah ini.

Tabel 3.13
REKAPITULASI
KONFLIK DI PROVINSI ACEH TAHUN 2013

NO	kabupaten	JENIS KONFLIK										JUMLAH
		Sengketa Lahan	Industrial	Kebijakan Pemda	Pendangkalan Aqidah	Bentrok Massa	Politik/ Pilkada	Demo /Unras	Aksi anarkis	Dukun Santet	Lain - lain	
1	Kabupaten Simeulue		1									1
2	Kabupaten Aceh Singkil							1				1
3	Kabupaten AcehSelatan				1		1					2
4	Kabupaten AcehTenggara							1	1			2
5	Kabupaten AcehTimur	1	1									2
6	Kabupaten AcehTengah		1	1								2
7	Kabupaten AcehBarat	2	1									3
8	Kabupaten AcehBesar			1								1
9	Kabupaten Pidie			1								1
10	Kabupaten Bireuen			1	1					1		3
11	Kabupaten AcehUtara						1	1				2
12	Kabupaten Aceh Barat Daya			2								2
13	Kabupaten Gayo Lues							1				1
14	Kabupaten Aceh Tamiang		1									1
15	Kabupaten Nagan Raya	1	3									4
16	Kabupaten Aceh Jaya		1									1
17	Kabupaten Bener Meriah							1				1
18	Kabupaten PidieJaya					1	1	1				3
19	Kota BandaAceh							2				2
20	Kota Sabang										1	1
21	Kota Langsa								1			1
22	Kota Lhokseumawe	1						1				2
23	Kota Subulussalam						1					1
JUMLAH TOTAL		5	9	6	2	1	4	9	2	1	1	40

Sumber : Badan Kesbangpol Linmas Aceh, 2013

h. Indikator kinerja Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk (PP No. 6 tahun 2008) yang ditargetkan 495 personel, hanya mampu direalisasikan 229 personel dengan persentase tingkat

capaian sebesar 49,78. Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang jumlah linmas dibagi jumlah 10.000 penduduk dalam mengamankan ketertiban dan ketentraman masyarakat Aceh, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.693.900 jiwa per 10.000 penduduk membutuhkan linmas sebanyak 469 personil linmas. Dibandingkan dengan jumlah personil linmas yang ada sekarang sebanyak 229 personil linmas, Aceh masih kekurangan personil linmas sebanyak 240 personil. Kekurangan personil linmas tersebut belum dikaitkan terhadap kebutuhan linmas dalam pengawasan di setiap TPS untuk pemilu legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2014 memerlukan personil linmas sebanyak 21.696 personil.

untuk memenuhi kebutuhan linmas baik menjaga ketertiban dan ketentraman maupun untuk pengamanan di setiap TPS, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

i. Indikator kinerja Persentase penduduk yang memahami pencapaian perdamaian yang ditargetkan sebesar 60% dapat direalisasikan sebesar 60% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Tingginya tingkat capaian ini merupakan komitmen Pemerintah Aceh dan jajarannya dalam upaya menjaga perdamaian di bumi Aceh yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM. Upaya ini tetap dilakukan bahkan untuk menjaga perdamaian yang abadi Pemerintah Aceh menetapkan sebagai misi pertama dalam RPJMA Tahun 2012-2017, yaitu" *Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11*

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(UUPA) untuk menjaga perdamaian abadi".

j. Indikator kinerja Jumlah rumah sehat sederhana bagi masyarakat PMKS, Mantan Kombatan, Tapol/Napol, Masyarakat Imbas Konflik dan masyarakat korban bencana yang terbangun, yang ditargetkan sebanyak 4.918 unit dapat terealisasi sebanyak 5.006 unit dengan tingkat capaian target 101,79%. Tingginya tingkat capaian ini merupakan upaya Pemerintah Aceh untuk memenuhi rumah layak huni bagi PMKS, mantan kombatan atau masyarakat korban konflik dan korban bencana agar memiliki rumah yang layak huni. Upaya pemenuhan kebutuhan rumah untuk kelompok tersebut terus dilakukan pada tahun 2014 pemerintah Aceh dalam hal memenuhi akan membangun sebanyak 4.848 unit yang tersebar pada 23 Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.296.294.000.000.-. Adapun lokasi serta jumlah pembangunan rumah sehat sederhana tersebut dapat dilihat dari tabel 3.14 di bawah ini :

Tabel 3.14
Rumah Sehat Sederhana

LOKASI PENANGANAN		**LOKASI PENANGANAN**	
Lokasi	Unit	Lokasi	Unit
Kota Sabang	110 Unit RSS	Kabupaten Gayo Lues	60 Unit RSS
Kota Banda Aceh	92 Unit RSS	Kabupaten Aceh Barat	238 Unit RSS
Kabupaten Pidie	395 Unit RSS	Kabupaten Nagan Raya	99 Unit RSS
Kabupaten Pidie Jaya	151 Unit RSS	Kabupaten Aceh Barat Daya	118 Unit RSS
Kabupaten Bireuen	327 Unit RSS	Kabupaten Aceh Selatan	317 Unit RSS
Kabupaten Aceh Utara	377 Unit RSS	Kota Subulussalam	184 Unit RSS
Kota Lhokseumawe	148 Unit RSS	Kabupaten Singkil	200 Unit RSS
Kabupaten Aceh Timur	461 Unit RSS	Kabupaten Simeulue	130 Unit RSS
Kota Langsa	46 Unit RSS	Kabupaten Aceh Jaya	13 Unit RSS
Kabupaten Aceh Tamiang	232 Unit RSS	Kabupaten Aceh Besar	29 Unit RSS
Kabupaten Bener Meriah	204 Unit RSS	Kabupaten Aceh Tenggara	24 Unit RSS
Kabupaten Aceh Tengah	280 Unit RSS	Provinsi	650 Unit RSS

Sumber : Dinas Cipta Karya Aceh 2013

7.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya Penyelenggaraan Kehidupan Masyarakat yang sesuai dengan Nilai-Nilai Budaya Aceh yang sejalan dengan Nilai-Nilai Dinul Islam

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 10 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.15 di bawah ini :

Tabel 3.15
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis ketujuh

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
7.1	Jumlah Gampong dan Mukim yang dijadikan lokasi sosialisasi pelestarian adat istiadat	12	Gampong/ mukim	12	100,00
7.2	Persentase Jumlah Panduan atau Manual Pelaksanaan Hukum Adat yang dihasilkan	7	buku/ majalah	7	100,00
7.3	Jumlah Kelembagaan Adat yang dibentuk kembali dalam Masyarakat	1	Lembaga	1	100,00
7.4	Freukuensi festival dan event budaya Aceh	108	kali	108	100,00
7.5	Jumlah kunjungan wisatawan manca Negara ke Aceh	29.400	Orang	42.522	144,63
7.6	Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Aceh	997.620	Orang	1.075.626	107,82
7.7	Jumlah pengembangan objek pariwisata	20	Objek	20	100,00
7.8	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	53	buah	53	100,00
7.9	Jumlah grup kesenian	50	sanggar	50	100,00
7.10	Jumlah gedung Kesenian	4	buah	4	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**105,25**

Sesuai dengan sasaran strategis *"Meningkatnya Penyelenggaraan Kehidupan Masyarakat yang sesuai dengan Nilai-Nilai Budaya Aceh yang sejalan dengan Nilai-Nilai Dinul Islam"* diperoleh capaian rata-rata sebesar **105,25%** atau tergolong ***Sangat Baik***.

Keberhasilan Sasaran Strategis ini didukung oleh seluruh indikator kinerja yaitu :

a. Jumlah Gampong dan Mukim yang dijadikan lokasi sosialisasi pelestarian adat istiadat, target 12 gampong/mukim dapat direalisasikan 12 gampong/mukim dengan persentase tingkat capaian 100%.

   Pemerintah Aceh dalam upaya melstarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat, antara lain dengan menghidupkan kembali adat istiadat dan budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Dinul Islam baik dalam upacara perkawinan, upacara menyambut kelahiran anak maupun dalam upacara-upacara lainnya dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh, untuk tahun 2013 Pemerintah Aceh memfokuskan pada 12 gampong/mukim sebagai pilot project dalam penerapan adat istiadat dan budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Dinul Islam.

   Upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat dalam masyarakat Aceh yang sesuai dengan nilai-nilai Dinul Islam, Pemerintah Aceh melalui Majelis Adat Aceh(MAA) terus diupayakan dalam rencana pembangunan Aceh dengan Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat, pada tahun 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.709.700.000.- yang difokuskan pada 12 gampong/desa.

b. Jumlah kelembagaan adat yang dibentuk kembali dalam masyarakat yang ditargetkan 1 (satu) lembaga dapat direalisasikan 1 (satu) lembaga dengan persentase tingkat capaian 100%. Dalam rangka mengembalikan nilai-nilai budaya Aceh yang merupakan kearifan lokal yang telah berkembang sejak masa kejayaan kerajaan Aceh Darussalam, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diberi kewenangan khusus

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang salah satu kekhususan nya yaitu penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, dengan demikian keberadaan lembaga-lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat Aceh.

Adapun lembaga adat tersebut adalah Majelis Adat Aceh, Imeum mukim; imeum chik; keuchik; tuha peut; tuha lapan; imeum meunasah; keujruen blang; panglima laot; pawang glee/uteun; petua seuneubok; haria peukan dan syahbanda. Pada tahun 2013, Pemerintah Aceh telah mengupayakan pengembalian fungsi lembaga adat Petua Seuneubok dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Lembaga Adat Peutua Seuneubok atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.

c. Frekuensi festival dan event budaya Aceh, yang ditargetkan pada tahun 2013 sebanyak 108 kali dapat direalisasi sebanyak 108 kali dengan tingkat capaian 100%. Festival dan event budaya Aceh baik yang dilaksanakan di Aceh maupun di Anjungan Aceh, Taman Mini Indonesia Indah dan di luar negeri dalam rangka melestarikan, memperkenalkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya Aceh sebagai salah satu daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke Aceh.

d. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2013 Pemerintah Aceh menargetkan sebanyak 29.400 orang

wisatawan mancanegara, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan domestik ditargetkan sebanyak 997.620 orang dengan realisasi sebanyak 1.075.626 orang.

Untuk menambah jumlah pengunjung/wisatawan, Pemerintah Aceh terus menggalakkan berbagai upaya mewujudkan Aceh sebagai salah satu destinasi wisata melalui pameran promosi pariwisata dalam dan luar negeri, pembangunan kemitraan pariwisata dan promosi potensi objek pariwisata,

e. Jumlah pengembangan objek pariwisata, Pengembangan 20 objek pariwisata antara lain wisata Sabang Fair, wisata waduk brayeung, wisata pasir putih lamreh, wisata ie suum, dan waduk keliling di Kabupaten Aceh Besar, air terjun Lawe dua, pengembangan pariwisata lae kombih kota subulussalam dan beberapa objek lainnya yang dijadikan destinasi wisata Aceh.

Untuk mengetahui realisasi tahun lalu dengan tahun ini, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Aceh melakukan perbandingan antara, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.16 berikut ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2012 dengan Tahun 2013 terhadap Indikator Kinerja Sasaran strategis ketujuh

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	
		Capaian	Target	Capaian
1.	Jumlah Kunjungan wisatawan manca Negara ke Aceh	28.993	29.400	42.522
2.	Jumlah Kunjungan wisatawan domestik ke Aceh	1.026.800	997.620	1.075.626
3.	Jumlah Pengembangan Objek Wisata	31	20	20

Berdasarkan tabel di atas jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke Aceh mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2013 sebanyak 13.529 wisman dari tahun 2012.

Keberhasilan pencapaian ini dilakukan dengan pengembangan daerah destinasi wisata dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Aceh.

Demikian juga dengan jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Aceh yang mengalami peningkatan sebanyak 48.826 wisatawan nusantara. Optimalnya pencapaian ini antara lain adanya pengembangan daerah destinasi wisata dan promosi daerah wisata sehingga meningkatnya minat wisatawan nusantara berkunjung ke Aceh.

8.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Ketaatan Masyarakat serta Aparatur Pemerintah terhadap Pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 10 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.17 di bawah ini :

Tabel 3.17
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedelapan

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
8.1	Jumlah simulasi gampong percontohan bersyariah di Aceh	3	Gampong	3	100,00
8.2	Jumlah masyarakat dan muallaf yang dibina dalam wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil	240	orang	360	150,00
8.3	Jumlah Qari-Qariah yang berpartisipasi pada STQ dan MTQ Nasional/ Internasional	16	orang	16	100,00
8.4	Kasus Pelanggaran Qanun Syariat yang ditangani :				
	- Khamar	4	Kasus	3	75,00
	- Khalwat	5	Kasus	3	60,00
	- Maisir	65	Kasus	50	76,92

8.5	Jumlah persentase penyaluran infaq	100,00	%	80,00	80,00
8.6	Jumlah Peningkatan Muzakki yang membayar Zakat	200	orang	202	101,00
8.7	Persentase penyaluran Zakat (Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil)	100,00	%	86,22	86,22
8.8	Frekuensi Operasi Penegakan Syariat Islam	54	kali	54	100,00
8.9	Jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang direhab/ dibangun (Mesjid/ Meunasah/ pesantren/ dayah)	600	Unit	714	119,00
8.10	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,374	%	0,301	80,48
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**94,05**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 10 indikator kinerja dari sasaran strategis *"Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Ketaatan Masyarakat Serta Aparatur Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam*" diperoleh rata-rata capaian sebesar **94,05%** atau tergolong ***Baik***. Analisis pencapaian setiap indikator sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Jumlah Simulasi Gampong Percontohan Bersyariah di Aceh. Untuk mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Pada tahun 2013 Pemerintah Aceh telah menargetkan 3 Gampong yang akan dijadikan percontohan terhadap penerapan Syariat Islam. Hingga akhir tahun, mampu direalisasikan seluruhnya dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Optimalnya pencapaian kinerja ini merupakan kesungguhan dan komitmen Pemerintah Aceh untuk mewujudkan Aceh sebagai "Negeri Syariat". Adapun gampong yang dijadikan percontohan bersyariat Islam adalah Gampong Lamnga Kabupaten Aceh Besar, Gampong Arafah Kabupaten Aceh Selatan, dan Gampong Sukarejo Langsa Timur Kota Langsa. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas syariat Islam tersebut diantaranya

pengajian kaum Bapak/Ibu, TPA/TQA, Pelatihan dalail khairat, tilawah dan lain-lain.

b. Jumlah Masyarakat dan Muallaf yang dibina dalam wilayah perbatasan dan daerah terpencil ditargetkan sebanyak 240 orang, terealisasi sebanyak 360 orang yang dilakukan pembinaan dengan persentase tingkat capaian 150%

   Pembinaan terhadap masyarakat dan muallaf dalam wilayah perbatasan dan daerah terpencil merupakan wujud partisipasi pemerintah Aceh dalam menegakkan syariat Islam di Aceh. Pembinaan tersebut dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Pelaksanaan pembinaan tersebut lebih didominasi pada daerah-daerah perbatasan yang dianggap sebagai wilayah pendangkalan aqidah. Untuk menyikapi permasalahan pendangkalan aqidah di wilayah perbatasan, Pemerintah Aceh telah mengambil kebijakan dengan menempatkan da'i-da'i di wilayah tersebut sebanyak 92 orang, yang tersebar di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 24 orang, Kota Subulussalam sebanyak 13 orang, Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 25 orang, dan Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 30 orang.

   Pelaksanaan pembinaan masyarakat perbatasan dan wilayah terpencil serta pembinaan muallaf dalam upaya meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam tetap dilaksanakan, antara lain melalui Program Peningkatan Dakwah dan Syiar dengan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi da'i wilayah perbatasan dan

wilayah terpencil pada tahun 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.673.081.000,-.

c. Jumlah Qari Qariah yang berpartisipasi pada STQ dan MTQ Nasional/Internasional yang ditargetkan sebanyak 16 orang, mampu direalisasikan sebanyak 16 orang dengan persentsae tingkat capaian sebesar 100%. Bahkan pada tahun 2013, dari 16 Qari/Qariah Aceh yang mengikuti STQ tingkat Nasional yang dilaksanakan di Provinsi Bangka Belitung, berhasil memperoleh peringkat III cabang tilawah golongan anak-anak (M.Haikal Khalilullah) dan juara harapan II cabang tilawah golongan dewasa putra (Takdir Feriza).

d. Indikator kinerja Kasus Pelanggaran Qanun Syariat Islam yang ditangani (Khamar, Khalwat, Maisir) yang ditargetkan sebanyak 69 kasus, dapat direalisasikan sebanyak 56 kasus dengan persentase tingkat capaian sebesar 81,16%, yang terdiri dari 3 kasus khamar, 3 kasus khalwat dan 50 kasus maisir. Penanganan kasus pelanggaran Qanun Syariat Islam Pemerintah Aceh tetap komit dan konsisten dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, pada tahun 2014 antara lain melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syari'ah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 735.820.000,-.

e. Persentase Penyaluran Infaq ditargetkan sebesar 100% hanya mampu terealisasi sebesar 80%. Pemerintah Aceh melalui Baitul Mal dan atas pertimbangan Dewan Pertimbangan Syariah penyaluran infaq kepada Mustahiq selain dalam bentuk pemberian modal usaha dan jaminan hidup bagi Mustahiq juga diberikan bantuan berupa rumah dengan program 1000 rumah bagi kaum dhuafa.

f. Indikator Peningkatan Muzzaki yang membayar Zakat, ditargetkan 200 orang, dapat terealisasi sebanyak 202 orang, dengan persentase tingkat capaian sebesar 101%. Meningkatnya capaian ini membuktikan bahwa kesadaran muzakki dalam hal pembayaran zakat sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat Islam semakin baik. Hal ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program Pembinaan Syariat melalui kegiatan Penadataan Muzakki, Mustahiq dan pada tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 316.250.000,-.
g. Persentase penyaluran zakat (fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) yang ditargetkan sebesar 100%, dapat direalisasikan sebesar 86,22%, dengan persentase tingkat capaian sebesar 86,22%. Belum optimalnya realisasi ini antara lain disebabkan Zakat bagi Pemerintah Aceh merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan dalam hal penyalurannya perlu adanya pengaturan lebih lanjut yang sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, yaitu kepada penerima zakat (senif).
h. Frekuensi Operasi Penegakan Syariat Islam yang ditargetkan 54 kali, mampu direalisasikan sebanyak 54 kali, dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Dalam penegakan pelanggaran pelaksanaan Qanun Syari'at, Pemerintah Aceh didukung oleh 1000 personil satpol PP dan Wilayatul Hisbah (Polisi Syari'at) yang setiap saat melakukan penertiban dan pengawasan dalam kehidupan masyarakat Aceh yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Syari'at Islam.
i. Jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang direhab/ dibangun (Mesjid/Meunasah/Pesantren/Dayah) pada tahun

2013 ditarget sebanyak 600 unit, dan direalisasikan sebanyak 714 unit, dengan tingkat capaian sebesar 119%. Sarana dan Prasarana peribadatan yang direhab/ dibangun tersebar di seluruh wilayah Provinsi Aceh guna mendukung pelaksanaan Penerapan Syariat Islam yang kaffah dan untuk memenuhi kebutuhan rumah ibadah yang setiap tahun terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan beribadah.

j. Indikator kinerja *Rasio tempat ibadah per satuan penduduk*, ditargetkan sebesar 0,374% hanya mampu direalisasikan sebesar 0,301% dengan tingkat capaian sebesar 80,84% atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 0,001%. Dalam upaya untuk memenuhi rasio tempat ibadah per satuan penduduk sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RPJMA tahun 2012-2017 yang pada tahun 2017 sebesar 0,383%, Program pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah terus ditingkatkan. Pada tahun 2014 dengan program pengembangan Infrastruktur Perdesaan dengan alokasi anggaran Rp.162.821.300.000.- dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah ibadah.

Untuk mengetahui realisasi tahun lalu dengan tahun ini, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Aceh melakukan perbandingan antara, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.18 berikut ini :

Tabel 3.18
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2012
dengan Tahun 2013 terhadap
Indikator Kinerja sasaran strategis delapan

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	
		Capaian	Target	Capaian
1	Jumlah Gampong Percontohan bersyariat di Aceh	2 Gampong	3 Gampong	3 Gampong
2	Jumlah Qari –Qariah yang berpartisipasi pada STQ dan MTQ Nasional/Internasional	98 orang	16 Orang	16 Orang
3	Kasus pelanggaran Qanun Syariat yang ditangani	98 Kasus	69 kasus	56 kasus
4	Rasio tempat ibadah per penduduk	0,372 %	0,374 %	0,301 %

9.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya Peran Ulama Terhadap Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Pengefektifan Penerapan Nilai-nilai Dinul Islam dan Mengangkat Kembali Budaya-Budaya Aceh Yang Islami

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.19 di bawah ini :

Tabel 3.19
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesembilan

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
9.1	Jumlah Da'i yang ditempatkan pada daerah perbatasan dan terpencil	150	orang	150	100,00
9.2	Jumlah sertifikasi produk halal yang diterbitkan	30	Sertifikat	23	76,67
9.3	Jumlah Fatwa, Himbauan, Seruan danTaushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan Syariat Islam	10	Dokumen	8	80,00
9.4	Jumlah Kader Ulama yang terlatih	80	Orang	120	150,00
9.5	Frekuensi Dakwah Interaktif	23	kali	23	100,00
9.6	Jumlah Penerimaan Infaq/sadaqah	18.000.000.000	Rupiah	26.006.282.854	144,48
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**108,52**

Berdasarkan hasil pengukuran dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis *"Meningkatnya Peran Ulama Terhadap Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk*

Pengefektifan Penerapan Nilai-nilai Dinul Islam dan Mengangkat Kembali Budaya-Budaya Aceh Yang Islami" rata-rata persentase capaian sebesar **108,52%** atau dapat dikategorikan ***Sangat Baik.*** Analisis pencapaian setiap indikator kinerja sebagai berikut :

a. Jumlah Dai yang ditempatkan pada daerah perbatasan dan terpencil, target 150 orang, realisasi 150 orang.

   Dengan kekhususan Aceh, khususnya dalam penerapan Dinul Islam harus diimplimentasikan dalam berbagai kebijakan-kebijakan daerah, tidak terlepas dari peran ulama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pembangunan sosial dan kemasyarakatan. Dalam mendukung penerapan dinul islam dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh, Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas penerapan dinul Islam seperti pembinaan terhadap da'i-da'i perbatasan, pengkaderan terhadap calon-calon ulama baik melalui pendidikan di dalam maupun di luar negeri, sehingga mereka mampu memberikan informasi-informasi terhadap penerapan dinul Islam secara kaffah melalui berbagai media baik media cetak, maupun media elektronik dan dialog interaktif.

b. Jumlah sertifikasi produk halal yang diterbitkan, pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 30 dokumen dan hanya mampu direalisasikan sebanyak 23 dokumen atau dengan persentase tingkat capaian 76,67%. Pelaksanaan sertifikasi produk-produk halal di provinsi Aceh tahun 2013 belum optimal disebabkan Sumber Daya Manusia yang mengelola laboratorium pengujian serta kelayakan produk belum tersedia sehingga perlu kerjasama dengan LPPOM dan Perguruan Tinggi. Kedepan diharapkan SDM pengelola laboratorium MPU mampu beroperasional sendiri.

Efektifitas penerapan dinul Islam juga dapat dinilai dari peran ulama dalam mengawasi terhadap produk-produk yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Struktur masyarakat Aceh yang didominasi muslim, seiring dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat Aceh yang didominasi muslim, Pemerintah dituntut untuk terus mengawasi berbagai produk konsumsi masyarakat yang memiliki "label" layak konsumsi atau bersertifikasi halal. Tuntutan ini terus digalakkan oleh masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara menyeluruh. Untuk menjawab tuntutan tersebut, pada tahun 2013 Pemerintah Aceh telah mengeluarkan sebanyak 23 sertifikat halal kepada berbagai produk konsumsi masyarakat yang beredar di Aceh.

Perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi kriteria sertifikasi halal antara lain :

Tabel 3.20
Nama-Nama Perusahaan Yang Telah
Memperoleh Sertifikat Halal Tahun 2013

No	Jenis Produk	Nama Produk	No Sertifikat Halal	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1	2	3	4	5	6
1	Bubuk Kopi	Bubuk Kopi UD Koprosa	14120000010412	UD. Koprosa Samalanga	Jl.Mesjid Yaman No.5 Beureunuen Kec.Mutiara Kab.Pidie
2	Roti	Roti Manis dan Tawar	14100000020412	UD. AlFayedh Bakery & Cake	Tanjong Harapan Gp.Kramat Luar Kec.Kota Sigli Kab.Pidie
3	Catering	Catering SMK 3	14160000030912	Koperasi SMK 3 Banda Aceh	Jl.Malikul Saleh Lhong Raya Kota B. Aceh
4	Air Minum Dalam Kemasan	Lawe – Q	14120000041012	UD. Agus Parja	Gp. Lawe Tungkal Kec. Tanoh alas Kab. Aceh Tenggara
5	Air Minum Dalam Kemasan	Lawe - Sikap	14120000051012	UD. Sri Muntari	Gp. Batumbulan Asli Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara
6	Abon Ikan dan Ikan Kayu	Abon Ikan dan Ikan Kayu Thunnus Saputra	14020000061112	UD. Abon Ikan Thunnus Saputra	Jl. TWK Raja Keumala Gp. Merduati Kota Banda Aceh
7	Bubuk Kopi	Bubuk Kopi Ulee Kareng	14160000100113	UD. Ulee Kareng	Jl. Lamgapang No. 6 Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar.
8	Es Kristal	Es Kristal	14140000130113	CV. Muda Perkasa	Jl. Sultan Malikul Saleh No. 07 Gp. Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh

9	Bubuk Kopi	Bubuk Kopi Tgk. Aceh	1416000090113	UD. Kopi Tgk. Aceh	Jl. Tgk. Meunara III Lrg. Bougenvil Gp. Geuceu Meunara Kec. Jaya Baro Kota Banda Aceh
10	Kopi Luak	Kopi Luak Rumoh Aceh	14160000140413	Warung Kopi Rumoh Aceh	Jl. Rawa sakti V no. 122 Gp. Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
11	Air Minum Dalam Kemasan	WaterHEX	14160000150813	CV. Lampoih Raya	Gp. Dua Paya Kec. Peukan Baro Kab. Pidie
12	Air Minum Dalam Kemasan	Bening-Q	14160000160713	CV. Cahaya Tawi	Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, No. 9 Sigli
13	Air Minum Dalam Kemasan	CUB 88	14160000170813	CV. Tirta Makmur	Jl. Banda Aceh Medan, Km. 103 Gp. Leubue Kec. Pidie Kab. Pidie
14	Kue Adee	Kue Adee Kak Nah	14160000180813	Adee Meureudu Kak Nah	Jl. Babussalam Gampong Meuraksa Meureudu
15	Dendeng Sapi	Dendeng Sapi Aceh	14010000030310	Blang Rakal	Jl. Tgk. Chik Pante Kulu No. 218 - 219 Merduati Banda Aceh
16	Bakso Sapi	Bakso Sapi Aceh	14010000010710	Blang Rakal	Jl. Tgk. Chik Pante Kulu No. 218 - 219 Merduati Banda Aceh
17	Emping	Emping Aceh	1412000021009	Blang Rakal	Jl. Tgk. Chik Pante Kulu No. 218 - 219 Merduati Banda Aceh
18	Biji Kopi	Biji Kopi Aceh	14160000011009	Blang Rakal	Jl. Tgk. Chik Pante Kulu No. 218 - 219 Merduati Banda Aceh
19	Biji Kopi	Lakun Kopi Gayo	14160000251113	UD. Abang Lakun Baru	Jl. Pasar Inpres Gp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah
20	Bubuk Kopi	Lakun Kopi Gayo	14160000261113	UD. Abang Lakun Baru	Jl. Pasar Inpres Gp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah
21	Bubuk Kopi	Sekar Gayo Coffee	14160000271213	UD. Sekar Gayo Coffee	Gp. Panji Mulia Kec. Bukit Kab. Bener Meriah
22	Bubuk Kopi	I Need A Coffee	14160000291213	PT. Kopi Haruman Swarnadhipa	Gp. Lampeuneurut Ujong Blang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar
23	Air Minum Dalam Kemasan	Hidayah Gunung Seulawah	14160000301213	Hidayah Gunung Seulawah	Gp. Teuladan Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar

Sumber: MPU Aceh,2013

Pemerintah Aceh sudah melaksanakan dan menghimbau beberapa perusahaan yang akan berakhir masa berlakunya sertifikat halal untuk segera diperbaharui. Kegiatan ini berlangsung secara gradual sebelum berakhir masa berlaku sertifikat halal masing-masing perusahaan.

c. Jumlah Fatwa, himbauan, seruan dan tausiah yang ditetapkan sesuai ketentuan Syariat Islam.

   Dalam hal menjaga keharmonisan, kerukunan hidup beragama, meminimalisir gejolak/konflik masyarakat dan pendangkalan aqidah, dalam tahun 2013 telah dikeluarkan sebanyak 10 dokumen fatwa, himbauan, seruan dan tausiah, berupa :

- Fatwa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ajaran yang dikembangkan oleh Tgk. Ahmad Barmawi Pimpinan Yayasan Almujahadah di desa/gampong Ujong Kareung Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan;
- Fatwa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- Fatwa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Bantuan Peumakmu Gampong dan Mekanisme Operasionalnya;
- Fatwa Nomor 6 Tahun 2013 tentang Stunning, meracuni, menembak hewan dengan senjata api dan kaitannya dengan halal, sehat dan hiegienis;
- Fatwa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kedudukan Hasil Harta wakaf Dalam Persfektif Fiqh Islam;
- Fatwa Nomor 9 Tahun 2013 tentang Zakat Kelapa Sawit, Sarang Burung Walet dan Hasil Tambang;
- Fatwa Nomor 10 Tahun 2013 tentang seni budaya dan hiburan lainnya dalam pandangan syariat Islam;
- Keputusan Nomor 04 Tahun 2013 dihasilkan pada Muzakarah I Tentang Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan-I MPU Aceh;
- Keputusan Nomor 09 Tahun 2013 dihasilkan pada Muzakarah II Tentang Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan-II MPU Aceh;
- Keputusan MPU Aceh Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dalam rangka menyikapi aliran-aliran sesat atau patut diduga sesat;

- Keputusan MPU Aceh Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dalam rangka mengoptimalkan kewenangan dan peran MPU Aceh.

d. Jumlah Kader ulama terlatih,

Kegiatan Pengkaderan Ulama Aceh Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan 100%. Kegiatan ini berorientasi untuk meningkatkan sumber daya dan peran ulama agar mampu menggali, mendalami dan memahami ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist, untuk meningkatkan pemahaman, pendalaman dan pengkajian bagi kader ulama muda.

e. Indikator Frekuensi dakwah interaktif yang ditargetkan sebanyak 23 kali dapat terealisasi 23 kali dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan talkshow, 10 kegiatan talk show interaktif dengan media radio dan 13 kegiatan dengan media televisi dengan durasi masing-masing 60 menit, dengan menghadirkan narasumber dari unsur Pimpinan dan anggota MPU Aceh dalam rangka mensosialisasikan fatwa, himbauan, seruan dan tausiah kepada masyarakat guna meningkatkan wawasan keagamaan dan upaya-upaya membentengi aqidah umat dari pengaruh aliran sesat.

f. Indikator Jumlah penerimaan infaq shadaqah yang ditargetkan sebesar Rp.18.000.000.000.- mampu direalisasikan sebesar Rp.26.006.282.854,- dengan persentase tingkat capaian sebesar 144%. Peningkatan penerimaan infaq/sadaqah tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap penerapan dinul Islam telah semakin baik. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh dalam tahun 2013 seperti penyebarluasan

informasi terkait Dinul Islam pada beberapa wilayah dan tempat-tempat yang strategis.

Untuk mengetahui capaian kinerja dua tahun terakhir dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Aceh melakukan perbandingan antara tingkat realisasi kinerja tahun lalu dengan realisasi tahun 2013 sebagaimana terlihat dalam tabel 3.21 di bawah ini.

Tabel 3.21
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2012 dengan Tahun 2013 terhadap Indikator Kinerja sasaran strategis kesembilan

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	
		Capaian	Target	Capaian
1.	Jumlah Da'i yang ditempatkan pada daerah perbatasan dan terpencil	150 orang	150 orang	150 0rang
2.	Jumlah sertifikasi produk halal yang diterbitkan	6 Produk	30 produk	23 Produk
3.	Jumlah fatwa Ulama, Himbauan, seruan dan Taushiyah yang ditetapkan sesuai ketentuan	8 Dokumen	10 Dokumen	8 Dokumen
4.	Jumlah Penerimaan Infaq dan Sadaqah (IS)	10.530.000.000	18 Milyar	26 Milyar

10.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya Struktur Perekonomian Yang Mantap Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Wilayah Pada Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 17 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.22 di bawah ini :

Tabel 3.22
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesepuluh

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
10.1	Pertumbuhan PDRB	6,6	%	5,36	81,21
10.2	Laju inflasi Aceh	5,00	%	4,18	83,60
10.3	PDRB per kapita	7,54	Juta	8,23	109,15
10.4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,00	%	27,22	97,21
10.5	Kontribusi sub sektor pertanian pangan terhadap PDRB	11,07	%	10,12	91,42
10.6	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	6,31	%	5,77	91,44
10.7	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	4,57	%	4,57	100,00
10.8	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (PSDH/DR)	1,58	%	1,91	120,89
10.9	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	7,9	%	9,56	121,01
10.10	Kontribusi sektor energi terhadap PDRB	0,42	%	0,53	126,19
10.11	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	4,47	%	4,85	108,50
10.12	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	16,05	Milyar	17,66	110,03
10.13	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	5,66	%	8,1	143,11
10.14	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	4.306.824.000.000	Rupiah	4.614.454.285.714	107,14
10.15	Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	2,5	%	10,26	410,40
10.16	Nilai ekspor non migas	95,643	US$	73,201	76,54
10.17	Jumlah negara tujuan ekspor	22	Negara	22	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**122,23**

Berdasarkan hasil pengukuran dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja sasaran strategis *"Meningkatnya Struktur Perekonomian Yang Mantap Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Wilayah Pada Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata"* rata-rata persentase capaian sebesar **122,23%** atau dapat dikategorikan

Sangat Baik. Tingkat pencapaian terhadap sasaran ini dijabarkan dalam beberapa indikator kinerja, antara lain sebagai berikut :

a. Indikator kinerja *Pertumbuhan PDRB* ditargetkan sebesar 6,6% dan mampu direalisasikan sebesar 5,36%.

   Pertumbuhan ekonomi Aceh (y-on-y) triwulan IV 2013 disumbang oleh pertumbuhan positif di enam sektor. Jika dilihat dari pertumbuhan y-on-y, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan tumbuh paling tinggi diantara sektor-sektor lainnya dengan pertumbuhan sebesar 9,59 persen, diikuti oleh sektor jasa-jasa yang tumbuh sebesar 7,50 persen. Sementara keempat sektor lainnya secara *y-on-y* juga masih tumbuh positif namun dengan pertumbuhan kurang dari 6 persen.

   Nilai PDRB Provinsi Aceh atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan migas meningkat dari Rp.26,19 triliun pada triwulan III menjadi Rp.26,93 triliun pada triwulan IV 2013. Nilai pada triwulan IV 2013. Adapun nilai PDRB Provinsi Aceh atas dasar harga konstan (ADHK) atau dengan menghilangkan pengaruh harga, adalah sebesar Rp.9,69 triliun. PDRB ADHK triwulan IV 2013 dengan menghilangkan nilai migas adalah sebesar Rp.8,81 triliun atau lebih tinggi Rp.0,16 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. PDRB tanpa migas juga mengalami peningkatan dari Rp.22,75 triliun menjadi Rp.23,43 triliun.

   Secara tahunan nilai PDRB Provinsi Aceh atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2013 dengan migas meningkat menjadi Rp.103,05 triliun dari tahun 2012 yang sebesar Rp.95,07 triliun. Nilai PDRB tanpa migas juga mengalami peningkatan dari Rp.80,72 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp.89,11 triliun pada tahun 2013. Adapun nilai PDRB ProvinsiAceh atas dasar harga konstan (ADHK) juga mengalami peningkatan dari

Rp.36,49 triliunpada 2012 menjadi Rp.38,01 triliun dengan migas, sedangkan tanpa migas meningkat dari Rp.32,59 triliun menjadi Rp.34,34 triliun.

Grafik. 3.1

Laju Pertumbuhan PDRB Tw IV-2013 terhadap Tw III-2013 (*q-to-q)* dan Tw IV-2013 terhadap Tw III-2012 (*y-on-y)*(persen)

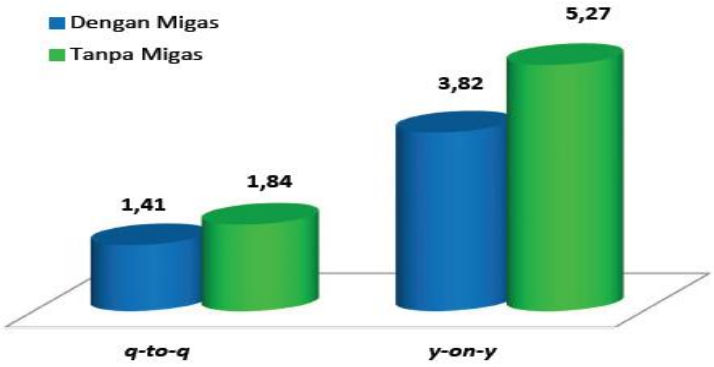

b. Indikator kinerja *Laju Inflasi Aceh* ditargetkan sebesar 5% dan mampu direalisasikan sebesar 4,18% dengan persentase tingkat capaian sebesar 116,40%. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Mulai Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram

timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2012 sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya.

Untuk Provinsi Aceh SBH 2012 dilaksanakan di Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Meulaboh dengan total sampel sebanyak 400 Blok Sensus dan 4.000 rumah tangga.

Secara agregat untuk Provinsi Aceh, pada bulan Januari 2014 mengalami inflasi sebesar 2,23 persen atau terjadi kenaikan IHK dari 108,03 pada bulan Desember 2013 menjadi 110,43 pada bulan Januari 2014.

Grafik. 3.2

Perkembangan Inflasi Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Provinsi Aceh dan Nasional, Januari 2013 – Januari 2014

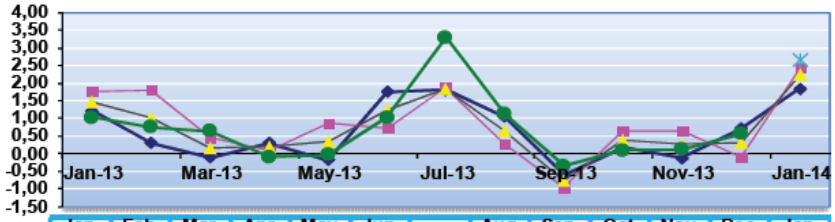

	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14
Banda Aceh	1,22	0,30	-0,12	0,29	-0,19	1,75	1,80	1,04	-0,60	0,17	-0,13	0,71	1,85
Lhokseumawe	1,75	1,78	0,46	0,09	0,88	0,70	1,87	0,26	-0,95	0,64	0,65	-0,12	2,42
Meulaboh													2,67
Provinsi Aceh	1,47	1,02	0,16	0,19	0,34	1,23	1,84	0,66	-0,77	0,40	0,26	0,30	2,23
Nasional	1,03	0,75	0,63	-0,10	-0,03	1,03	3,29	1,12	-0,35	0,09	0,12	0,55	

c. Indikator kinerja *PDRB per Kapita* ditargetkan sebesar 7,54 juta dan mampu direalisasikan sebesar 8,23 juta dengan persentase tingkat capaian sebesar 109,15%.

Dibandingkan dengan PDRB tahun 2012 sebesar 7,29 juta mengalami kenaikan sebesar 0,94 juta atau sebesar 11,42%.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan lebih baik walaupun kontribusi yang besar masih didukung oleh sektor pertanian dan sektor migas.

d. Indikator kinerja *Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB* ditargetkan sebesar 28% dan mampu direalisasikan sebesar 27,22% dengan persentase tingkat capaian sebesar 97,2%. Tingkat pencapaian indikator kinerja ini terdiri dari kontribusi sub sektor pertanian pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan, secara lebih rinci dapat dilihat seperti grafik di bawah ini :

Grafik. 3.3

pertumbuhan PDRB Pertanian tahun 2011-2013

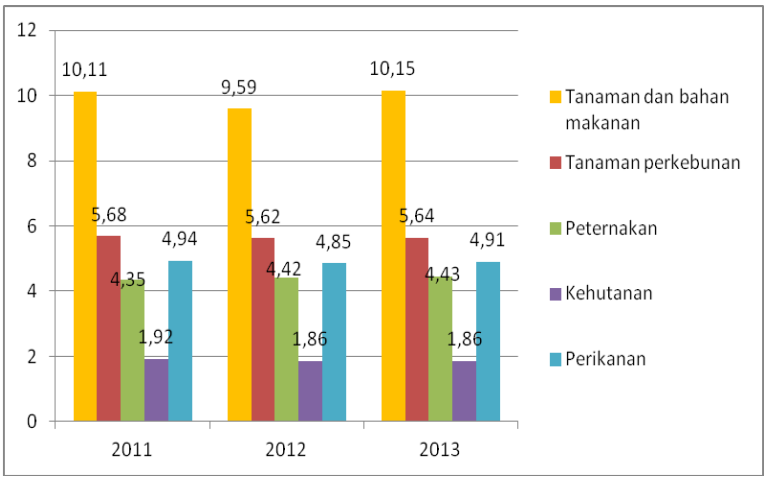

Sektor pertanian mengalami pertumbuhan tertinggi dalam perekonomian Aceh, namun pertumbuhan subsektor perikanan yang tumbuh 0,62% dalam setahun terakhir belum dapat mengimbangi pertumbuhan sektor tanaman bahan makanan (2,92%). Hal ini disebabkan kegiatan pada subsektor perikanan masih dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai, belum optimalnya pemanfaatan SDA, keadaan cuaca dan iklim sehingga aktifitas usaha tidak dapat berlangsung sepanjang waktu. Sedangkan terhadap indikator kinerja,

Kontribusi sektor pertambangan, sektor energi, sektor perdagangan, sektor industri dan sektor pariwisata terhadap PDRB memperoleh nilai rata-rata capaian sebesar 116,48% dari perhitungan 6 (enam) indikator kinerja, untuk secara secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Sektor	ADHB Migas				ADHB Tanpa Migas			
	2011	2012	2013		2011	2012	2013	
			Tw IV	Tw I-IV			Tw IV	Tw I-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pertanian	27.45	27.46	26.90	27.22	32.71	32.34	30.93	31.48
2. Pertambangan dan Penggalian	11.21	10.46	9.33	9.56	1.36	1.37	1.37	1.39
3. Industri Pengolahan	8.99	8.79	7.65	8.10	3.57	3.52	3.19	3.39
4. Listrik dan Air Bersih	0.48	0.51	0.53	0.53	0.57	0.60	0.61	0.61
5. Bangunan	10.92	11.31	12.16	11.67	13.01	13.32	13.97	13.49
6. Perdagangan, Hotel danRestoran	16.50	17.02	17.66	17.66	19.66	20.04	20.30	20.43
7. Pengangkutan dan Komunikasi	10.52	10.65	10.85	10.84	12.53	12.55	12.47	12.53
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2.68	2.89	3.19	3.06	3.20	3.40	3.67	3.54
9. Jasa-jasa	11.25	10.91	11.74	11.36	13.40	12.85	13.49	13.14
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Struktur PDRB Aceh dengan migas menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang mendasar pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran masih merupakan *leading sector* bagi perekonomian Provinsi Aceh tahun 2013 dengan peranan masing-masing sebesar 27,22 persen dan 17,66 persen. Sementara itu ada empat sektor yang peranannya juga cukup besar, yaitu sektor bangunan, sektor jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor pertambangan dan penggalian dengan peranan berkisar antara 9-12 persen. Sektor industri pengolahan memiliki peranan sebesar 8,10 persen, sedangkan dua sektor lainnya, yaitu sektor keuangan, sewa bangunan, dan jasa perusahaan serta sektor listrik, gas, dan air minum memiliki

peranan kurang dari 4 persen, masing-masing sebesar 3,06 persen dan 0,53 persen.

Struktur PDRB tanpa migas juga menunjukkan bahwa dua sektor dengan dominasi terbesar tetap berada pada sektor pertanian sebesar 31,48 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,43 persen. Tiga sektor lain yang peranannya juga cukup besar adalah sektor bangunan, sektor jasa-jasa, dan sektor pengangkutan dan komunikasi, dengan peranan antara 12-14 persen. Sedangkan empat sektor lainnya masing-masing masih memberikan peranan di bawah 4 persen. Untuk melihat secara grafik terhadap struktur PDRB ADHB dengan migas dan tanpa migas menurut sektor dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik. 3.4

Struktur PDRB ADHB dengan Migas menurut Sektor, 2013 (persen)

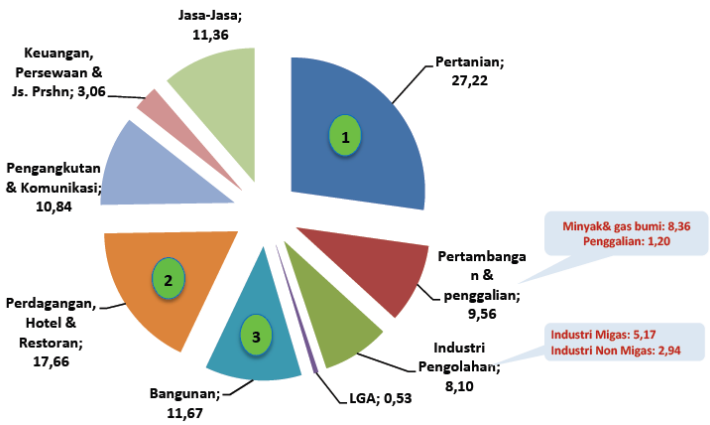

Grafik. 3.5

Struktur PDRB ADHB Tanpa Migas menurut Sektor, 2013

(persen)

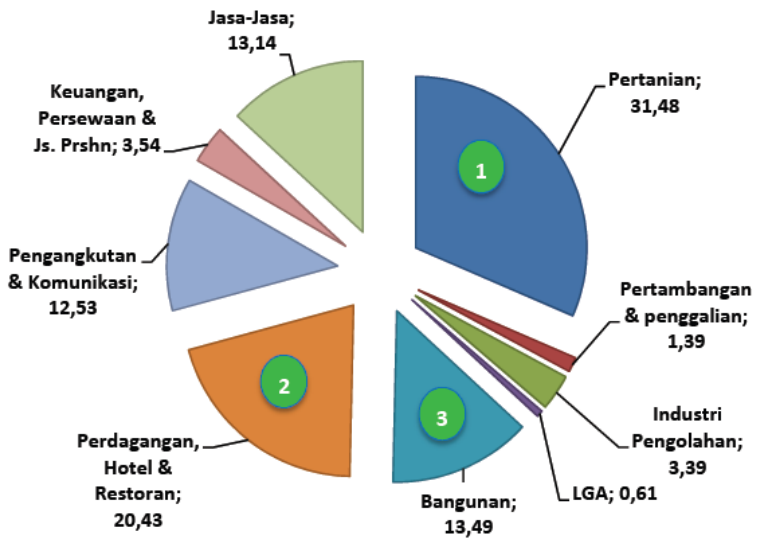

e. Indikator kinerja *Persentase pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah (IKM)* ditargetkan sebesar 2,5% dan mampu direalisasikan sebesar 10,26% dengan persentase tingkat capaian sebesar 410,40%. Tingginya tingkat pencapaian terhadap indikator kinerja ini dilakukan melalui Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan antara lain Fasilitasi Akses Permodalan untuk Koperasi dan UKM; Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi Koperasi; Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi UMKM; Pelatihan Peningkatan Kompetensi Koperasi dan UKM; dan Pembinaan Kelembagaan Koperasi dengan dialokasikannya anggaran sebesar Rp.16.260.219.450,-. Pertumbuhan produksi IKM terbesar terjadi pada jenis kelompok industri Pengolahan Lainnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 11.11 persen, sedangkan IKM yang mengalami penurunan produksi cukup besar adalah IKM yang Pengolahan Tembakau yang mengalami penurunan

produksi sebesar 11,93 persen. Pertumbuhan Industri manufaktur Mikro dan Kecil (IMK) di Provinsi Aceh memperlihatkan produksi pada Triwulan III tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan sebelumnya (q to q) sebesar 1,90 persen. Dari delapan belas IMK yang terkena sampel di Aceh, sebagian besar mengalami peningkatan yaitu sebanyak 12 jenis industri, hanya enam jenis IKM yang mengalami penurunan.

f. Indikator kinerja *Nilai ekspor non migas* yang ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 2% dari realisasi sebesar 93,768 Juta U$, hanya mampu terealisasi sebesar 73,201 Juta U$ dengan tingkat capaian menurun sebesar 22,442 Juta U$ atau 23,9%. Penurunan nilai ekspor tersebut disebabkan oleh karena tidak adanya kegiatan ekpor pada komoditi pupuk urea dan tras curah. Komiditi pupuk urea merupakan komoditi hasil industri yang memberikan kontribusi terbesar pada nilai ekspor non migas.

g. Indikator kinerja *Jumlah Negara tujuan Ekspor* ditargetkan pada 22 negara dan direalisasikan sesuai dengan target atau tingkat capaian sebesar 100%. Upaya dalam meningkatkan devisa bagi Pemerintah Aceh, telah ditetapkan sebanyak 22 negara yang dijadikan tujuan ekspor oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2013, antara lain Korea Selatan, Jepang, Cina, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Vietnam, Thailand, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Selandia Baru, Australia, Belgia, Inggris, Swedia, Jerman, Denmark, Rusia, Irlandia, Belanda, dan Afrika. Adapun komoditi tertinggi yang diekspor adalah Biji Besi dengan volume mencapai 346.437.667 kg dan komoditi kopi luwak dengan volume terendah yaitu sebesar 100 kg.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Tahun 2013 dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja Tahun 2012 terhadap beberapa indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 3.23
Perbandingan Tingkat Capaian Tahun 2012
dengan Tahun 2013 terhadap Indikator Kinerja
sasaran strategis kesepuluh

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013	
		Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pertumbuhan PDRB	5,20%	6,6 %	5,36 %
2.	Laju Inflasi	0,22 %	5 %	4,18 %
3.	PDRB Per Kapita	7,59%	7,54 Juta	8,23 Juta
4.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	27,77 %	28 %	27, 22 %
5.	Kontribusi Sub sektor Pertanian pangan terhadap PDRB	10,49%	11,07 %	10,12 %
6.	Kontribusi Sub sektor Perkebunan terhadap PDRB	6,29%	6,31 %	5,7 %
7.	Kontribusi Sub sektor Peternakan terhadap PDRB	4,53%	4,57 %	4,57 %
8.	Kontribusi Sub sektor Kehutanan terhadap PDRB (PSDH/DR)	1,57%	1,48 %	1,91 %
9.	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	7,89%	7,9 %	9, 56 %
10.	Kontribusi Sektor Energi terhadap PDRB	0,37%	0,42 %	0,53 %
11.	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	4,45%	4,47 %	4,85 %
12.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	16,3 milyar	16,05 milyar	17,66 milyar
13.				

14.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	3.589.365.600.000 rupiah	4.306.824.000.000 rupiah	4.614.454.285.714 rupiah
15.	Persentase Pertumbuhan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	2,1%	2,5 %	10,26 %
16.	Nilai Ekspor Non Migas	70.799.051 USD	93,768 Juta USD	73,201 Juta USD
17.	Jumlah Negara Tujuan Ekspor	22	22 Negara	22 negara

11.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Berkembangnya Sistem Agribisnis Yang Mampu Menyediakan Produk-Produk Pertanian yang Cukup, Bermutu dan Aman Konsumsi

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.24 di bawah ini :

Tabel 3.24
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesebelas

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
11.1	Jumlah produksi olahan perikanan	48	Ton	52,88	110,17
11.2	Jumlah jenis olahan hasil perikanan yang dikembangkan	10	Jenis	14	140,00
11.3	Persentase peningkatan agribisnis peternakan	5,00	%	11,50	230,00
11.4	Jumlah Komoditi Unggulan daerah yang dipromosikan	5	Komoditi	10	200,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**170,04**

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis *"Berkembangnya Sistem Agribisnis Yang Mampu Menyediakan Produk-Produk Pertanian yang Cukup, Bermutu dan Aman Konsumsi"* yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, dapat diperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **170,04 %** Pencapaian kinerja ini tergolong ***Sangat Baik.*** Keberhasilan

terhadap pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui beberapa indikator kinerja, antara lain :

a. Indikator kinerja *Jumlah Produksi Olahan Perikanan* yang ditargetkan sebanyak 48 ton mampu direalisasikan sebanyak 52,88 ton atau dengan persentase tingkat capaian 110,17 %. Upaya dalam pencapaian terhadap indikator kinerja ini melalui program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan yang dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Operasional Pusat Jaringan Usaha dan Investasi (PUSJUI) serta Peningkatan Upaya Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.719.720.000,-

   Optimalnya tingkat capaian ini juga diukur dengan indikator kinerja *Jumlah jenis olahan hasil perikanan yang dikembangkan* dengan target 10 jenis mampu direalisasikan sebanyak 14 jenis olahan hasil perikanan atau dengan tingkat capaian sebesar 140,00%. Pencapaian indikator kinerja ini di fokuskan pada 14 jenis olahan hasil perikanan, dengan peningkatan jumlah sentra pengolahan ikan serta pembinaan dan pemenuhan sarana dan prasarana pengolahan dengan sistem rantai dingin, peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan peningkatan produktivitas serta kepatuhan terhadap sistem manajemen mutu hasil perikanan.

   Peningkatan produksi olahan perikanan dimaksud terus ditingkatkan melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada unit pengolahan di sentra-sentra pengolahan, peningkatan kemampuan dan keterampilan kelompok pengolah UMKM perikanan tentang teknologi dan cara-cara berproduksi yang baik. Meningkatkan mutu produksi olahan yang berdaya saing, penerapan SNI terhadap produk olahan perikanan, serta

peningkatan jenis olahan hasil perikanan antara lain Teri rebus, teri kering, ikan asin, ikan kayu, abon ikan, terasi, dendeng ikan, kerupuk tiram, fish jelly, tuna lion, bandeng tanpa duri, teri crispy, kerupuk lele dan kerupuk bandeng. hal ini menunjukan bahwa jenis produksi Olahan perikanan di Aceh semakin berkembang dan kreatif.

b. Indikator kinerja *Persentase Peningkatan agribisnis peternakan* yang ditargetkan sebesar 5% mampu direalisasikan sebesar 11,5% atau dengan tingkat capaian 230,00%. Tingginya tingkat capaian ini dilakukan melalui program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan antara lain Pemurnian dan Pengembangan Plasma Nutfah Sapi; Peningkatan populasi ternak ruminansia; Pengembangan Inseminasi Buatan (IB); Pengembangan sarana dan prasarana kawasan peternakan; Pembinaan Pengolahan dan Promosi Hasil Peternakan dan Informasi Pasar; Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Hewan; Fasilitasi peningkatan inkubator kader peternakan dan sumber daya petugas dan peternak; dan Peningkatan populasi ternak non ruminansia dengan dialokasikannya anggaran sebesar Rp.160.601.229.926,-

   Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk meningkatkan agribisnis peternakan tersebut diarahkan untuk menghasilkan pangan protein hewani sebagai salah satu upaya dalam mempertahankan ketahanan pangan Aceh, meningkatkan kemandirian usaha, melestarikan dan memanfaatkan secara sinergis keanekaragaman sumberdaya lokal untuk menjamin usaha peternakan yang berkelanjutan, dan mendorong serta menciptakan produk yang berdayasaing dalam upaya meraih peluang ekspor, sehingga kontribusi

subsektor peternakan akan mendorong tingkat pertumbuhan PDRB Aceh.

c. Indikator kinerja *jumlah komoditi unggulan daerah yang dipromosikan* ditargetkan sebanyak 5 komoditi dan mampu direalisasikan sebanyak 10 komoditi atau dengan tingkat capaian 200,00%. Tingginya tingkat capaian ini dilakukan melalui mempromosikan kembali komoditi perkebunan andalan Aceh yang sudah ada dan tidak terekspos seperti lada dan pala, keikutsertaan Pemerintah Aceh pada beberapa ajang pameran nasional seperti Agro and Food Expo (Jakarta pada bulan Mei), PKA–IV (Banda Aceh-September, Batam Agribusissines Expo (Batam pada bulan November) serta INASEP (Bali pada bulan Desember). Adapun kesepuluh komoditi unggulan perkebunan yang dipromosikan yaitu kelapa sawit, kakao, karet, kopi, kelapa, lada, pala, nilam, pinang dan cengkeh. Promosi dilakukan baik terhadap kondisi eksiting lahan yang tersedia untuk pengembangan maupun terhadap hasil produk olahan dari komoditi perkebunan tersebut.

12.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Pengembangan Sektor Pertanian Berbasis Komoditi Unggulan Sesuai Dengan Sumberdaya Alam dan Agro Ekosistem Wilayah

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 8 (delapan) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.25 di bawah ini :

Tabel 3.25
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Duabelas

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
12.1	Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah :				
	a. Karet Kering	65.164	Ton	72.483	111,23
	b. Kelapa Sawit (CPO)	182.305	Ton	310.766	170,46
	c. Kopi (Biji Kering)	50.949	Ton	54.314	106,60
	d. Kakao (biji Kering)	37.582	Ton	36.661	97,55
12.2	Jumlah rehabilitasi/ pembangunan JUT dan JITUT :				
	a. JUT	134.972	Meter	135.877	100,67
	b. JITUT	131.119	Meter	151.095	115,24
12.3	Jumlah luas lahan yang dioptimasi	2.041	Ha	1.991	97,55
12.4	Jumlah alat dan mesin Pertanian untuk peningkatan produksi	2.435	unit	2.524	103,66
12.5	luas lahan yang diberikan Saprodi	9.561	Ha	9.993	104,52
12.6	Persentase luas lahan pengendalian OPT :				
	- Padi	52,00	%	86,24	165,85
	- Jagung	25,00	%	81,70	326,80
	- Kedelai	36,00	%	86,06	239,06
	- Kacang Tanah	10,00	%	87,00	870,00
	- Ubi Kayu	28,00	%	83,41	297,89
12.7	Jumlah kebun sumber bibit yang bangun	5	lokasi	5	100,00
12.8	Persentase bibit yg disertifikasi	100,00	%	100,00	100,00
	Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian				**194,19**

Berdasarkan hasil pengukuran dari 8 (delapan) indikator kinerja dari sasaran *"Strategis Pengembangan Sektor Pertanian Berbasis Komoditi Unggulan Sesuai Dengan Sumberdaya Alam dan Agro Ekosistem Wilayah"* diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **194,19%** atau pencapaian kinerja ini tergolong ***Sangat Baik.***

a. Indikator Peningkatan Produksi Unggulan Komoditi daerah

- Terhadap peningkatan produksi karet kering sebesar 111,23%. Terjadi peningkatan tanaman menghasilkan karet dari 72.874 Ha (2012) menjadi 75.456 Ha (2013).

Meningkatnya animo masyarakat dalam pengusahaan perkebunan karet (khususnya pemeliharaan) sehingga mengakibatkan meningkatnya produksi hasil komoditi karet. Adanya perbaikan sarana pasca panen/ pengolahan karet yang difasilitasi oleh Pemerintah.

- Terhadap peningkatan CPO kelapa sawit sebesar 170,46% : Terjadi peningkatan tanaman menghasilkan kepala sawit dari 109.989 Ha (2012) menjadi 118.681 Ha (2013). Naiknya harga CPO meningkatkan animo petani sawit untuk melakukan pemeliharaan secara lebih baik lagi.
- Terhadap peningkatan produksi biji kering kopi sebesar 106,60% karena meningkatnya luasan tanaman menghasilkan kopi dari 77.330 Ha dalam 2012 menjadi 78.338 Ha (2013)
- Terhadap produksi biji kakao kering yang tidak mencapai target, 97,54%, adanya peningkatan jumlah tanaman penghasil kakao dari 47.539 Ha (2012) menjadi 51.554 Ha (2013) tapi serangan hama penyakit kakao sangat tinggi. Sehingga serangan hama penyakit kakao seperti penggerek buah kakao (PBK) dan USC sangat masif di daerah dominan sentra kakao seperti Pidie, Pijay dan Galus. Faktor lainnya adalah petani masih belum melakukan fermentasi sebelum dijual untuk mendapatkan kadar air minimal 7% yang dipersyaratkan pasar.

b. Jumlah rehabilitasi/pembangunan JUT dan JITUT,

Kegiatan JITUT pada tahun 2013 dilakukan sebesar 131.119 M dan terealisasi sebesar 151.095 M, tercapainya target indikator kinerja ini karena adanya kelompok tani yang bersedia melakukan pembebasan lahan terkait rehabilitasi yang dimaksud. Rehab JITUT dilakukan guna

mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula atau menambah luas areal pelayanan. Kegiatan rehabilitasi JITUT dilaksanakan di Kabupaten Kota Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Kota Langsa, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Simeulue, Nagan Raya, Aceh Tenggara, dan Kota Subulussalam. Dukungan infrastruktur lain yang diberikan Pemerintah Daerah dalam mendukung peningkatan usaha tani pertanian adalah dibangunnya jalan usaha tani (JUT) yang merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara. Jalan usaha tani mutlak diperlukan dalam pengangkutan hasil pertanian yang mempunyai sifat "perishable" (mudah rusak) yang harus ditangani secara baik dan benar serta hati-hati, sehingga penurunan mutu dan kehilangan hasil dapat dihindari.

c. Jumlah luas lahan yang dioptimasi,

Luas lahan yang dioptimasi mempunyai pencapaian 97, 55% atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan lahan tersebut merupakan lahan kelapa sawit dan bukan lahan sawah. Optimasi lahan dilakukan untuk mendukung pembangunan pertanian khususnya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, memenuhi kriteria lahan usaha tani, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usaha tani tanaman pangan dan hortikultura melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan, sehingga menjadi lahan yang

lebih produktif diberbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Kegiatan Optimasi lahan tahun 2013 dilaksanakan di beberapa kabupaten seperti kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Kota Subulussalam dan Aceh Singkil. Mekanisme pelaksanaan fisik optimasi lahan dilakukan melalui pola padat karya dengan melibatkan partisipasi masyarakat/ petani setempat, dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki dan melestarikan/memelihara hasil kegiatan.

d. Jumlah alat dan mesin Pertanian untuk peningkatan produksi,

Target pada tahun 2013 adalah 2.435 unit dengan realisasi 2.524 unit atau 103,66%. Berbagai jenis Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga antara lain adalah Traktor 4-WD, Hand Traktor, Power Thresher, Corn Sheler, Pompa Air, Combine Harvester, Transplanter, Handsprayer. Ketersedian Alsintan sangat mendukung program peningkatan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura guna pencapaian target yang telah disepakati sebelumnya. Alsintan memiliki peran yang strategis yang meliputi peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, produksi, diversifikasi, kualitas dan nilai tambah. Tujuan pokok dari ketersediaan alsintan adalah untuk meningkatkan produktivitas pekerja, merubah karakter pekerjaan pertanian, yaitu membuatnya menjadi tidak berat dan menarik, serta meningkatkan kualitas kerja di lahan. Oleh karena itu, penggunaan alat dan mesin pertanian dianggap sebagai salah satu alternative untuk mengisi kebutuhan tenaga dalam rangka perluasan areal, peningkatan intensitas tanam pada lahan yang ada dan perbaikan pengelolaan pasca panen.

e. Luas lahan yang diberikan Saprodi,

Pada tahun 2013 target luasan lahan yang diberikan sarana produksi adalah seluas 9.561 Ha dengan realisasi 9.993 Ha atau 104,52%. Tercapainya target karena penetapan CP/CL atau pengiriman data CP/CL yang tepat waktu ke Provinsi (TK. I) mengakibatkan penyaluran saprodi juga tepat waktu sehingga areal tanam dapat dioptimalkan. Upaya tersebut tetap dilakukan dengan SK Penetapan CP/CL di Kabupaten dikirim ke Provinsi sesuai jadwal tender ditetapkan agar kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal tanam di Kabupaten.

f. Persentase Luas Lahan Pengendalian OPT Tanaman Pangan.

Pada Komoditi Padi, target yang ditetapkan tahun 2013 adalah 52% dengan jumlah OPT yang dilakukan pendataan adalah sebanyak 10 jenis dengan jumlah serangan 7.367 Ha dan yang berhasil dikendalikan adalah seluas 6.354 Ha (86,24%), melebihi target atau sebesar 165,85%. Jenis OPT yang menyerang komoditi padi antara lain tikus, walang sangit, penggerek batang, dll. Dari berbagai jenis OPT, tercatat tikus yang paling banyak menyerang komoditi padi dengan luas serangan 2.278 Ha, diikuti walang sangit 1.376 Ha dan penggerek batang 1.005 Ha. Jenis OPT yang didata untuk komoditi Jagung berjumlah 7 (tujuh) jenis berbeda dengan tahun lalu sebanyak 12 jenis.

Persentase luas lahan pengendalian OPT komiditi jagung untuk mempunyai target 25% luas lahan yang terkendali dari luas lahan yang terserang dengan realisasi 81,70%, sehingga persentase capaian sebesar 326,80%. Dari luas serangan 820 Ha, berhasil dikendalikan seluas 670 Ha dengan jenis OPT

yang menyerang luasan terbanyak adalah belalang 184 Ha, disusul penggerek batang dan penggerek tongkol.

Untuk komoditi kedelai, besarnya luas lahan yang terserang, luas pengendalian dan persentase capaiannya masing-masing adalah 336 Ha, 315 Ha, 239,06%. Kacang tanah; 254 Ha, 946 Ha, 221 Ha, 870%. Ubi Kayu; 205 Ha, 171 Ha, 297,89%.

Dalam melaksanakan pengendalian OPT digunakan semua metode atau teknik pengendalian yang sudah umum dilakukan seperti secara fisik, alami, dan kimiawi. Namun kegiatan perlindungan tanaman difokuskan pada pengelolaan serangan OPT yang tidak menimbulkan kerugian bagi petani dengan menerapkan teknik pengendalian yang ramah lingkungan.

Sistem PHT (Pengendalian Hama Terpadu) merupakan bagian yang erat kaitannya dengan usaha produksi seperti pengelolaan ekosistem, penetuan varietas, penggunaan benih unggul, penentuan waktu tanam, pemupukan berimbang, pengairan dan teknik budidaya lainnya yang tidak hanya memperhatikan sasaran jangka pendek tetapi merupakan pencapaian untuk sasaran jangkan panjang untuk menjaga kelestarian produksi dan pengelolaan lingkungan. Beberapa taktik dasar pengendalian hama terpadu antar lain pemanfaatan pengendali hayati yang asli dari tempat tersebut, pengelolaan lingkungan dengan cara bercocok tanam menggunakan pestisida secara selektif termasuk pestisida fisiologis, ekologis, dan selektivitas melalui perbaikan tehnik aplikasi dan pengetahuan terhadap sifat dan perilaku hama.

g. Jumlah Kebun Sumber Bibit yang dibangun,

Pembangunan Kebun Sumber bibit Unggul yang dilakukan pada 5 Kabupaten/Kota terealisasi 100 %. Kebun yang

dimaksud berada di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Timur dan Kota Subulussalam Masing-masing 2 Ha dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti pagar kebun, rumah jaga, serta perlengkapan administrasi lainnya seperti komputer, dll. Diharapkan Kebun Sumber Bibit Unggul tersebut nantinya dapat menjadi tempat produksi benih unggul untuk pemenuhan benih komoditi perkebunan di Provinsi Aceh, sehingga Aceh dapat memenuhi kebutuhan bibit unggul secara mandiri.

h. Persentase Bibit yang disertifikasi,

Pada tahun 2013, bibit yang disertifikasi terealisasi100% dengan terhadap 12 komoditi perkebunanan yaitu : kelapa sawit, kakao, karet, kopi, tebu, kelapa, cengkeh, pala, nilam, sereh wangi, tembakau dan lada sejumlah 6.103.968 batang.

Dari hasil sertifikasi tersebut telah disetorkan PAD senilai Rp.80.924.200,- dengan rincian Rp.71.435.905,- disetor ke kas daerah dan Rp.8.924.200,- ke Kas Kementerian Pertanian yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

13.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terpencil dan Pesisir

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.26 di bawah ini :

Tabel 3.26
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tigabelas

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
13.1	Jumlah Produksi perikanan	214.757	Ton	188.520,4	87,78
13.2	Cakupan bina kelompok nelayan	50	Kelp	30	60,00
13.3	Produksi perikanan kelompok nelayan	143.680	Ton	145.000	100,92
13.4	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang diberdayakan	20	Gapoktan/ LDPM	20	100,00
13.5	Jumlah Tenaga Penyuluh yang ditingkatkan Kemampuan dan Keterampilan	1.200	orang	1.200	100,00
13.6	Jumlah Pilot Percontohan yang dibangun sebagai media transfer teknologi ke petani	474	unit	474	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**91,45**

Berdasarkan hasil pengukuran dari 6 (enam) indikator kinerja dari sasaran *"Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terpencil dan Pesisir"* diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **91,45%** atau pencapaian kinerja ini tergolong ***Baik***.

Baiknya tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh 4 indikator kinerja yang mencapai target atau melebihi target dan 2 (dua) indikator kinerja yang tingkat capaiannya belum memenuhi target. Analisis setiap capaian kinerja sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan yang ditargetkan sebanyak 214.757 ton hanya mampu direalisasikan sebanyak 188.520 ton dengan tingkat capaian sebesar 87,78%.

   Bila dilihat dari target yang hanya mampu dihasilkan sebesar 188.520 ton atau dengan tingkat capaian sebesar 87,78% belum mencapai sebagaimana yang diharapkan, namun demikian apabila dibandingkan dengan jumlah produksi perikanan tahun 2012 sebanyak 186.749 ton adanya peningkatan sebanyak 1.771 ton atau peningkatan sebesar 1%.

Dalam upaya untuk peningkatan jumlah produksi perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan dan peningkatan pendapatan nelayan, Pemerintah Aceh menetapkan beberapa kebijakan :

1. Optimalisasi balai pembenihan melalui peningkatan sarana dan prasarana untuk penyediaan bibit ikan unggul, yang saat ini Pemerintah Aceh memiliki 8 (delapan) unit balai benih perikanan yang di kabupaten/kota;
2. Pengembangan terhadap usaha perikanan budidaya air tawar, air payau dan budidaya perikanan laut;
3. Melakukan revitalisasi terhadap sarana dan prasarana perikanan budidaya di kawasan budidaya ikan air tawar dan budidaya ikan air payau;
4. Motorisasi armada perikanan dalam upaya daya jelajah dan produktivitas nelayan dengan melakukan peningkatan teknologi untuk mencapai daya jelajah dan produktivitas nelayan di Aceh.

b. Indikator kinerja Produksi perikanan kelompok nelayan yang ditargetkan sebanyak 143.680 ton mampu direalisasikan sebanyak 145.000 ton atau dengan tingkat capaian sebesar 100,92%. Peningkatan terhadap produksi perikanan kelompok nelayan dilakukan melalui peningkatan teknologi dalam upaya mencapai daya jelajah dan produktivitas nelayan. Capaian ini juga didukung oleh indikator cakupan bina kelompok nelayan melalui pemberian bantuan bagi 30 kelompok nelayan yang tersebar pada beberapa kabupaten/kota berupa boat pancing dan alat tangkap lengkap.

c. Indikator kinerja *jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang diberdayakan* ditargetkan sebanyak 20 Gapoktan/LDPM mampu direalisasikan sebanyak 20 Gapoktan/LDPM dengan tingkat capaian 100%. Pemberdayaan ini dilakukan melalui pembinaan manajemen pengelolaan Gapoktan/LDPM dan pemberian bantuan penguatan modal untuk setiap Gapoktan/LDPM yaitu :

- tahap penumbuhan sebanyak 5 gapoktan diberikan belanja modal sebesar Rp.150.000.000,-
- tahap pengembangan sebanyak 4 (empat) gapoktan diberi bantuan modal sebesar Rp. 75.000.000,- serta
- tahap kemandirian sebanyak 11 gapoktan hanya diberi pendampingan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan gapoktan/LDPM.

Usaha peningkatan lembaga gapoktan/LDPM pemerintah aceh melalui badan ketahan pangan dan penyuluhan Aceh terus dilakukan pembinaan dan pemberian modal dimaksud dalam peningkatan kemandirian Gapoktan/LDPM terus ditingkatkan pada tahun 2014 jumlah Gapoktan/LDPM yang diberdayakan sebanyak 14 unit yang terdiri dari penguatan modal usaha gapoktan/LDPM

- tahap penumbuhan sebanyak 5 unit @150.000.000,-
- tahap pengembangan sebanyak 5 unit, biaya @75.000.000,-
- tahap kemandirian sebanyak 4 unit berupa pemberian pendampingan

d. Jumlah tenaga penyuluh yang ditingkatkan kemampuan dan keterampilan yang ditargetkan sebanyak 1.200 tenaga penyuluh mampu direalisasi sesuai target atau dengan tingkat capaian sebesar 100%. Upaya peningkatan melalui kemampuan

dan keterampilan penyuluh pertanian bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, pengolahan hasil pertanian dan kewirausahaan agribisnis melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).

e. Jumlah Pilot Percontohan yang dibangun sebagai media transfer teknologi ke petani ditargetkan sebanyak 474 unit dan mampu direalisasikan sebanyak 474 unit dengan tingkat capaian sebesar 100%. Upaya ini dilakukan melalui program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan yang dilakukan dengan kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.361.200.000,-. Dengan membuat demplot-demplot percontohan penggunaan teknologi kepada petani untuk peningkatan produktivitas usaha taninya.

14.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.27 di bawah ini :

Tabel 3.27
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Empatbelas

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
14.1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA)	12,00	%	12,24	102,00
14.2	Persentase Kekayaan Milik Pemerintah Aceh yang digunausahakan	30,00	%	30,00	100,00
14.3	Persentase jumlah aset yang terinventarisir	50,00	%	50,00	100,00
14.4	Persentase peningkatan wajib pajak yang taat dalam membayar pajak daerah	10,00	%	11,10	111,00
14.5	Jumlah Penerimaan Zakat	10.000.000.000	Rupiah	13.290.000.000	132,90
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**109,18**

Berdasarkan hasil pengukuran 5 (lima) indikator kinerja dari sasaran strategis *"Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah"* memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **109,18%** atau kategori ***Sangat Baik.***

Optimalnya rata-rata tingkat capaian ini didukung oleh tingkat capaian kinerja setiap indikator dalam sasaran strategis ini, yaitu:

a. Indikator persentase Peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA) pada tahun 2013 yang ditargetkan sebesar 12% mampu direalisasikan sebesar 12,24% atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 102,00%. Salah satu faktor yang menyebabkan optimalnya Pendapatan Asli Aceh (PAA) disebabkan adanya kebijakan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua untuk Kendaraan Bermotor Luar Daerah, yang substansinya antara lain adanya pembebasan bea balik nama kedua dan seterusnya kendaraan bermotor luar Provinsi Aceh (non BL) yang beroperasi dalam wilayah Aceh yang terhitung sejak 1 Mei 2013 sampai dengan 31 Oktober

2013 yang menyebabkan pemilik kendaraan bermotor (non BL) menimbulkan keinginan untuk melakukan BBN-KB.

b. Indikator kinerja persentase kekayaan Aceh yang digunausahakan yang ditargetkan 30%, mampu direalisasikan sebesar 30% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Capaian indikator ini didukung oleh adanya kekayaan/asset Pemerintah Aceh yang digunausahakan antara lain Rumah Sakit Tgk. Fakinah yang dikelola oleh Yayasan Tgk. Fakinah dengan sistem kerja sama selama 10 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, Kantor Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW-IPHI) dengan sistem sewa dalam jangka waktu 5 tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2015, pemanfaatan tanah milik Pemerintah Aceh dikawasan Kuta Alam untuk usaha warung kopi dengan sistem sewa kerjasama dalam jangka waktu 5 tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

c. Indikator persentase jumlah asset yang terinventarisir dengan target sebesar 50% mampu direalisasikan sebesar 50% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Salah satu upaya Pemerintah Aceh yang telah dilakukan dalam pencapaian tersebut adalah membentuk Tim Penatausahaan Aset yang dimiliki Pemerintah Aceh baik yang berada dalam provinsi Aceh maupun di luar provinsi Aceh, yang diharapkan sampai dengan tahun 2017 seluruh asset yang menjadi kekayaan Pemerintah Aceh dapat tertata dan dikelola dengan baik.

d. Indikator Persentase Peningkatan Wajib Pajak yang Taat membayar Pajak daerah yang ditargetkan sebesar 10% mampu terealisasi sebesar 11,10% dengan persentase tingkat capaian sebesar 110%. Optimalnya capaian kinerja ini antara lain disebabkan peningkatan volume penjualan kendaraan bermotor baru di Aceh yang menyebabkan meningkatkan jumlah wajib pajak baru. Tahun 2012 jumlah wajib pajak Aceh sebanyak

697.183 wajib pajak dan pada akhir tahun 2013 meningkat sebesar 774.642 wajib pajak, mengalami peningkatan sebesar 11,10 %.

e. Indikator Jumlah penerimaan zakat yang ditargetkan sebesar Rp. 10.000.000.000,-, mampu direalisasikan sebesar Rp..13.290.000.000,-, dengan persentase tingkat capaian sebesar 132,90%. Capaian tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.021.134.758,47 atau meningkat 22,72% dari penerimaan zakat di tahun 2012. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban Zakat, yang mengartikan bahwa Pelaksanaan Syariat Islam sudah diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Aceh.

15.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka Aceh

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 8 (delapan) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.28 di bawah ini :

Tabel 3.28
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis limabelas

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
15.1	Persentase angka pengganggguran terbuka	7,22	%	8,38	83,93
15.2	Rasio daya serap tenaga kerja	1:210	%	1:157	80,37
15.3	Angka partisipasi angkatan kerja	2.164.998	Orang	2.034.000	93,95
15.4	Angka sengketa pengusaha-pekerja dan penyelesaian per tahun	150	kasus	65	43,33
15.5	Pencari kerja yang ditempatkan	6.661	Orang	638	9,58

15.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	10	Kasus	8	80,00
15.7	Peningkatan Tenaga Kerja yang berkerja di sektor Pertanian	810.283	Orang	849.137	104,80
15.8	Persentase daya serap tenaga kerja sektor perindustrian	2,25	%	2,37	105,33
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**75,16**

Berdasarkan hasil pengukuran 8 (delapan) indikator kinerja dari sasaran strategis *"Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka Aceh"* mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **75,16%** atau kategori ***Cukup.*** Analisis pencapaian setiap indikator, sebagai berikut

a. Indikator kinerja Persentase penurunan angka pengganggguran terbuka, pada tahun 2013 Pemerintah Aceh menargetkan angka pengganggguran terbuka dapat diturunkan menjadi sebesar 7,22%. Hingga akhir tahun 2013, angka tersebut terus mengalami kenaikan mencapai 10,30 persen. Lebih tinggi 1,92 persen dari TPT bulan Februari 2013 sebesar 8,38 persen, dan lebih tinggi 1,2 persen dari TPT bulan Agustus 2012 sebesar 9,10 persen. Faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pencapaian target indikator kinerja ini antara lain lambannya pekerjaan proyek pemerintahan di Aceh, lambatnya pertumbuhan investasi, manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja belum berkembang dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia, pemutusan hubungan kerja atau kontrak tenaga-tenaga yang bekerja pada lembaga-lembaga donor/NGO/LSM baik dalam dan luar negeri. Kondisi ini juga menyebabkan angka pengangguran semakin meningkat, bertambah sebanyak 32 ribu orang.

Penurunan pekerja paling besar terjadi pada konstruksi, yaitu menurun sebesar 24 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012. Sedangkan untuk perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, mengalami peningkatan sebesar 28 ribu orang. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Aceh melakukan beberapa terobosan antara lain melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja dengan sasaran utamanya adalah pemuda putus sekolah sehingga tersedianya tenaga kerja siap pakai, baik untuk kebutuhan daerah maupun memenuhi kebutuhan luar negeri. Sedangkan tenaga kerja yang sedang menganggur ditingkatkan kemampuan skill sesuai dengan bakat dan permintaan pasar melalui pelatihan kompetensi.

b. Rasio daya serap tenaga kerja di Aceh juga mengalami penurunan pada tahun 2013, dari target yang ditetapkan sebesar 1:210, hanya mampu direalisasikan sebesar 1:157 dengan persentase capaian sebesar 80,37%. Hal ini membuktikan bahwa dari 139 perusahaan/proyek investasi yang beroperasi dan melaporkan kinerjanya, rata-rata 157 orang bekerja pada perusahaan tersebut, dengan jumlah serapan tenaga kerja tahun 2013 sebanyak 21.866 orang dengan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 21.780 orang dan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 86 orang.

c. Indikator kinerja Angka partisipasi angkatan kerja yang ditargetkan sebanyak 2.164.998 orang hanya mampu direalisasikan sebanyak 2.034.000 orang dengan persentase tingkat capaian sebesar 93,95%. Menurut BPS Aceh, jumlah angkatan kerja di Provinsi Aceh pada Agustus 2013 mencapai 2,034 juta orang, bertambah sekitar 55 ribu orang dibanding Agustus 2012 sebesar 1,978 juta orang. Penduduk yang

bekerja di Provinsi Aceh pada Agustus 2013 mencapai 1,825 juta orang, bertambah sekitar 26 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012 sebesar 1,799 juta orang.

d. Indikator Angka sengketa pengusaha-pekerja dan penyelesaian per tahun Dari 150 kasus sengketa pengusaha-pekerja yang ditargetkan, terdapat 65 kasus yang direalisasikan oleh Pemerintah Aceh dengan tingkat capaian sebesar 43,33%. Tingkat capaian ini apabila dibandingkan dengan kasus yang terjadi dalam tahun 2013 yang hanya berjumlah 102 kasus, memiliki nilai capaian sebesar 63,37%. Kasus yang umum terjadi di tahun 2013 di dominasi oleh tuntutan buruh terhadap pengusaha untuk menaikkan Upah Minimum dan Pemutusan Hubungan Kerja. Terhadap kenaikan Upah, Pemerintah Aceh telah mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan sengketa buruh dan pengusaha dengan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) para pekerja sebesar Rp 1.750.000 per bulan atau Rp 70 ribu per hari yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2013, tanggal 31 Oktober 2013. Penetapan upah baru bagi pekerja (UMP Aceh) itu efektif berlaku per 1 Januari 2014. Standar upah itu dituangkan dalam Peraturan Gubernur ini berlaku bagi seluruh pekerja/karyawan, baik perusahaan swasta, BUMN, BUMD, instansi pemerintah, maupun usaha sosial yang beroperasi di Aceh. Secara riil UMP Aceh tahun 2014 hanya naik Rp 200.000 per bulan dan itu disadari masih belum memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHL) pekerja lajang di daerah ini yang rata-rata Rp 1,8 juta per bulan. Namun, dengan adanya iktikad baik gubernur memperbaiki kesejahteraan pekerja, maka sebagian

dari kebutuhan hidup kaum buruh di daerah ini, relatif terpenuhi.

e. Indikator Pencari kerja yang ditempatkan, Pemerintah Aceh menargetkan sebanyak 6.661 orang, hanya mampu direalisasikan sebanyak 638 orang dengan persentase tingkat capaian sebesar 9,58%. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan karena pencari kerja tidak mau ditempatkan di luar Aceh atau tuntutan dari keluarga yang tidak mengenankan bekerja diluar domisili pencari kerja, ketidakcocokan lowongan dengan harapan dan keterampilan serta kualifikasi pencari kerja (*missmatch*), tidak sampainya informasi kepada pencari kerja atau habisnya batas waktu pemenuhan lowongan (*misslink*) dan ketidakcocokan jenis/ lokasi pekerjaan dengan harapan pencari kerja. Upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan realisasi terhadap pencapaian indikator ini pada tahun yang akan datang adalah dengan mengoptimalisasi ketrampilan dan kemampuan pencari kerja pada bidang teknis tertentu, sosialisasi penyampaian informasi dunia kerja (bursa kerja).

f. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah, dari 10 kasus yang ditargetkan dalam tahun 2013 dapat diselesaikan 8 kasus perselisihan. Terhadap 2 kasus perselisihan yang masih dalam proses penyelesaian akibat kebijakan pemerintah Aceh memberlakukan moratorium tambang bijih besi dan emas. Komitmen pemerintah Aceh dalam menjaga lingkungan hidup dengan memberlakukan moratorium tambang bijih besi dan emas tersebut bertujuan agar bisa dimanfaatkan oleh generasi Aceh dimasa mendatang. Hal ini, disebabkan fokus pembangunan Aceh saat ini diarahkan pada bidang

pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan serta geothermal (energi panas bumi).

g. Indikator peningkatan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian yang ditargetkan sebanyak 810.283 orang, direalisasikan sebanyak 849.137 orang dengan persentase tingkat capaian sebesar 104,80%. Untuk mendukung lapangan pekerjaan masyarakat dengan peningkatan tenaga kerja di sektor pertanian dan sektor perindustrian melalui indikator peningkatan tenaga kerja yang bekerja di sektor Pertanian dan Persentase daya serap tenaga kerja sektor perindustrian, Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012, jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2013 mengalami peningkatan terutama di Sektor Jasa-jasa (*Services*) sebesar 43 ribu orang (5,85persen) dan Sektor Pertanian (*Agriculture*) sekitar 6 ribu orang (0,72 persen). Sedangkan sektor Industri Pengolahan (*Manufacturing*) mengalami penurunan sekitar 22 ribu orang (10,34 persen).Penurunan pekerja di sektor Industri Pengolahan tersebut tidak mengakibatkan penurunan jumlah angkatan kerja, hal ini kemungkinan disebabkan banyak pekerja di sektor tersebut yang beralih ke sektor lain dan bahkan ada yang sedang mencari pekerjaan lagi sehingga mengakibatkan pertambahan jumlah pengangguran.

Grafik. 3.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Utama Provinsi Aceh,

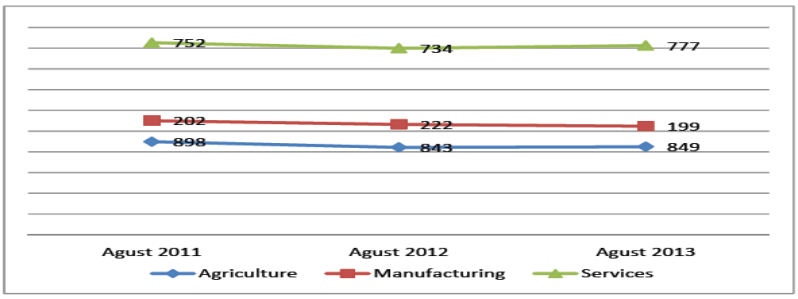

16.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Menurunnya Angka Kemiskinan dengan Perbaikan Pendapatan dan Pemberdayaan Kemandirian melalui Perluasan Lapangan Usaha

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.29 di bawah ini :

Tabel 3.29
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Enambelas

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
16.1	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	17,5	%	17,72	98,74
16.2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	5,1	%	3,7	72,55
16.3	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	5,85	%	5,85	100,00
16.4	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	20,00	%	20,00	100,00
16.5	Jumlah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	71.460	Jiwa	80.342	112,43
16.6	Jumlah Fakir Miskin yang mendapat bantuan rumah dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	733	KK	774	105,59
16.7	Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	235	KK	235	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**98,47**

Berdasarkan hasil pengukuran 7 (tujuh) indikator kinerja dari sasaran strategis *"Menurunnya Angka Kemiskinan Dengan Perbaikan Pendapatan dan Pemberdayaan Kemandirian Melalui Perluasan Lapangan Usaha"* mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **98,47%** atau kategori ***Baik.*** Baiknya tingkat pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh indikator sebagai berikut :

a. Indikator Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan yang ditargetkan sebesar 17,5% mampu direalisasikan sebesar 17,72% dengan persentase tingkat capaian sebesar 98,74%.
   Angka kemiskinan Provinsi Aceh yang dirasa masih tinggi perlu mendapat perhatian serius yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Kemiskinan di Aceh masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Pada tahun 2013, Pemerintah Aceh telah menargetkan sebesar 17,5% penduduk Aceh berada di atas garis kemiskinan, untuk menurunkan angka kemiskinan di pedesaan maka dibuatlah berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, antara lain program-program pemberdayaan masyarakat pedesaan seperti PNPM Mandiri, BKPG dan JKMA serta Perbaikan Infrastruktur Dasar lainnya. Tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2013, Provinsi Aceh ini berada pada urutan ke-29 nasional dari 33 Provinsi di Indonesia. Aceh masih berada pada rata–rata Nasional yang saat ini masih 19,46, dibawah Provinsi NTT. Pemerintah Aceh menargetkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,9 persen pada tahun 2013. Pemerintah Aceh menargetkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan atau hingga 2017, angka kemiskinan dapat diturunkan 9 hingga 10 persen di daerah ini. Salah satu bentuk percepatan program penurunan kemiskinan yaitu dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Aceh yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh dan melibatkan para pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan Aceh.
b. Indikator Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita, yang ditargetkan sebesar 5,1% dapat direalisasikan sebesar 3,7% dengan persentase tingkat capaian sebesar 72,55%. Tidak tercapainya indikator ini disebabkan tingginya angka inflasi yang bersumber dari harga-harga produk makanan.

c. Indikator Pengeluaran Konsumsi Non pangan perkapita ditargetkan dengan target sebesar 5,85% mampu terealisasi sebesar 5,85% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Mampu terealisasi sebesar 5,85% bila dibandingkan konsumsi non pangan pada tahun 2012 sebesar 5,75% dengan demikian meningkat sebesar 0,1%.
d. Indikator Persentase penurunan jumlah PMKS, ditargetkan 20% dan direalisasikan sebesar 20% atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 100% . Optimalnya pencapaian indikator ini didukung oleh upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Aceh melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Anak Terlantar, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 24.016.097.467,-
e. Indikator Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditargetkan sebanyak 71.460 jiwa mampu direalisasikan sebanyak 80.342 jiwa dengan persentase tingkat capaian sebesar 112,43%. Target cakupan penanganan PMKS Pemerintah Aceh untuk tahun 2013 yaitu sebanyak 71.460 jiwa. Seiring dengan jumlah PMKS yang terus mengalami peningkatan, sampai dengan akhir tahun, jumlah PMKS yang diberdayakan sebanyak 80.342 orang. PMKS tersebut diberdayakan dengan berbagai program, diantaranya pemberian bantuan berupa UEP bagi PMKS dengan tujuan mendapatkan penghasilan bagi keluarga, Bantuan Peralatan Kerja, Bantuan Sandang dan Pangan, dan lainnya.
f. Indikator Jumlah Fakir Miskin yang mendapat bantuan Rumah dan Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, tahun 2013 ditargetkan untuk 733 KK dan direalisasikan sebanyak 774 KK

yang mendapatkan bantuan dengan persentase tingkat capaian sebesar 105,59%. Dengan rincian yang menerima bantuan rumah fakir miskin sebanyak 324 unit untuk 324 kk dan bantuan rehab rumah fakir miskin sebanyak 450 unit untuk 450 KK. Komitmen Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin melalui penyediaan/rehabilitasi rumah yang layak huni dari tahun ke tahun terus ditingkatkan melalui Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang dijabarkan dalam kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan alokasi anggaran Rp.18.662.230.913,-.

g. Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ditargetkan sebanyak 235 kk mampu direalisasikan sesuai dengan target atau tingkat capaian sebesar 100%. Upaya ini dilakukan melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang dilakukan dengan kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin; dan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.159.870.000,-

17.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya Investasi Dalam Negeri dan Investasi Asing

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.30 di bawah ini :

Tabel 3.30
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tujuhbelas

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
17.1	Jumlah investor/perusahaan (PMDN/PMA)	69	Perusahaan	42	60,87
17.2	Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	2.000.000.000.000	Rupiah	5.091.120.831.883	254,56
17.3	Jumlah nilai rencana investasi	6.350.000.000.000,00	Rupiah	6.133.436.193.666,00	96,59
17.4	Persentase Kenaikan nilai rencana investasi	15,00	%	53,79	358,60
17.5	Jumlah regulasi dan kebijakan dibidang penanaman modal dan investasi yang tersusun	8	Dok	2	25,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**159,12**

Berdasarkan hasil pengukuran 5 (lima) indikator *"Dalam Negeri dan Investasi Asing"* mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **159,12%** atau kategori ***Sangat Baik*** . analisis terhadap capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Investor/perusahaan (PMDN/PMA), pada tahun 2013, ditargetkan sebanyak 60 perusahaan akan tetapi hanya mampu direalisasikan sebanyak 42 perusahaan, rendahnya tingkat capaian ini disebabkan informasi yang disampaikan masih bersifat umum seperti kejelasan lahan (luas, status, harga sewa dan sebagainya), kecukupan energi listrik bagi industri juga belum secara pasti di informasikan kepada calon investor potensial.

   Secara rinci jumlah investor/perusahaan yang menanamkan modal di Aceh dapat dirinci pada tabel di berikut ini :

Tabel 3.31
Perusahaan yang menanamkan modal

Perusahaan yang menanamkan modal di Aceh	Tahun	
	2012	2013
PMA	24	4
PMDN	88	38
Jumlah	112	42

Sumber : Bainprom Aceh, 2013

b. Jumlah Nilai Realisasi Invenstasi (PMDN/PMA)

Dengan adanya investasi Aceh yang semakin berkembang, ketertarikan investor baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) semakin besar. Memasuki tahun 2013, Pemerintah Aceh terus memperlihatkan kinerja investasi yang semakin baik. Hal ini ditandai dengan Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) meningkat sebesar 254,56 persen dari yang ditargetkan. Peningkatan tersebut tidak diikuti dengan jumlah investor/perusahaan (PMDN/PMA) yang menanamkan modal di Aceh.

c. Jumlah Nilai Rencana Invenstasi

Sampai dengan pertengahan Desember 2013 nilai realisasi investasi Aceh telah mencapai Rp.5.091.120.831.883,- dan tahun 2012 sebesar Rp.1.269.203.702.854,- maka terjadi kenaikan realisasi nilai investasi di Aceh sebesar 301 persen.

Kenaikan nilai investasi yang sangat signifikan tidak terlepas dari upaya Pemerintah Aceh yang telah melakukan beberapa kegiatan promosi investasi antara lain *integrated promotion, trade, invesment forum and marketing invesment Indonesia* di Belgia (Brussel), Dubai (UEA), China (Beijing) dan di Sidney Australia. Keberhasilan tersebut telah menempatkan Aceh pada peringkat 7 (tujuh) terbesar tingkat nasional realisasi investasi pada triwulan III.

d. Jumlah Indikator kinerja *Persentase kenaikan nilai rencana investasi* ditargetkan sebesar 15 % mampu direalisasikan

sebesar 53,79% dengan tingkat capaian sebesar 358,60%. Capaian ini terjadi peningkatan dari tahun 2012 sebesar Rp.3.158.652.086.174,-. Tingginya tingkat capaian ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Aceh untuk terus menarik investor dan semakin kondusifnya situasi keamanan saat ini.

e. Namun demikian, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tingkat capaiannya masih kurang yaitu indikator kinerja *Jumlah Regulasi dan Kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Investasi yang Tersusun*, yang ditargetkan sebesar 8 dokumen hanya mampu direalisasikan sebesar 2 dokumen atau dengan tingkat capaian 25%. Adapun regulasi tersebut berupa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Revisi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Aceh. Penetapan regulasi tersebut merupakan upaya pemerintah Aceh untuk meningkatkan geliat investasi di Aceh.

18.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Lokal

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 12 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.32 di bawah ini :

Tabel 3.32
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis delapanbelas

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
18.1	Jumlah kelembagaan pertanian masyarakat yang dibina	290	unit	290	100,00
18.2	Jumlah kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir yang mandiri	4	Kab/Kota/ lembaga/Klp	5	125,00
18.3	Kelembagaan Pangan Masyarakat :				
	a. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	75	GAPOKTAN	72	96,00
	b. Lumbung Pangan Masyarakat	102	Klp	73	71,57
	c. Desa Mandiri Pangan	207	Desa	213	102,90

18.4	Populasi Koperasi	7.327	Unit	7.720	105,36
18.5	Persentase koperasi aktif	52,95	%	51	96,32
18.6	Jumlah Penyebaran BPR/LKM	28	Unit	79	282,14
18.7	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	82.306	Unit	82.706	100,49
18.8	Jumlah Penyaluran kredit untuk UMKM	13,81	Triliun	7,79	56,41
18.9	Persentase peningkatan Koperasi Berkualitas	2,00	%	2,90	145,00
18.10	Peningkatan Populasi UMKM	0,75	%	0,75	100,00
18.11	Peningkatan jumlah UMKM yang memanfaatkan Dana modal usaha	15,00	%	15,00	100,00
18.12	Jumlah pedagang yang tertampung pada pasar tradisional yang telah dibangun	25.000	Pedagang	25.000	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**112,94**

Berdasarkan hasil pengukuran 13 (tiga belas) indikator kinerja dari sasaran strategis *"Meningkatnya Keberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Lokal"* mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **112,94%** atau kategori ***Sangat Baik***.

analisis terhadap capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

a. Indikator *Jumlah Kelembagaan Pertanian Masyarakat yang dibina* ditargetkan sebanyak 290 unit, dapat direalisasikan sebanyak 290 unit dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Optimalnya capaian ini menunjukan bahwa Pemerintah Aceh dalam upaya peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat dilakukan melalui pembinaan kelompok-kelompok tani dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas petani. Dari kelompok pemula ditingkatkan menjadi kelompok lanjut dan pada akhirnya kelompok tani tersebut menjadi kelompok tani mandiri.

b. Indikator *Jumlah kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir yang mandiri* ditargetkan sebanyak 4 Kab/kota/lembaga dapat

direalisasikan sebanyak 5 kab/kota/lembaga dengan persentase tingkat capaian sebesar 125%. Optimalnya capaian ini didukung oleh Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir, pada tahun 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.879.000.000,-. Adapun wilayah yang dibina kemandirian masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir yaitu Masyarakat dalam wilayah perairan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue, dan Kabupaten Simeulue.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir pada Tahun 2014 tetap menjadi prioritas dalam pembinaan kelompok masyarakat pesisir yang tersebar pada 4 kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 971.450.000,- .

c. Indikator *Kelembagaan Pangan Masyarakat*

- *Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat* yang ditargetkan 75 Gapoktan hanya mampu terealisasi 73 Gapoktan dengan persentase tingkat capaian 97,33%. Dalam upaya mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi petani, Pemerintah Aceh dari tahun ke tahun meningkatkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani guna pemberian layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian serta permodalan. Pada tahun 2013 dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan kegiatan Pengembangaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat mendapat alokasi dana

sebesar Rp. 1.364.000.000,-. Program dan kegiatan ini tetap dilanjutkan pada tahun 2014 dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.818.160.000,-.

- *Lumbung Pangan Masyarakat* ditargetkan sebanyak 102 kelompok dan terealisasi 73 Kelompok dengan persentase tingkat capaian sebesar 71,57%. Pemberdayaan LPM ini melalui pemberian modal pada kelompok sebesar @ Rp.20.000.000,- s.d @ Rp.25.000.000,-/Kelompok. Pembelian gabah pada petani untuk menjadi stock cadangan pangan masyarakat desa, berupa bantuan. Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat, Pemerintah Aceh melalui Badan Ketahanan Pangan terus dilaksanakan, pada tahun 2014 ditargetkan 10 kelompok yang setiap kelompok akan diberi bantuan pengisian lumbung sebesar @Rp.20.000.000,-/Klp.
- *Desa Mandiri Pangan* ditargetkan sebanyak 207 desa dan terealisasi sebanyak 213 Desa dengan tingkat capaian sebesar 103,86%. Optimalnya capaian ini merupakan komitmen dari Pemerintah Aceh dalam mengimplementasi program peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan yang setiap tahun terus ditingkatkan. Pada tahun 2013 desa mandiri pangan di Aceh berjumlah 213 desa, meningkat sebanyak 37 desa atau sebesar 21,02% dari jumlah desa mandiri pangan pada tahun 2012 sebanyak 176 desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.756.802.000,-. Program dan kegiatan ini tetap menjadi prioritas dalam RPJMA tahun 2012-2017. Pada tahun 2014 Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebanyak Rp.2.334.080.000.-.

d. Indikator *Populasi Koperasi*, ditargetkan sebanyak 7.327 koperasi direalisasikan 7.720 koperasi atau persentase tingkat capaian sebesar 105,36%. Tingginya tingkat capaian ini merupakan komitmen Pemerintah Aceh dalam rangka pengembangan koperasi sebagai soko guru pengembangan perekonomian rakyat. Untuk pengembangan populasi koperasi Pemerintah Aceh menetapkan Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM dengan kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.830.058.000,-. Program dan kegiatan ini untuk tahun 2014, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 991.660.000,- dengan target populasi mencapai 7.681 koperasi.

e. Indikator *Persentase Koperasi Aktif* yang ditargetkan sebesar 52,95 % hanya mampu direalisasikan sebesar 51 % dengan persentase tingkat capaian sebesar 96,32 %. Belum optimalnya capaian indikator ini disebabkan belum keluarnya Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyebabkan sebagian besar dari koperasi tidak aktif, belum dapat diaktifkan kembali. Berdasarkan Rekapitulasi Database Koperasi Provinsi Aceh Tahun 2013 Jumlah Koperasi di Aceh sebanyak 7.720 unit Koperasi (Tabel 3.33)

Tabel 3.33
Rekapitulasi Database Koperasi Aceh Tahun 2013

NO	KOTA/KABUPATEN	KONDISI KOPERASI (UNIT)					JUMLAH ANGGOTA (Org)	MODAL SENDIRI (Rp. 000)	MODAL LUAR (Rp. 000)	VOLUME USAHA (Rp. 000)
		AKTIF		TIDAK		JUMLAH				
		LAMA	BARU	T.AKTIF	BEKU					
1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	16
1	BANDA ACEH	458	-	358	-	816	42.335	73.697.868	58.751.111	122.715.392
2	ACEH BESAR	380	35	273	24	712	41.235	27.379.296	11.031.336	13.719.097
3	PIDIE	208	14	272	11	505	38.872	20.911.975	18.808.487	32.373.416
4	PIDIE JAYA	148	2	71	-	221	13.203	7.522.949	8.857.474	8.998.354
5	ACEH UTARA	183	7	236	122	548	57.341	48.744.642	59.581.150	180.680.362
6	LHOKSEUMAWE	132	2	107	50	291	12.808	11.306.651	13.109.622	14.092.453
7	BIREUEN	142	22	121	107	392	37.072	11.263.983	23.811.713	43.306.920
8	ACEH TIMUR	286	2	112	92	492	33.962	23.678.523	40.287.134	40.130.986
9	LANGSA	111	8	59	145	323	18.789	6.069.487	861.600.871	868.468.088
10	ACEH TAMIANG	131	17	44	77	269	10.897	8.780.900	4.234.511	8.463.091
11	ACEH BARAT	198	9	95	74	376	17.543	10.098.218	24.608.921	31.310.841
12	SIMEULUE	20	1	82	36	139	3.264	1.067.020	21.636.740	22.631.960
13	NAGAN RAYA	39	-	75	49	163	5.654	2.856.310	5.194.000	2.215.309
14	ACEH JAYA	40	1	82	20	143	6.228	6.518.628	8.960.531	70.000
15	ACEH SELATAN	256	8	157	-	421	26.026	25.345.581	8.903.432	44.123.493
16	ACEH BARAT DAYA	105	3	81	50	239	19.293	11.759.709	14.736.183	13.973.654
17	ACEH SINGKIL	78	1	10	69	158	8.521	8.477.238	204.219.805	10.699.586
18	ACEH TENGAH	212	9	71	156	448	30.947	14.826.647	28.705.533	17.114.168
19	ACEH TENGGARA	365	3	4	88	460	33.628	6.021.884	21.952.488	27.974.372
20	GAYO LUES	41	-	70	25	136	7.840	33.996.493	8.467.134.250	2.868.000
21	SABANG	51	3	22	15	91	6.643	18.328.049	36.464.133	15.077.071
22	BENER MERIAH	108	16	125	-	249	22.735	6.801.958	30.207.558	17.122.963
23	SUBULUSSALAM	48	1	-	35	84	4.639	1.324.461	3.634.987	548.818
24	PROVINSI	7	2	29	6	44	1.481	11.990.999	2.987.405	15.292.843
JUMLAH		3.747	166	2.556	1.251	7.720	500.956	398.769.469	9.979.419.375	1.553.971.237

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Aceh, 2013

f. Indikator *Jumlah Penyebaran BPR/LKM* yang ditargetkan sebanyak 28 unit mampu direalisasikan sebanyak 79 unit dengan persentase tingkat capaian sebesar 282,14%.

Realisasi kinerja tahun 2013 sebagaimana disebutkan bahwa terdapat 15 lembaga perbankan yang terdiri atas 15 kantor pusat, 14 kantor cabang dan 19 kantor kas (29 Unit) yang tersebar di kabupaten/ kota se-Provinsi Aceh, dan Lembaga Keuangan Mikro baik berbadan hukum koperasi maupun yang

belum berbadan hukum dengan jumlah keseluruhan sebesar 79 Unit.

Jumlah penyebaran BPR di Indonesia diperkirakan sudah mencapai 1.600 unit dengan memiliki 4500 kantor yang tersebar di Indonesia sedangkan BPR dan BPRS yang beroperasi di Aceh saat ini sebanyak 15 lembaga perbankan yang terdiri atas 15 kantor pusat, 14 kantor cabang dan 19 kantor kas, dengan total aset pada 2011 sebesar Rp. 243 miliar dan pada 2012 naik menjadi Rp. 272 miliar (11,8%).

Kinerja Bank Perkreditan Rakyat baik konvesional maupun syariah yang mencapai pertumbuhan aset sebesar 15,6% (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan DPK sebesar 9,5% (yoy) dan penyaluran kredit sebesar 8,7% (yoy), walaupun dihimpit ekspansi kinerja penyaluran kredit yang terjadi pada bank umum, realisasi penyaluran kredit BPR Aceh di triwulan laporan tercatat mengalami peningkatan, berbeda dengan bank umum, pembiayaan BPR didominasi oleh pembiayaan ke sektor produktif dalam bentuk modal kerja dengan porsi 79,43%.

Tabel 3.34
Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Triwulan III Tahun 2013

Indikator	Tahun 2013 (Triwulan III)		Total
	Konvensional	Syariah	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aset (Rp Juta)	199.614	95.259	294.873
Dana Pihak Ketiga (Rp Juta)	71.133	51.981	123.114
- Tabungan	31.027	31.740	62.767
- Deposito	40.106	20.241	60.347
Kredit (Rp Juta)	117.596	59.998	177.594
- Modal Kerja	96.480	44.574	141.054
- Kosumsi	10.240	1.660	11.900
- Investasi	10.876	13.764	24.640
NPL (%)	8,24	15,72	23,96
LDR (%)	165,32	115,42	280,74

Sumber : Kajian Ekonomi Regional Provinsi Aceh

g. Indikator Kinerja *Jumlah Lembaga Mikro dan Kecil* pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 82.306 Unit dan direalisasikan sebanyak 82.706 Unit atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 100,49 %, tingginya tingkat capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah aceh dalam peningkatan dan pengembangan usaha mikro dan kecil yang merupakan salah satu misi pembangunan Aceh yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017. Untuk mendukung komitmen tersebut dalam upaya pembinaan koperasi, usaha mikro dan kecil, sejak tahun 2012 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dipisahkan menjadi :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
2. Dinas Koperasi dan UKM Aceh.

Grafik. 3.7

Perkembangan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

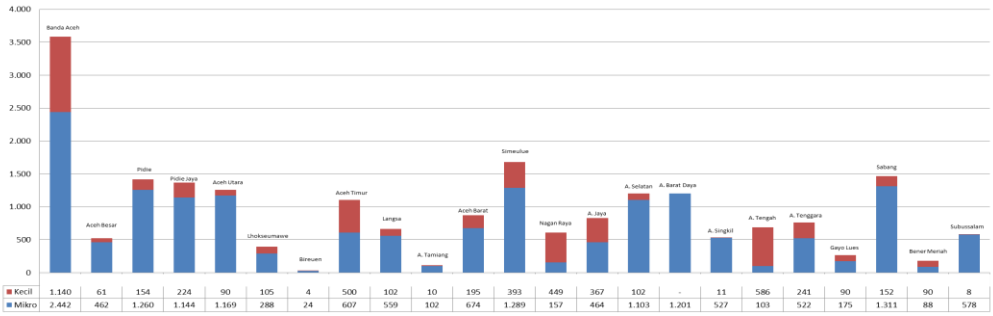

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Aceh (Data Sementara)

h. Indikator *Jumlah Penyaluran Kredit untuk UMKM*

Kinerja penyaluran kredit di triwulan III tahun 2013 tumbuh meningkat dari 2,93% (qtq) menjadi 3,96% (qtq). Kinerja penyaluran kredit perbankan konvensional secara tahunan menunjukkan peningkatan dari 15,6% (yoy) menjadi 17,8% (yoy), dimana pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada kredit

investasi yang merupakan indikator kredit ke sektor produktif dan memberikan multiplier effect yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Proporsi penyaluran kredit menurut jenis penggunaan dengan proporsi 57,84% Kosumsi, Modal Kerja 36,50% dan 5,66% Investasi, yang penyalurannya yang masih didominasi oleh Bank Pemerintah yaitu sebesar 86% dan Bank Non Pemerintah sebesar 14%.

Namun penyaluran kredit tersebut tidak diimbangi dengan minimnya akses keuangan ke perbankan terutama sektor pertanian yang merupakan sektor paling dominan dalam perekonomian Provinsi Aceh serta komposisi terbesar dalam persentase Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah. Menurut Kajian Ekonomi Regional Triwulan III Bank Indonesia menunjukkan bahwa jumlah penyaluran kredit untuk sektor pertanian tercatat hanya sebesar Rp. 728 miliar. Namun demikian, pertumbuhan penyaluran kredit di sektor ini meningkat dari triwulan sebelumnya.

Grafik. 3.8

Proporsi Kredit Menurut Sektor Ekonomi

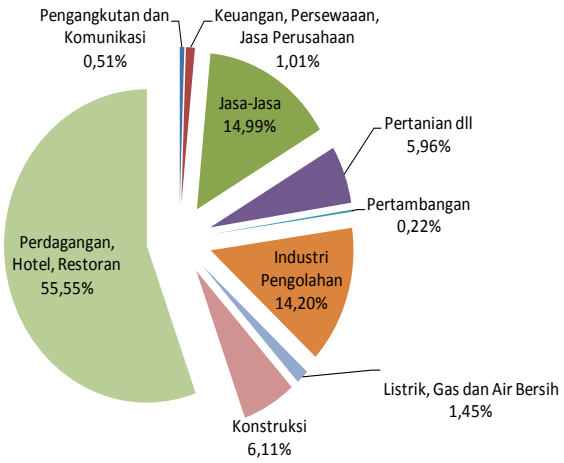

Sumber : Kajian Ekonomi Regional Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2013

i. Indikator *Persentase Peningkatan koperasi berkualitas* yang ditargetkan sebesar 2% mampu direalisasikan sebesar 2,9% dengan persentase tingkat capaian sebesar 145%. Tingginya capaian kinerja ini menunjukan adanya peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat lokal yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM dan Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan untuk Koperasi dan UKM dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.918.526.450,-

   Namun demikian apabila dibandingkan persentase jumlah koperasi yang berkualitas di Aceh sampai dengan tahun 2013 sebesar 3,63% dengan koperasi yang berkualitas secara nasional yang sudah mencapai 77,30% , maka Populasi Koperasi yang berkualitas di Aceh masih jauh dibawah populasi koperasi yang berkualitas secara nasional.

   Dalam upaya meningkatkan populasi koperasi yang berkualitas Pemerintah Aceh dengan Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.738.399.960,-.

j. Indikator kinerja *Peningkatan Populasi UMKM* ditargetkan sebesar 0,75% dan direalisasikan sebesar 0,75% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Peningkatan populasi UMKM dimaksud sebesar 0,75% dari jumlah populasi UMKM pada tahun 2012 sebanyak 80.692 unit. Dengan demikian pada tahun 2013 Pemerintah Aceh mampu menambah populasi UMKM sebesar 605 Unit atau pada sampai akhir tahun 2013 populasi UMKM di Aceh sebanyak 81.297 Unit.

k. Indikator jumlah pedagang yang tertampung pada pasar tradisional yang telah dibangun, ditargetkan 25.000 pedagang dan direalisasikan sebanyak 25.000 pedagang dengan

persentase tingkat capaian sebesar 100%. Capaian ini didukung oleh program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.311.361.836.- untuk membangun/merehab pasar tradisional /kios sebanyak 23 unit yang tersebar di Kabupaten/Kota. Program ini terus dilanjutkan pada tahun 2014 dengan alokasi dana sebesar Rp.17.976.116.233.- untuk membangun/merehab 26 unit pasar tradisional/kios.

19.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Bidang Pendidikan pada Tahun 2015

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.35 di bawah ini :

Tabel 3.35
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Sembilan belas

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
19.1	Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	53,00	%	69,64	131,40
19.2	Jumlah anak yatim yang mendapat bantuan bea siswa pendidikan dasar dan menengah	116.666	Anak Yatim	115.658	99,14
19.3	Persentase Peningkatan Angka melek huruf (Tahun) Usia 15+	97,10	%	97,21	100,11
19.4	Angka rata-rata lama sekolah	9,7	Tahun	11,99	123,61
19.5	Angka partisipasi kasar :				
	a. SD/MI/Paket A	105,00	%	108,55	103,38
	b. SMP/MTS/Paket B	100,00	%	102,55	102,55
	c. SMA/MA/Paket C	87,00	%	83,80	96,32

19.6	Angka pendidikan yang ditamatkan :				
	a. Tidak tamat SD/sederajat	10,00	%	10,03	100,30
	b. Tamat SD/sederajat	24,00	%	24,27	101,13
	c. Tamat SMP/sederajat	24,00	%	22,50	93,75
	d. Tamat SMA/sederajat	32,00	%	27,97	87,41
	e. Diploma I/II/III	4,35	%	12,44	285,98
19.7	Angka partisipasi murni :				
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,00	%	90,54	96,32
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	76,50	%	72,43	94,68
	c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	62,50	%	59,50	95,20
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**114,08**

Berdasarkan hasil pengukuran 7 (tujuh) indikator kinerja dari sasaran strategis *"Tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Bidang Pendidikan Pada Tahun 2015"* mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **114,08%** atau kategori ***Sangat Baik.***

Optimalnya rata-rata tingkat capaian sasaran strategis ini didukung oleh tingkat keberhasilan 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

a. Indikator kinerja *Jumlah guru yang memenuhi kualifikas S1/D-IV* ditargetkan 53,00% sampai dengan akhir tahun 2013 dapat direalisasikan sebesar 69,64% atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 131,40%. Tingkat capaian ini didukung melalui *Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,* pada tahun 2013 Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp.125.750.696.323.- dan untuk tahun 2014 program tersebut terus dilanjutkan Pemerintah Aceh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 333.341.006.578.-.

b. Indikator *jumlah anak yatim yang mendapat bantuan bea siswa pendidikan dasar dan menengah* ditargetkan sebanyak 116.666 anak yatim, hanya mampu direalisasikan sebanyak 115.658 anak yatim. Tidak optimalnya capaian indikator ini dikarenakan calon penerima bantuan tidak mampu melengkapi administrasi kelengkapan yang dipersyaratkan untuk memperoleh bantuan beasiswa sampai tenggat waktu yang ditetapkan pada akhir tahun 2013.

c. Indikator *Persentase penurunan angka melek huruf(usia 15+)* ditargetkan sebesar 96% dan mampu direalisasikan sebesar 96,11% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100,11%. Keberhasilan indikator ini didukung oleh Program Pendidikan Non Formal melaui kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.703.789.000.-. program dan kegiatan tersebut untuk tahun 2014 Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1.947.912.000.-.

Perbandingan angka melek huruf di Aceh dari tahun ke tahun sebagaimana pada grafik 3.9 di bawah ini:

Grafik. 3.9
Angka Melek Huruf Tahun 2010-2013 (dalam %)

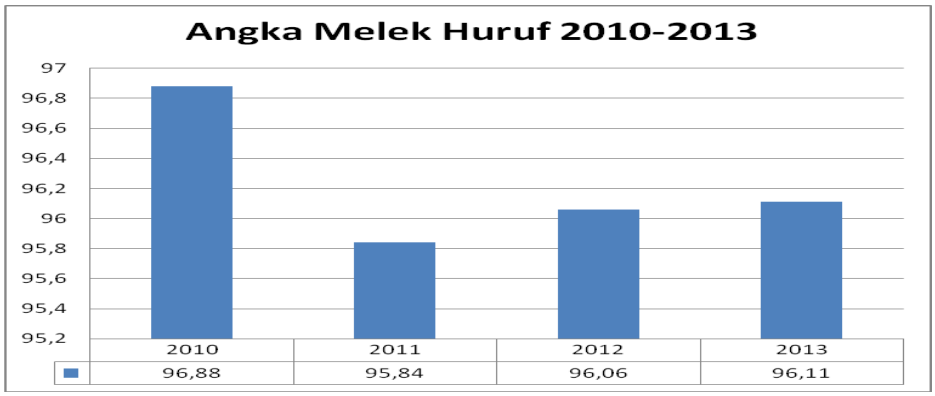

Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, 2013

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa angka melek huruf (bisa membaca dan menulis) di Aceh terjadi fluktuasi yaitu dari 96.88% tahun 2010 menurun menjadi 95.84% tahun 2011, namun meningkat lagi pada tahun 2012 yaitu 96.06% dan pada tahun 2013 menjadi 96.11%. Peningkatan angka ini mengindikasikan adanya kemajuan bidang pendidikan di Aceh.

d. Indikator kinerja *angka rata-rata lama sekolah* ditargetkan 9,7 tahun dan mampu direalisasikan 11,99 tahun dengan persentase tingkat capaian sebesar 123,61%. Capaian ini mengalami peningkatan 34,72% dari rata-rata lama sekolah tahun 2012 selama 8,9 tahun. Optimalnya capaian kinerja ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak yang di dukung oleh adanya program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 166.868.387.591,- dan program Pendidikan Menengah yang dilaksanakan Pemerintah Aceh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 146.709.876.071, serta adanya dukungan dari Pemerintah Aceh yang memberikan beasiswa kepada 116.666 anak yatim untuk kelangsungan pendidikan.
e. Indikator kinerja Angka partisipasi kasar :
   - Tingkat SD/MI/Paket A yang ditargetkan sebesar 105% terealisasi 108,55% dengan persentase tingkat capaian sebesar 103,38.
   - Tingkat SMP/MTs/Paket B ditargetkan sebesar 100%, mampu direalisasikan sebesar 102,55%, dengan persentase tingkat capaian sebesar 102,55%.

- Tingkat SMA/MA/Paket C yang ditargetkan sebesar 87,00, hanya mampu direalisasikan sebesar 83,80% dengan tingkat capaian sebesar 96,32%.

  Berdasarkan perbandingan Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/MI/Paket A, dan SMP/MTs/Paket B sampai dengan akhir tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan angka Partisipasi Kasar pada tahun 2012, yaitu untuk tingkat SD/MI/Paket A sebesar 109,20% dan tingkat SMP/MTs/Paket B sebesar 103,89%. Sedangkan tingkat partisipasi kasar tingkat SMA/MA/Paket C mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 84,67% menjadi 83,80% pada tahun 2013. Secara rinci, perkembangan Angka Partisipasi Kasar sebagaimana tertera dalam grafik di bawah ini :

Grafik 3.10
Angka Partisipasi Kasar Tahun 2009-2013 (dalam%)

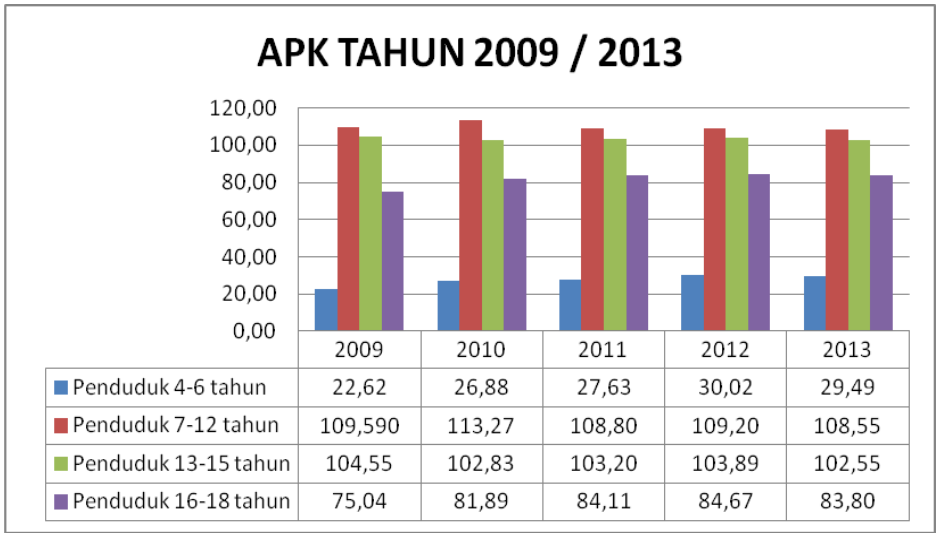

	2009	2010	2011	2012	2013
Penduduk 4-6 tahun	22,62	26,88	27,63	30,02	29,49
Penduduk 7-12 tahun	109,590	113,27	108,80	109,20	108,55
Penduduk 13-15 tahun	104,55	102,83	103,20	103,89	102,55
Penduduk 16-18 tahun	75,04	81,89	84,11	84,67	83,80

sumber : Dinas Pendidikan Aceh, 2013

Selama periode 2009-2013, APK jenjang TK/RA mengalami peningkatan dari 22,62 % pada tahun 2009 menjadi 29,49 % pada tahun 2013. Sedangkan Pada jenjang SD/MI sedikit mengalami penurunan yaitu 109.59 % pada tahun 2009

menjadi 108.55 % pada tahun 2013. Begitu juga halnya dengan APK jenjang SMP/MTs yaitu 104.55 pada tahun 2009 menjadi 102.55 pada tahun 2013. Namun demikian dalam hal APK telah menunjukkan angka di atas 100% sudah dianggap ideal meskipun terjadi fluktuasi angkanya. Selanjutnya APK jenjang SMA/MA/SMK menunjukkan peningkatan yang baik yaitu 75.04 % pada tahun 2009 menjadi 83.80 % pada tahun 2013. Artinya jumlah anak yang sekolah di jenjang pendidikan menegah meningkat setiap tahun secara linier tanpa ada fluktuasi.

f. Indikator *Angka pendidikan yang ditamatkan* ;

- Tidak tamat SD/sederajat ditargetkan sebesar 10% mampu direalisasikan sebesar 10,03% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100,30 %, Tamat SD/Sederajat ditargetkan sebesar 24% mampu direalisasikan sebesar 24,27% dengan persetase tingkat capaian sebesar 101,13 %, Tamat SMP/sederajat ditargetkan sebesar 24% hanya mampu direalisasikan sebesar 22,50% dengan persetase tingkat capaian sebesar 93,75 %, Tamat SMA/sederajat ditargetkan sebesar 32% hanya mampu direalisasikan sebesar 27,97% dengan persetase tingkat capaian sebesar 87,41%, dan Diploma I/II/III ditargetkan sebesar 4,35% mampu direalisasikan sebesar 12,44% dengan persetase tingkat capaian sebesar 285,9 %.

  Pemerintah Aceh dalam upaya penurunan angka pendidikan yang ditamatkan pada semua jenjang pendidikan sebagaimana tersebut di atas, dalam RPJMA 2012-2017 menetapkan Program Wajib Belajar pendidikan Dasar 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah, pada tahun 2013 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.

31.792.781.856,- dan program ini tetap menjadi prioritas dalam penurunan persentase angka pendidikan yang ditamatkan, pada tahun 2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.280.741.140.798.-

g. Indikator kinerja *Angka Partisipasi murni*

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A target 94%, realisasi 90,54% dengan persentase tingkat capaian sebesar 96,32%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B target 76,5%, realisasi 72,43% dengan persentase tingkat capaian sebesar 94,68%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C target 62,5%, realisasi 59,50% dengan persentase tingkat capaian sebesar 95,20%. Pemerintah Aceh dalam upaya peningkatan angka partisipasi murni pada semua jenjang pendidikan sebagaimana tersebut di atas, dalam RPJMA 2012-2017 menetapkan Program Wajib Belajar pendidikan Dasar 9 Tahun, Program Pendidikan Menengah, program pendidikan luar biasa, dan program pendidikan non formal pada tahun 2013 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 337.652.873.011,-.

	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
20.	*Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Dayah, Pendidikan Vokasional dan Pendidikan Tinggi dalam Memenuhi Kebutuhan Ketenagakerjaan*

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.36 di bawah ini :

Tabel 3.36
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis keduapuluh

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
20.1	Pendidikan dasar :				
	1. Angka partisipasi sekolah	99,41	%	99,35	99,94
	2. Rasio guru terhadap murid	12,00	%	19,00	158,33
	3 Rasio guru/murid per kelas rata-rata	45,00	%	22,00	48,89
20.2	Pendidikan menengah :				
	1. Angka partisipasi sekolah	95,60	%	74,44	77,87
	2. Rasio guru terhadap murid	10,00	%	17,00	170,00
20.3	Angka Putus Sekolah :				
	1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,07	%	0,10	142,86
	2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,16	%	0,23	143,75
	3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,13	%	0,28	215,38
20.4	Angka Kelulusan :				
	1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	82,00	%	97,80	119,27
	2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	85,00	%	99,27	116,79
	3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	85,00	%	99,34	116,87
	4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	106,00	%	105,39	99,42
	5. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	165,00	%	112,05	67,91
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**121,33**

Berdasarkan hasil pengukuran 4 (empat) indikator kinerja dari sasaran "Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Dayah, Pendidikan Vokasional dan Pendidikan Tinggi dalam Memenuhi Kebutuhan Ketenagakerjaan" mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar 121,33 % atau kategori *Sangat Baik.*

a. Angka partisipasi sekolah yang ditargetkan sebesar 99,41% dapat direalisasikan sebesar 99,35% dengan persentase tingkat capaian sebesar 99,94%. Tingkat pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa penduduk yang bersekolah pada tingkat

dasar sudah optimal dibandungkan dengan yang tidak bersekolah pada tingkat dasar yaitu sebesar 0,65%. Keberhasilan ini deripakan upaya Pemerintah Aceh untuk terus meningkatkan kualitas dunia pendidikan di Aceh yang didukung oleh Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 21.580.972.338

b. Rasio guru terhadap murid yang ditargetkan sebesar 12,00%, mampu direalisasikan sebesar 19,00% dengan persentase tingkat capaian sebesar 158,33%. Keberhasilaan ini memperlihatkan bahwa perbandingan jumlah murid pada tingkatan sekolah dasar sudah mencukupi dengan jumlah murid pada tingkatan sekolah dasar. Kondisi ini juga akan berdampak terhadap menurunnya beban kerja seorang guru yang mengajar pada tingkatan dasar. Optimlanya tingkat pencapaian kinerja indikator ini didukung oleh program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 21.580.972.338

c. Angka putus sekolah SD/MI yang ditargetkan sebesar 0,07%, mampu direalisasikan sebesar 0,10% dengan persentase tingkat capaian sebesar 142,86%. Tingginya tingkat capaian ini dipengaruhi oleh kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, keadaan geografis yang kurang menguntungkan serta didukungm oleh sarana dan prasarana pendidikan yang sudah memadai. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. Demikian juga halnya terhadap indikator kinerja Angka putus sekolah

SMP/MTs yang ditargetkan sebesar 0,16%, mampu direalisasikan sebesar 0,23% dengan persentase tingkat capaian sebesar 142,86%. Pencapaian kinerja indikator tersebut juga sudah optimal.

d. Angka putus sekolah SMA/SMK yang ditargetkan sebesar 0,13%, mampu direalisasikan sebesar 0,28% dengan persentase tingkat capaian sebesar 215,38%. Optimlanya tingkat pencapaian kinerja ini juga didukung oleh peran serta orang tua terhadap anak untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan menengah, adanya program pendidikan menengahyang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh dengan akokasi anggaran sebesar Rp. 10.211.809.518,-. Upaya tersebut dilaksanakan Pemerintah Aceh dalam rangka mewujudkan pencapaian target MDGs bidang pendididkan.

Grafik. 3.11

Angka Putus Sekolah Tahun 2010-2013 (dalam %)

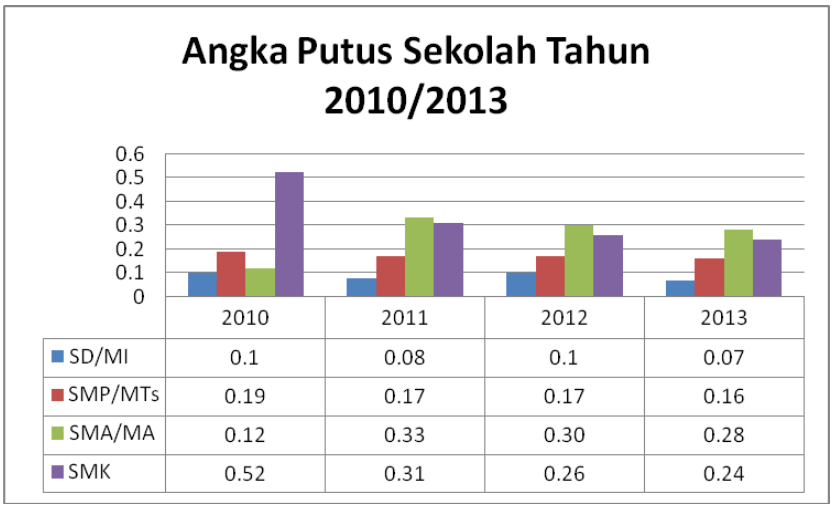

	2010	2011	2012	2013
SD/MI	0.1	0.08	0.1	0.07
SMP/MTs	0.19	0.17	0.17	0.16
SMA/MA	0.12	0.33	0.30	0.28
SMK	0.52	0.31	0.26	0.24

Angka Putus Sekolah (APK) mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa di Aceh angka putus sekolah untuk semua jenjang dapat diminimalisir. Untuk jenjang SD/MI dari 0.10 % pada tahun 2012 dapat ditekan menjadi 0.07 % pada tahun 2013. Begitu juga halnya jenjang SMP/MTs dari 0.17 % tahun 2012 menjadi 0.16 % tahun 2013 dan jenjang SMA/MA dari 0.28 % tahun 2012 menjadi 0.28 % tahun 2013 serta jenjang SMK dari 0.24 % tahun 2012 menjadi 0.24 % tahun 2013.

e. Angka Kelulusan,

Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI/ ke SMP/Mts yang ditargetkan sebesar 106% mampu direalisasikan sebesar 105,39% dengan persentase tingkat capaian sebesar 99,42%.

Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs/ ke SMA/SMK/MA yang ditargetkan sebesar 165% mampu direalisasikan sebesar 112,05% dengan persentase tingkat capaian sebesar 67,91%.

Grafik. 3.12

Jumlah Siswa Yang Melanjutkan Tahun 2010-2013 (%)

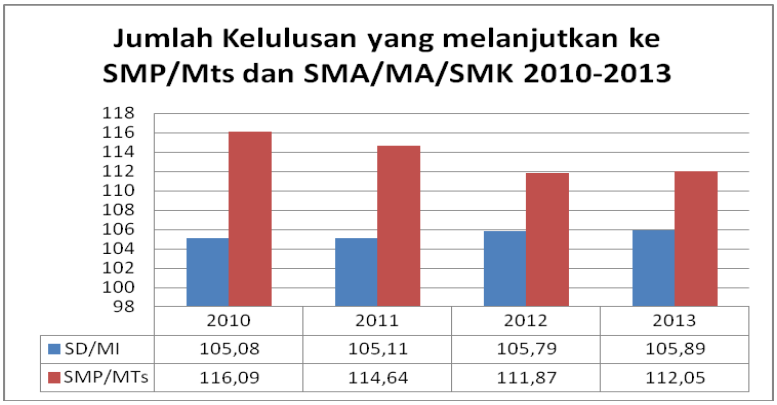

Dari grafik di atas menggambarkan fluktuasi Angka Melanjutkan yaitu Jenjang SD/MI meningkat sedikit dari 105.79 % tahun 2012 menjadi 105.89 % tahun 2013. Begitu juga halnya dengan jenjang SMP/MTs terjadi peningkatan dari 111.87 % tahun 2012 menjadi 112.05 % pada tahun 2013.

Dengan demikian menunjukkan bahwa angka melanjutkan sekolah di Aceh sudah mencapai angka ideal dan hal ini juga sinergi dengan upaya untuk menurunka angka putus sekolah sebagaimana telah diuraikan pada grafik di atas

21.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Bidang Kesehatan 2015

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 13 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.37 di bawah ini :

Tabel 3.37
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dua Puluh Satu

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
21.1	Umur harapan hidup	69	Tahun	68,9	99,86
21.2	Angka kematian ibu	143	/100.000 LH	173	89,51
21.3	Angka kematian bayi	20	/1000 LH	14	130,00
21.4	Angka kematian anak balita	40	/1000 LH	15	162,50
21.5	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	%	100,00	100,00
21.6	Prevalensi gizi kurang dan buruk	20,00	%	17,43	87,15
21.7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	50,00	%	80,00	160,00

21.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85,00	%	84,44	99,34
21.9	Cakupan kunjungan bayi	95,00	%	86,39	90,94
21.10	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/sederajat	70,00	%	69,63	99,47
21.11	Cakupan pemberian MP-ASI usia 6-24 bulan dari keluarga miskin	100,00	%	25,29	25,29
21.12	Cakupan pemberian ASI eksklusif	50,00	%	49,09	98,18
21.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	70,00	%	55,09	78,70
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**101,61**

Berdasarkan hasil pengukuran 13 indikator kinerja dari sasaran *"Strategis Tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Bidang Kesehatan Tahun 2015"* mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **101,61%** atau kategori ***Sangat Baik.***

Keberhasilan yang dicapai tersebut berkat kerjasama dan partisipasi semua kompenen Pemerintah Aceh dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan sehingga target yang belum dapat dicapai secara optimal dapat diwujudkan. Pencapaian terhadap bidang kesehatan diperoleh dari pengukuran beberapa indokator kinerja yang secara rinci dapat dijelaskan berikut :

a. Indikator kinerja *Umur harapan hidup* target 69 Tahun realisasi 68,9 tahun, Secara nasional target 2014 umur harapan hidup 72 tahun :

   Salah satu indikator utama untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehtaan adalah usia harapan hidup. Pada tahun 2012 umur harapan hidup Aceh adalah 68,8 tahun, sedangkan pada tahun 2013 adalah 69,9 tahun. Hal ini menandakan bahwa derajat kesehatan masyarakat Aceh mengalami peningkatan. Secara nasional, umur harapan hidup Aceh masih berada di bawah target MDgs yaitu 72 tahun.

Indikator kinerja angka kematian Ibu melahirkan yang ditargetkan sebesar 143/100.000 LH, mampu direalisasikan sebesar 158/100.000 LH dengan persentase tingkat capaian sebesar 89,51%. Tingkat capaian ini apabila dibandingkan dengan target MDGs yang pada akhir tahun 2015 tingkat kematian ibu melahirkan sebesar 102/100.000 LH, Pemerintah Aceh perlu menetapkan strategi dan kebijakan yang dapat mendukung penurunan angka kematian ibu melahirkan. Upaya ini telah dilakukan dengan menetapkan Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 yang setiap tahunnya mendapat alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2013 Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000. Namun demikian untuk mewujudkan target-target tersebut, Pemerintah aceh masih menghadapi beberapa kendala, antara lain disebabkan oleh masih banyak ibu melahirkan yang ditangani oleh tenaga non medis (dukun), khususnya pada daerah pedalaman/terpencil, Keadaan sosial ekonomi keluarga, Kurangnya kesehatan masyarakat tentang kesehatan ibu hamil, Penempatan dan pemenuhan tenaga medis kesehatan belum menjangkau wilayah pedalaman/terpencil dalam Provinsi Aceh, Belum optimalnya akses informasi kesehatan kepada masyarakat, baik melalui media masa, jejaring lintas sektor dan LSM, dan Usia produktif ibu melahirkan serta adanya penyakit hipertensi dalam kehamilan dan pendarahan.

b. Indikator Angka Kematian Bayi, ditargetkan sebesar 20 bayi per 1000 kelahiran hidup mampu direalisasikan sebesar 14/1000 LH dengan persentase capaian 130%. Sesuai dengan target

MDGs pada tahun 2015, indikator ini harus dicapai 23/1000 LH, target RPJMN 24/1000 LH pada tahun 2012. Pemerintah Aceh pada tahun 2013 sudah tercapai (*Achieved*).

Capaian indikator angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup tahun 2013 terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMA sudah melebihi target yaitu sebesar 14/1000 kelahiran. Angka ini juga sudah berada jauh diatas target MDGs sebesar 24/1000 kelahiran. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan, kemudahan terhadap akses pelayanan kesehatan dan pemahaman masalah kesehatan masyarakat yang semakin meningkat.

Indikator Angka kematian anak balita, ditargetkan sebesar 40/1000 LH mampu direalisasikan sebesar 15/1000 LH dengan tingkat capaian sebesar 162,50%. Optimalnya tingkat capaian ini didukung oleh beberapa indikator yang mempengaruhi penurunan tingkat kematian anak balita yaitu, Indikator kinerja cakupan kunjungan bayi, Indikator kinerja cakupan Pemberian MP-ASI usia 6-24 bulan dari keluarga miskin, Indikator kinerja cakupan pemberian ASI eksklusif. Dengan demikian Dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2012 sebesar 45/1000 LH, Pemerintah Aceh pada akhir tahun 2013 yang tingkat capaiannya 15/1000 LH telah mampu menurunkan angka kematian anak balita sebesar 33,33% dengan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, pada tahun 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.500.000.000.-.

c. Indikator Prevalensi gizi kurang dan buruk ditargetkan sebesar 20% hanya mampu direalisasikan sebesar 17,43% dengan persentase capaian kinerja sebesar 87,15%. Pada tahun 2013

Angka gizi buruk di Aceh terus mengalami penurunan atau cenderung membaik. Hal ini menunjukkan semakin baiknya kondisi pangan, terutama kebutuhan gizi masyarakat. Beberapa upaya sektor kesehatan dalam peningkatan status gizi antara lain dengan pemberian makanan tambahan, dan peningkatan peran kader gizi di posyandu dalam deteksi dini balita gizi buruk. Walaupun angka prevalensi gizi buruk di Aceh sudah membaik, tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus-kasus gizi buruk di Aceh. Untuk itu tetap diharapkan seluruh elemen masyarakat, birokrat dan swasta tetap waspada serta dapat bersama-sama meningkatkan komitmennya untuk menurunkan prevalensi gizi buruk, minimal mempertahankan.

d. Indikator kinerja *Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani* ditargetkan sebesar 50%, mampu direalisasikan sebesar 80% dengan persentase tingkat capaian sebesar 160%. Tingginya tingkat capaian ini didukung oleh Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.720.400.000,- yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan antara lain Peningkatan Diklat Medis/Non Medis; Penelitian dan pengembangan Medis/Non Medis; dan Peningkatan Pendidikan tenaga penyuluh Kesehatan.

e. Indikator kinerja *Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan*, yang ditargetkan sebesar 85% hanyan mampu direalisasikan sebesar 84,44% atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 99,34%. Realisasi ini masih berada di bawah target nasional. Sesuai dengan RPJM Nasional dan target MDGs tahun 2015 indikator ini harus dicapai sebesar 90%. Untuk

mengoptimalkan pencapaian target indikator ini, Pemerintah Aceh akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- meningkatkan jumlah, mutu, distribusi, retensi dan pendayagunaan tenaga kesehatan untuk mendukng pelayanan kesehatan dengan mengikutsertakan pada berbagai pendidikan dan pelatihan, penempatan tenaga kesehatan dan kebidanan pada Puskesmas daerah pedalaman/terpencil, serta mengajukan alokasi kebutuhan formasi tenaga kesehatan kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
- meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

f. Indikator kinerja *Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)* yang ditargetkan 70% dapat direalisasikan sebesar 55,9% atau dengan tingkat capaian 78,70%. Belum optimalnya tingkat capaian kinerja disebabkan beberapa kendala dalam pencapaiannya, antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi bagi bayi dan balita. Pada tahun 2013, Pemerintah Aceh telah menetapkan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular melalui kegiatan Peningkatan Imunisasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 757.279.000,-. Untuk tahun 2014, Pemerintah Aceh tetap berupaya meningkatkan *Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)* melalui Program dan kegiatan tersebut dengan target 80% yang dialokasikan anggaran sebesar Rp.865.715.000,-

22.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya Mutu Pelayanan melalui Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Kesehatan dengan Menjaga Keseimbangan Antar Wilayah

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.38 di bawah ini :

Tabel 3.38
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dua Puluh Dua

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
22.1	Rasio dokter umum per satuan penduduk	20	/100.000 pddk	30	150,00
22.2	Rasio dokter spesialis per satuan penduduk	10	/100.000 pddk	19	190,00
22.3	Rasio dokter gigi per satuan penduduk	5	/100.000 pddk	6	120,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**153,33**

Berdasarkan hasil pengukuran 3 (tiga) indikator kinerja dari sasaran strategis *"Meningkatnya Mutu Pelayanan melalui Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Kesehatan dengan Menjaga Keseimbangan Antar Wilayah"* mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **153,33%** atau kategori ***Sangat Baik.***

a. Rasio dokter umum per satuan penduduk, target 20/100.000 penduduk, realisasi 30/100.000 penduduk atau dengan tingkat capaian 150%, tingginya tingkat pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa jumlah dokter umum di Provinsi Aceh sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

   Walaupun secara kuantitas dokter umum di Aceh sudah memadai, namum penyebarannya belum merata pada beberapa Kabupaten/Kota di Aceh, hal ini disebabkan distribusi terhadap dokter umum masih menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Rasio Dokter spesialis per satuan penduduk, rencana 10/100.000 satuan penduduk dan realisasi 19/100.000 satuan penduduk dengan tingkat capaian sebesar 190,00%. minimal memiliki 4 spesialis dasar, penyakit dalam, bedah, kandungan, anak) ada beberapa daerah yang belum memiliki dokter spesialis, aceh jaya, gayo lues, pidie jaya.

   Jumlah dokter sspesialis sebanyak 892 orang, kontribusi terbesar di Kota Banda Aceh.

c. Rasio dokter gigi persatuan penduduk 5/100.000 penduduk dan realisasi 6/100.000 penduduk atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 120 %. Hal ini menunjukan bahwa angka kecukupan pelayanan antara dokter gigi dengan penduduk sudah memadai, akan tetapi tidak seluruh puskesmas memiliki dokter gigi, walaupun dihitung secara rasio sudah melebih target.

   Langkah yang ditempuh :

   - Upaya kerjasama sehubungan dengan perubahan rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
   - Penguatan akreditasi terhadap Rumah Sakit
   - Dokter spesialis yang dibiayai oleh Pemda baik provinsi maupuan kabupaten diupayakan dikembalikan ke daerah masing-masing, untuk memenuhi kapasitas spesialis, minimal 4 spesialis dasar.

	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
23.	*Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Medik Spesialistik dan Kesehatan Jiwa serta Tersedia Obat Esensial di Sarana Pelayanan Dasar dan Rujukan*

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.39 di bawah ini :

Tabel 3.39
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dua Puluh Tiga

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
23.1	Jumlah pasien kesehatan jiwa yang mengikuti terapi rehabilitasi dan terapi kerja (modalitas)	3.390	Pasien	5.789	170,77
23.2	Jumlah Pasien Jiwa yang bebas Pasung	24	Pasien Pasung	3	12,50
23.3	Jumlah pemulangan pasien (*dropping*) kesehatan jiwa	216	Pasien	133	61,57
23.4	Cakupan dan mutu pelayanan intensif *(Acut Care)*	2.555	Pasien	2.204	86,26
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**82,78**

Berdasarkan hasil pengukuran 4 (empat) indikator kinerja dari sasaran strategis "*Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Medik Spesialistik dan Kesehatan Jiwa serta Tersedia Obat Esensial di Sarana Pelayanan Dasar dan Rujukan*" mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **82,78%** atau kategori ***Baik*** .

a. Pemerintah Aceh pada tahun 2013 menargetkan 3.390 pasien Kesehatan Jiwa yang mengikuti terapi rehabilitasi dan terapi kerja (modalitas), terealisasi 5.789 pasien dengan persentase tingkat capaian 170,77%. Rehabilitasi dan terapi kerja (modalitas) yang dilaksanakan pemerintah Aceh juga difokuskan pada 2.204 pasien jiwa. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Aceh untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh.

b. Jumlah Pasien Jiwa yang Bebas Pasung,

   Target penjemputan pasung sebanyak 24 orang, tetapi yang terealisasi sebanyak 3 orang dengan persentase 24 %, rendahnya tingkat capaian ini disebabkan :

   - Pasien pasung di kabupaten/kota yang datanya telah kita terima tidak diizinkan oleh keluarga pasien untuk dirawat di rumah sakit jiwa;

- Jarak tempuh dan kondisi geografis pasien pasung yang ada di daerah terlampau jauh dari RSJ;
- Petugas di puskesmas sudah lebih dahulu mengantarkan pasien ke RSJ;
- Rumah Sakit Jiwa telah melebihi Kapasitas tempat tidur (Over Capacity), jumlah tempat tidur yang tersedia di Rumah Sakit Jiwa tersedia kapasitas tempat tidur sebanyak 388 TT, sedangkan rata-rata jumlah pasien dirawat perhari sebanyak 800 pasien.

c. Jumlah pemulangan pasien (dopping) kesehatan jiwa

Target pada tahun 2013 sebanyak 216 pasien, akan tetapi hanya terealisasi 133 pasien, hal ini dikarenakan:

- Setiap perjalanan dropping hanya mampu mengantar 9-10 pasien;
- Pasien sembuh klinis yang di akan dropping, bertempat tinggal dengan jarak tempuh dari RSJ secara geografis membutuhkan waktu dan biaya yang besar sehingga tidak mungkin didropping tanpa perencanaan dan anggaran yang tepat.

	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
24.	*Terjamin Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Miskin Aceh dengan Jaminan Kesehatan Berbasis Asuransi Sosial atau Jaminan Kesehatan Masyakat Aceh (JKMA)*

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.40 berikut ini :

Tabel 3.40
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dua Puluh Empat

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
24.1	Jumlah Penduduk yang mendapat fasilitas				
	a. Fasilitas JKA Murni	1.762.452	Jiwa	1.762.452	100,00
	b. Jaminan kesehatan melalui asurasi sosial lainnya	2.597.339	Jiwa	2.597.339	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**100,00**

Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator kinerja dari sasaran *"Strategis Terjamin Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Masyakat Miskin Aceh dengan Jaminan Kesehatan Berbasis Asuransi Sosial atau Jaminan Kesehatan Masyakat Aceh (JKMA)"* mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **100%** atau kategori ***Baik.***

Keberhasilan tingkat capaian sasaran strategis ini didukung oleh keberhasilan terhadap indikator kinerja yaitu :

a. Indikator kinerja fasilitasi JKA murni yang ditargetkan sebanyak 1.762.452 jiwa dapat terealisasi seluruhnya sebanyak 1.762.452 jiwa atau dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran tahun 2013 sebesar Rp.418.752.895.000,-
b. Indikator kinerja Jaminan kesehatan melalui asuransi sosial lainnya yang ditargetkan sebanyak 2.597.339 jiwa dan terealisasi seluruhnya dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Pencapaian terhadap indikator kinerja dihitung berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk jaminan kesehatan Aceh tahun 2013, sehingga penduduk Aceh yang belum tertangani asuransi sosial lainnya tetap masuk dalam Jaminan Kesehatan Aceh. Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) ini merupakan strategi reformasi sistem pembiayaan pelayanan

kesehatan di Aceh. JKA di mulai 1 Juni 2010. Sejak saat itu semua penduduk dari segala strata sosial praktis dibebaskan dari beban finansial saat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten/kota, RSUD Provinsi Aceh, dan juga RS Pusat Rujukan di dalam dan luar Aceh.

JAMINAN KESEHATAN ACEH DALAM ANGKA

Grafik. 3.13
Anggaran Dana Jaminan Kesehatan Aceh

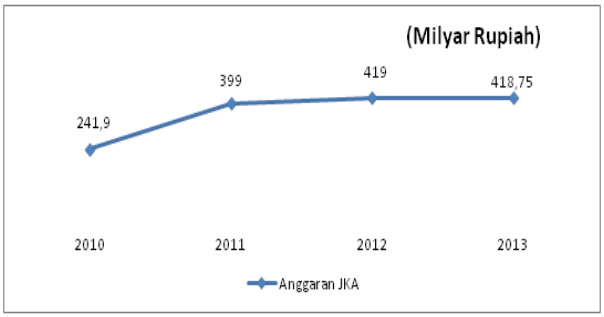

Terhitung mulai 1 Januari 2014 akan ada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun Pemerintah akan tetap melanjutkan Program Kesehatan Aceh (JKA). Pasalnya, JKN yang dananya bersumber dari APBN hanya menanggung asuransi kesehatan untuk 2.170.960 jiwa penduduk Aceh yang miskin dan berpenghasilan rendah. Bagi masyarakat Aceh yang belum masuk dalam program JKN, Askes, dan Jamsostek, juga memiliki asuransi kesehatan yaitu melalui program JKA yang sudah disediakan oleh Pemerintah Aceh untuk tahun 2014 dengan anggaran Rp.402.349.142.000,-

25.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.41 di bawah ini :

Tabel 3.41
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dua Puluh Lima

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
25.1	Cakupan penemuan kasus baru penyakit TB BTA +	60,00	%	47,81	79,68
25.2	Angka kesuksesan pengobatan TB >85	85	%	97,7	114,94
25.3	Angka kejadian (Incident Rate) DBD	45	/100.000 pddk	29	64,44
25.4	Cakupan prevalensi penyakit kusta	1	/100.000 pddk	1,2	120,00
25.5	Cakupan kabupaten/kota yang memasuki tahap eliminasi malaria	7	kab/kota	8	114,29
25.6	Desa siaga aktif	50,00	%	44,18	88,36
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**96,95**

Berdasarkan hasil pengukuran 6 (enam) indikator kinerja dari sasaran strategis *"Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular"* mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **96,95%** atau kategori ***Baik.*** Analisis pencapaian setiap indikator sebagai berikut :

a. Terhadap indikator kinerja *Cakupan penemuan kasus baru penyakit TB BTA+* ditargetkan sebesar 60% (7.667) kasus dan mampu direalisasikan sebanyak 47,81% (3.666) kasus dengan tingkat capaian sebesar 79,68%. Sedangkan indikator *angka kesuksesan pengobatan TB >85* yang ditargetkan sebesar 85% (4.002) mampu direalisasikan sebesar 97,7% (3.910) atau dengan tingkat capaian sebesar 114,94%. Pencapaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja tersebut dilakukan melalui Program

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pelayanan Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular
- Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
- Peningkatan Survelans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
- Peningkatan KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular

Langkah ke depan Pemerintah Aceh untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular yaitu dengan menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana.

b. Indikator kinerja *Angka kejadian (Incident Rate) DBD* ditargetkan sebesar 45/100.000 penduduk dan mampu direalisasikan sebanyak 29/100.000 penduduk dengan tingkat capaian sebesar 136,51%. Keberhasilan terhadap pencapaian ini dikarenakan kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat, baik di kabupaten/kota maupun provinsi dalam menjaga kesehatan lingkungan dan dukungan anggaran di tingkat provinsi sudah memadai.

c. Indikator kinerja *cakupan prevalensi penyakit kusta*, Pemerintah Aceh menargetkan 1/100.000 penduduk, pada

tahun ini terealisasi 1,2/100.000 penduduk dengan tingkat capaian 80%. Belum optimalnya tingkat pencapaian ini dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penyakit kusta karena sebagian besar masyarakat Aceh masih menganggap penyakit kutukan (dalam bahasa Aceh disebut *'budok'*). Sehingga masih ada masyarakat yang enggan melaporkan anggota keluarganya yang terjangkit sering diasingkan tanpa penanganan medis/tenaga kesehatan. Namun dari 23 Kabupaten/kota di Aceh, 4 diantaranya sudah dinyatakan bebas penyakit ini, yaitu Kota Sabang, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabbupaten Subulussalam. Sedangkan daerah endemis kusta dengan prevalensi paling tinggi terdapat di Kabupaten Nagan Raya dengan prevalensi 4/10.000 penduduk.

Upaya Pemerintah Aceh untuk menurunkan angka kesakitan penyakit kusta, kedepan akan diambil kebijakan sebagai berikut :

- Melakukan tindakan preventif dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- Mensosialisasikan upaya pencegahan dan ciri penyakit kusta;

  penyakit kurang (belum mengetahui ciri-ciri penyakit kusta)

d. Indikator kinerja Cakupan kabupaten/kota yang memasuki tahap eliminasi malaria, ditargetkan 7 kabupaten/kota dan mampu direalisasikan 8 kabupaten/kota atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 114,29 %. Upaya ini dilakukan dengan kegiatan fogging pada beberapa kabupaten/kota.

e. Indikator kinerja Desa siaga aktif pada tahun 2013 ditargetkan 50 %, hanya mampu direalisasikan 44,18 % atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 88,36 %. Pencapaian terhadap indikator kinerja ini dilakukan dengan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat dan Program Pengembangan Lingkungan Sehat melalui Kegiatan Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.

26.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatkan Pembangunan yang terintegrasi dengan berbagai Sektor Pembangunan secara Berkelanjutan

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 17 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.42 di bawah ini :

Tabel 3.42
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dua Puluh Enam

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
26.1	Jumlah Dokumen RPJMA 2012-2017	1	Dok	1	100,00
26.2	Jumlah Dokumen RKPA 2013	1	Dok	1	100,00
26.3	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2	Dok	2	100,00
26.4	Jumlah DED RTRW	8	Dok	8	100,00
26.5	Jumlah dokumen perencananaan sarana dan parasarana pengemb. wilayah srategis dan cepat tumbuh yang tersusun	29	Dok	56	193,10
26.6	Jumlah rencana tata ruang wilayah Kab/kota yang tersusun	14	Dok	14	100,00

26.7	Jumlah dokumen Penjabaran Program Pembangunan Aceh yang tersusun	1	Dok	1	100,00
26.8	Jumlah dokumen Penjabaran Program Pembangunan Aceh yang tersusun	1	Dok	1	100,00
26.9	Jumlah dokumen pemanfaatan tata ruang kab/kota yang tersusun	1	Dok	1	100,00
26.10	Jumlah Dokumen hasil pembahasan program/kegiatan TDBHMG Aceh 2013	1	Dok	1	100,00
26.11	Jumlah Publikasi Aceh Dalam Angka 2012	2	Buku	2	100,00
26.12	Jumlah Publikasi PDRB Tahunan/Triwulanan, Ringkasan Eksekutif bulanan Ekonomi Makro dan Sosial, Indikator Ekonomi bulanan	29	Buku	29	100,00
26.13	Jumlah buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat (Inkesmas) Aceh	1	Buku	1	100,00
26.14	Indikator Pembangunan Aceh 2013	1	Buku	1	100,00
26.15	Database Provinsi Aceh 2013	1	Buku	1	100,00
26.16	Sistem Informasi / Database Bidang Infrastruktur	1	Dok	1	100,00
26.17	Jumlah Dokumen hasil penelitian	29	Dok	29	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**105,48**

Berdasarkan hasil pengukuran 17 indikator kinerja dari sasaran strategis *"Meningkatkan Pembangunan yang terintegrasi dengan berbagai Sektor Pembangunan secara Berkelanjutan"* mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **105,48%** % atau kategori **Sangat Baik**.

Untuk mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya melalui program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur Aceh untuk periode tahun 2012-2017 dijabarkan dalam beberapa dokumen perencanaan yang diawali dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2012-2017, RTRW, RKPA, KUA-PPAS dan dokumen penjabaran serta dokumen pendukung pelaksanaan pembangunan lainnya yang ditargetkan untuk dihasilkan pada tahun 2013 semuanya terealisasi dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 105,48% atau dengan kategori **"Sangat Baik"**. Optimalnya tingkat capaian terhadap sasaran strategis ini merupakan komitmen Pemerintah Aceh untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan dari berbagai sektor yang sistematis, terukur dan akuntabel dalam beberapa dokumen perencanaan. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Aceh pada tahun 2013 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.41.127.681.147,- melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam, Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, Program Kerjasama Pembangunan, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Kerjasama Dengan Lembaga-Lembaga Internasional, Program Pengembangan Data/Informasi, Diseminasi dan Informasi Teknologi, Inovasi Daerah, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

27.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah dan Daerah yang Seimbang dan Proporsional Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Potensi Daerah

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 19 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.43 di bawah ini :

Tabel 3.43
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dua Puluh Tujuh

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
27.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	60,63	%	60,11	99,14
27.2	Rasio Jaringan Irigasi	56,56	%	55,45	98,04
27.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	55,13	%	54,15	98,22
27.4	Permukiman layak huni	93,83	%	93,99	100,17
27.5	Panjang jalan	0,0039	Km/orang	0,00385	98,72
27.6	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	40,00	%	35,00	87,50
27.7	Lingkungan Permukiman	2,17	%	2,09	96,31
27.8	Rumah tangga pengguna air bersih	52,00	%	84,33	162,17
27.9	Rumah tangga pengguna listrik	90,00	%	100,00	111,11
27.10	Lingkungan pemukiman kumuh	6,18	%	6,01	97,25
27.11	Rumah layak huni	79,22	%	83,40	105,28
27.12	Panjang pembangunan saluran/gorong-gorong	187,17	meter	188,00	100,44
27.13	Jumlah Jaringan distribusi air bersih yang terbangun	27	desa	27	100,00
27.14	Panjang pembangunan Jalan	51,721	Km	54,289	104,97
27.15	Jumlah Pembangunan Jembatan	14	Unit	14	100,00
27.16	Jumlah sarana dan prasarana gedung pemerintah yang terbangun	2.218	Unit	2.572	115,96
27.17	Jumlah arus penumpang angkutan umum	8.480.783	orang/ tahun	1.640.537	19,34
27.18	Rasio ijin trayek	3.921	armada/ Penduduk	3.805	97,04
27.19	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	62	Unit	62	100,00
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**99,56**

Berdasarkan hasil pengukuran 19 indikator kinerja dari sasaran strategis "*Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah dan Daerah yang Seimbang dan Proporsional Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Potensi Daerah*" mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **99,56%** atau kategori ***Baik.*** Jalan sebagai prasarana transportasi darat sangat berperan dalam memberikan pelayanan pergerakan arus lalu lintas dari dan menuju suatu kawasan. Untuk memberikan pelayanan sebagaimana diharapkan maka kondisi jalan haruslah dalam keadaan baik dan sistem jaringan jalan harus dapat menghubungkan antara kawasan dengan kawasan dalam suatu wilayah secara terintegrasi.

a. Indikator kinerja *Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik* ditargetkan sebesar 60,63% dan mampu direalisasikan sebesar 60,11% dengan persentase tingkat capaian 99,14%. Tingginya tingkat capaian ini didukung oleh program pembangunan jalan dan jembatan yang dijabarkan dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan jalan dalam memenuhi proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik. Pada tahun 2013 panjang jalan yang dibangun/rehab sepanjang 562.336 Meter dengan alokasi anggaran sebesar Rp.664.806.474.991,- yang tersebar di beberapa lokasi dari panjang jalan Provinsi Aceh seluruhnya 1.570,50 Km.

b. Indikator kinerja *Rasio jaringan irigasi* yang ditargetkan sebesar 56,56% mampu direalisasikan sebesar 55,45 dengan tingkat capaian sebesar 98,04%. Pencapaian ini didukung oleh Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Optimalisasi Fungsi

Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun, dan Pembangunan Jaringan Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.236.320.271.975,-. Pembangunan jaringan irigasi sebanyak 51 lokasi yang tersebar di 23 kabupaten/kota.

c. Indikator kinerja *persentase rumah tinggal bersanitasi* ditargetkan sebesar 55,13% dan mampu direalisasikan sebesar 54,15% dengan tingkat capaian sebesar 98,22%. Pencapaian indikator ini mendapat dukungan melalui Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.853.5378.000,- dan Program Pengembangan Lingkungan Sehat melalui penyuluhan-penyuluhan untuk menciptakan lingkungan sehat kepada masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.978.000.000,-.

d. Indikator kinerja *Permukiman layak huni* ditargetkan sebesar 93,83% dan mampu direalisasikan sebesar 93,99% atau dengan tingkat capaian sebesar 100,17%. Permukiman layak huni di Aceh dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini terbukti dari menurunnya jumlah pemukiman kumuh yang ada di Aceh. Terdapat beberapa program yang mendukung langsung pencapaian indikator ini yaitu :
   - Program Perencanaan Tata Ruang dengan angagran sebesar Rp.8.498.900.000,-
   - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan anggaran sebesar Rp. 62.437.382.133,-
   - Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong dengan anggaran sebesar Rp. 74.867.126.168,-
   - Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 210.265.384.581,-

- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah untuk meningkatkan kualitas air bersih dengan anggaran sebesar Rp. 52.977.382.133,-.
- Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan dari Pemerintah Aceh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.853.5378.000,-

e. Indikator kinerja *panjang jalan* ditargetkan sepanjang 0,0039 Km/Orang dan mampu direalisasikan sepanjang 0,00385 Km/Orang dengan persentase tingkat capaian 98,72%. Dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian dan distribusi pangan masyarakat, hingga tahun 2013 perbandingan panjang dan volume jalan belum sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk Aceh yang berjumlah 4.494.410 jiwa. Dari capaian indikator panjang jalan ini terlihat bahwa baru 98,72% kebutuhan jalan yang terpenuhi. Tingginya laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu aspek yang menyebabkan indikator ini belum mencapai sesuai target yang ditetapkan.

Upaya Pemerintah Aceh kedepan untuk menstabilitaskan perekonomian, ditempuh melalui program perencanaan pembangunan jalan dan jembatan serta program rehabilitasi/ perbaikan jalan dan jembatan, peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

f. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik ditargetkan sebesar 40% dan mampu direalisasikan sebesar 35% atau dengan tingkat capaian sebesar 78,50%. Upaya peningkatan terhadap indikator ini ditempuh melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan

lainnya dan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan alokasi anggaran Rp.46.017.984.000,-.

g. Indikator kinerja *Lingkungan Permukiman* ditargetkan sebesar 2,17% dengan realisasi sebesar 2,09% atau persentase tingkat capaian sebesar 96,31%. Upaya peningkatan meningkatkan kesehatan masyarakat dari tahun ke tahun menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh dengan menurunkan angka pemukiman kumuh penduduk dan melakukan penataan sarana serta prasarana permukiman. Pada tahun 2013 melalui program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan dari Pemerintah Aceh melalui pelaksanaan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.853.5378.000,- telah mampu ditekan 0,17 % lingkungan kumuh penduduk dari target yang telah ditetapkan. Melalui Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Pemerintah Aceh melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk menciptakan lingkungan sehat dengan anggaran sebesar Rp.978.000.000,-. Dukungan sarana prasarana untuk menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni juga terus ditinggatkan kualitasnya antara lain dengan menyediakan taman bermain, memperbaiki sarana drainase, membangun jalan lingkungan, menyediakan sarana air bersih dan lampu penerangan yang cukup. Program-program lainnya yang mendukung pencapaian indikator ini sebegai berikut :

- Program Perencanaan Tata Ruang dengan angagran sebesar Rp.8.498.900.000,-
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan anggaran sebesar Rp. 62.437.382.133,-

- Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong dengan anggaran sebesar Rp. 74.867.126.168,-
- Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 210.265.384.581,-
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah untuk meningkatkan kualitas air bersih dengan anggaran sebesar Rp. 52.977.382.133,-
- Program Pengembangan Perumahan melalui kegiatan Pengembangan Rumah Sehat Sederhana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.298.094.000.000,-

h. Indikator kinerja *Rumah Tangga Pengguna Air Bersih* ditargetkan sebesar 52% dan mampu direalisasikan sebesar 84,33% atau dengan tingkat capaian sebesar 162,17%. Optimalnya tingkat capaian indikator ini didukung oleh program pemanfaatan dan Sumber Daya Geologi dan Mineral yang dijabarkan dalam beebrapa kegiatan, antara lain Pemanfaatan Sumber Daya Hidrologi, Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Tanah dan Air Permukaan. Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya target kinerja ini sebesar Rp. 14.164.496.000,-. Pelaksanan program ini ditujukan pada 79 desa yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Aceh.

i. Indikator kinerja *Rumah Tangga Pengguna Listrik* ditargetkan sebesar 90% dan mampu direalisasikan sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 111,11%. Tingginya tingkat capaian indikator ini didukung oleh Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan kegiatan Pengembangan dan Pengawasan Energi Ketenagalistrikan, Pengembangan Ketenagalistrikan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.44.578.665.000,-. Pemasangan listrik tersebut di fokuskan pada rumah tangga kaum dhuafa sebanyak 1.630 unit yang tersebar di Provinsi Aceh.

j. Indikator kinerja *Lingkungan Permukiman Kumuh* ditargetkan sebesar 6,18% dan mampu direalisasikan sebesar 6,01% dengan tingkat capaian sebesar 102,75%. Optimalnya tingkat capaian ini disebabkan adanya program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan dari Pemerintah Aceh melalui pelaksanaan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.853.5378.000,-.

k. Indikator kinerja *Rumah Layak Huni*, pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 79,22% dan direalisasikan sebesar 83,40% dengan persentase tingkat capaian sebesar 105,28%. Pemerintah Aceh sejak tahun 2009 telah membangun rumah layak huni untuk masyarakat yang tergolong fakir dan miskin sebagai bagian dari usaha pengentasan kemiskinan. Rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal serta mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Pembangunan perumahan dan permukiman jika dilakukan secara benar akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan

wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan efek multiplier terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Sejalan dengan kebijakan nasional, pembangunan perumahan dan permukiman lebih diarahkan pada pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya, dan secara lebih khusus meningkatkan aksesibiltas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, baik melalui penyediaan Rumah Susun atau pemberian bantuan stimulan untuk menuju rumah layak huni, dan perbaikan sarana dan prasarana umum lingkungan agar tidak mewujudkan permukiman kumuh.

Dalam tahun Angaran 2013 melalui Program Pengembangan Perumahan, Pemerintah Aceh telah membangun sebanyak 4.8.48 unit rumah masyarakat kaum duafa yang berlokasi pada 22 Kabupaten/Kota dan pemindahan rumah dan pematangan lahan relokasi penduduk Lae ikan Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 74 Unit melalui kegiatan Pengembangan Rumah Sehat Sederhana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.298.094.000.000,-

l. Indikator kinerja *Panjang pembangunan saluran/gorong-gorong* ditargetkan 187,18 Meter dan realisasi 188 Meter dengan tingkat capaian sebesar 100,44%. Keberhasilan ini diwujudkan oleh Pemerintah Aceh melalui Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dengan melaksanakan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong sepanjang 187.168 meter.

m. Jumlah Jaringan distribusi air bersih yang terbangun target 27 Desa realisasi 27 desa tingkat capaian 100%. Optimalnya pencapiaan kinerja ini didukung oleh program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan Fasilitasi pembinaan teknik pengelolaan air minum. Alokasi anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kualitas air bersih sebesar Rp. 52.977.382.133,-

n. Indikator kinerja *Panjang pembangunan jalan* ditargetkan sepanjang 51,72 Km dan mampu direalisasikan sebesar 54,29 Km dengan persentase tingkat capaian sebesar 104,97%. Tingginya tingkat capaian indikator kinerja ini diakibatkan kelebihan sisa tender dan lebar volume jalan yang dibangun karena harus ada pembebasan lahan masyarakat tidak mencukupi alokasi anggaran, sehingga di alihkan pembangunan jalan dengan penambahan panjang jalan sebesar 2,57 km. Kinerja program yang mendukung panjang pembangunan jalan melalui program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan didukung 4 kegiatan yaitu : Perencanaan pembangunan jalan, Pembangunan Jalan, Pengawasan teknis jalan dan jembatan, dan Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Besaran pembiayaan untuk mendukung pencapaian kinerja ini sebesar Rp.899.800.565.701,-.

o. Indikator *Panjang pembangunan jembatan* ditargetkan sebanyak 14 unit jembatan dan mampu direalisasikan sesuai rencana atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini didukung oleh program pembangunan jalan dan jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.301.784.357.500,- yang pelaksanaannya melaluim kegiatan Perencanaan

pembangunan jembatan, Pembangunan Jembatan, Pengawasan teknis jalan dan jembatan, dan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

p. Indikator kinerja *Jumlah sarana dan prasarana gedung pemerintah yang terbangun* ditargetkan sebanyak 2.218 unit dan mampu direalisasikan sebanyak 2.572 unit atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 115,96%. Keberhasilan pencapaian indikator melalui dukungan kegiatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung dengan besran alokasi anggaran sebesar Rp.630.643.843.400,- pada Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan. Adapun insfrastruktur yang telah dibangun pada tahun 2013 antara lain terdiri dari Pembangunan Mesjid dan Menasah, Pembangunan Asrama, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan, serta Pembangunan gedung pemerintah yang tersebar baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

q. Indikator kinerja *jumlah arus penumpang angkutan umum* ditargetkan sebanyak 8.480.783 orang/tahun dan hanya mampu direalisasikan sebanyak 1.640.537 orang/tahun dengan tingkat capaian sebesar 19,34%. Indikator ini berhubungan langsung dengan indikator rasio ijin trayek dengan didukungan 3 Program yang langsung berkontribusi terhadap pencapaian kinerja pada indikator ini yaitu Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.894.066.000,- dengan kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya, Penciptaan Pelayanan, Cepat, Tepat, murah dan mudah, Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan, Program

Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas dengan alokasi anggaran sebesar 13.899.130.000,-, dan Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.885.025.000,-

r. Indikator kinerja *Rasio Ijin Trayek* ditargetkan sebanyak 3.921 armada/penduduk dan mampu direalisasikan sebanyak 3.805 armada/penduduk dengan tingkat capaian sebesar 97,04%. Upaya pemenuhan dan pelayanan transportasi masyarakat dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan walaupun izin trayek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2013 belum mencapai target yang ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana trasportasi terus diperketat sebagai upaya untuk menekan jumlah angka kecelakaan di Aceh. Terdapat beberapa program yang mendukung langsung pencapaian indikator ini antara lain :

- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.894.066.000,- dengan kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya, Penciptaan Pelayanan, Cepat, Tepat, murah dan mudah, Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan
- Program Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas dengan alokasi anggaran sebesar 13.899.130.000,-
- Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.885.025.000,-

s. Indikator kinerja Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis ditargetkan sebanyak 62 unit dan mampu direalisasikan sesuai dengan target atau persentase tingkat capaian

sebesar 100%. Adapun pembangunan pelabuhan laut, Pelabuhan Penyeberangan, Bandar Udara, Terminal Type A, Terminal Type B, dan Terminal Type C sebanyak 62 unit posisi 2013, yaitu :

- *Terminal Type A;* Banda Aceh, Sigli, Lhokseumawe, Langsa, Meulaboh
- *Terminal Type B;* Bireuen, Nagan Raya, Lhoksukon, Calang, Panton Labu, Subulussalam, Kuala Simpang, Kuta Cane, Takengon
- *Terminal Type C;* Sare Aceh Besar, Pondok Baru, Bereunuen, Pulo Sarok, Jeunib, Sinabang, Matang, Tapaktuan, Geudong, Kota Fajar, Idie Rayek, Blang Pidie, Silihnara, Lawe Pakam, Peugasing, Bintang, Ujong Dah Gayo Lues
- *Pelabuhan Penyeberangan;* Ulheue Lheue, Singkil, Balohan, Sabang, Pulo Banyak, Lamteng – Aceh Besar, Labuhan Haji, Meulaboh, Sinabang,
- *Pelabuhan Laut;* Malahayati, Susoh, Lhokseumawe, Tapaktuan, Kuala Langsa, Singkil, Meulaboh, Sinabang, Sabang, Idie, Calan.
- *Bandar Udara;* Sultan Iskandar Muda (Blang Bintang), Cut Nyak Dhien (Nagan Raya), Kuala Bate (Blang Pidie), Cut Ali (Aceh Selatan), Lasikin (Sinabang), Maimun Saleh (Sabang), Rembele (Bener Meriah), Malikulsaleh (Aceh Utara), Point A (Aceh Utara), Alas lauser (Aceh Tenggara), Hamzah Fansyuri (Aceh Singkil), Blang Kejeren (Gayo Lues).

28.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkualitas

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 13 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.44 di bawah ini :

Tabel 3.44
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dua Puluh Delapan

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
28.1	Persentase penanganan sampah	75,00	%	60,87	81,16
28.2	Jumlah peralatan pendukung dan bangunan pengolahan sampah yang terbangun	48	Unit	48	100,00
28.3	Persentase Penduduk berakses air minum	40,00	%	38,59	96,48
28.4	Pencemaran status mutu air	47,00	%	36,67	78,02
28.5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	79,00	%	79,00	100,00
28.6	Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	79,00	%	35,48	44,91
28.7	Jumlah perusahaan yang tertib mengelola lingkungan	60	perusahaan	13	21,67
28.8	Jumlah kasus perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	4	Kasus	9	225,00
28.9	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	276	Ha	637	230,80
28.10	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat	224.745	Jiwa	224.745	100,00
28.11	Jumlah Escape Building yang dibangun	4	Unit	4	100,00
28.12	Panjang Pengaman Tebing Sungai yang dibangun	700	Meter	700	100,00
28.13	Jumlah jenis Diseminasi Informasi Lingkungan	12	Jenis	14	116,67
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**107,28**

Berdasarkan hasil pengukuran 13 (tiga belas) indikator kinerja dari sasaran strategis "*Meningkatnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat terhadap Bencana dan Pengelolaan*

Lingkungan yang Berkualitas" mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **107,28%** atau kategori ***Sangat Baik.*** Beberapa pencapaian terhadap indikator kinerja Pemerintah Aceh dari sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut :

a. Indikator kinerja *Persentase Penanganan Sampah*, ditargetkan sebesar 75% dan mampu direalisasikan sebesar 60,87% atau dengan tingkat capaian sebesar 81,16%. Penanganan masalah lingkungan hidup juga terus diupayakan oleh Pemerintah Aceh. Salah satunya melalui penanganan sampah. Pencapaian yang belum mencapai target tersebut salah satunya disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami lingkungan. Penanganan sampah tersebut membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Aceh telah berupaya secara maksimal terhadap masalah sampah yang merupakan isu nasional yang salah satunya melalui penempatan TPA terpadu.

b. Indikator kinerja *Jumlah peralatan pendukung dan bangunan pengolahan sampah yang terbangun* ditargetkan sebanyak 48 unit dan mampu direalisasikan sesuai target atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Optimalnya tingkat capaian indikator kinerja ini di dukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan melalui kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan kegiatan Pengembangan Desa Model dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.693.481.000,-

c. Indikator kinerja *Persentase penduduk berakses air minum*, ditargetkan sebesar 40% dan mampu direalisasikan sebesar 38,59% dengan tingkat capaian sebesar 96,48%. Upaya yang dilakukan melalui Program Pemanfaatan dan Sumberdaya

Geologi dan Mineral yang dijabarkan dengan beberapa kegiatan antara lain Pemanfaatan Sumberdaya Hidrogeologi; Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Tanah dan Air Permukaan; dan Survey Geologi dan Sumberdaya Mineral dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.250.336.000,-

d. Indikator kinerja *Pencemaran status mutu air*, ditargetkan sebesar 47,00% dan hanya mampu direalisasikan sebesar 6,67% atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 14,19%. Rendahnya tingkat pencapaian terhadap indikator kinerja ini disebabkan oleh adanya beberapa perusahaan/ instansi/ jasa/ usaha kecil yang mengelola limbah/barang buangan berbahaya belum memenuhi kaidah lingkungan, sehingga limbah hasil pengolahan tersebut di buang pada tempat-tempat sumber mata air mengalir (sungai).

e. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, ditargetkan sebesar 75% dan mampu direalisasikan sebesar 75% atau dengan tingkat capaian sebesar 100%. Optimalnya pencapaian kinerja indikator ini merupakan komitmen Pemerintah Aceh dalam menjaga kelestarian lingkungan dilakukan dengan pembangun tanggul pengaman, bronjong, pengaman tebing sungai, dan normalisasi sungai dibeberapa kawasan strategis dan rawan longsor, untuk menjaga cadangan sumber air.

f. Indikator kinerja *Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal*, ditargetkan sebesar 79% dan hanya mampu direalisasikan sebesar 35,48% atau dengan tingkat capaian sebesar 44,91%. Belum optimalnya tingkat capaian

indikator kinerja ini disebabkan masih banyaknya jumlah perusahaan wajib amdal yang belum diawasi terhadap pelaksanaan produksi.

g. Indikator kinerja jumlah perusahaah yang tertib mengelola lingkungan, ditargetkan sebanyak 60 perusahaan yang tertib mengelola lingkungan, dan hanya dapat direalisasikan sebanyak 13 perusahaan dengan persentase tingkat capaian sebesar 21,67%. Rendahnya capaian ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu monitoring pengelolaan B3 dan Limbah B3 pada industri di 9 Kabupaten/Kota, meliputi :
   - Bidang usaha minyak dan gas bumi (unit pembekalan dan pemasaran) PT. Pertamina (Persero) unit PPDN I Medan-Depot BBM Lhokseumawe
   - Bidang Usaha Kelistrikan Tenaga Diesel : PLTD Seuneubok Kabupaten Aceh Barat, PLTD Langsa Lama di Kota Langsa, PLTD Desa Cot Abeuk di Kota Sabang, PLTD Setia di Kabupaten Aceh Barat Daya;
   - Bidang Usaha Industri Pupuk Urea : PT. Pupuk Iskandar Muda (Persero) Kabupaten Aceh Utara;
   - Bidang Usaha Pabrik Plastik di Desa Lamgeu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

   Pemantauan terhadap pengelolaan usaha Non B3 berdasarkan surat pengaduan masyarakat tentang dugaan operasional pabrik daur ulang limbah plastik tidak memiliki izin.
   - Sosialisasi Hasil pemantauan Limbah Cair di Kab. A. Barat yang dilakukan di Tiga Lokasi yaitu Kr. Peurambe dan PLTD Seuneubok;

- Sosialisasi Hasil Pemantauan Limbah B3 di Kota Lhokseumawe yang dilakukan di Depot BBm kota Lhokseumawe;
- Sosialisasi pada masyarakat tentang limbah-limbah perusahaan provit di kota Lhokseumawe.

h. Indikator kinerja *Jumlah kasus perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti*, ditargetkan sebanyak 4 kasus dan mampu direalisasikan sebanyak 9 kasus dengan persentase tingkat capaian sebesar 225,00%. Tingginya tingakt capaian indikator kinerja ini merupakan upaya Pemerintah Aceh dalam menangani dampak kerusakan lingkungan hidup. Keberhasilan ini diwujudkan Pemerintah Aceh melalui pelaksanaan Kegiatan Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan dengan jumlah dukungan anggaran sebesar Rp. 729.400.000,-. Adapun jumlah kasus yang ditindaklanjuti Pemerintah Aceh pada tahun 2013 adalah kasus lhong setia mining, penertiban galian C, serta penambangan emas liar di Tangse dan Geumpang Kabupaten Pidie dan Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya.

i. Indikator kinerja *Rehabilitasi hutan dan lahan kritis*, yang ditargetkan seluas 276 Hektar mampu direalisasikan seluas 637 hektar atau dengan tingkat capaian sebesar 230,80%. berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh bahwa Pemerintahan Aceh mempunyai kewajiban mengelola lingkungan hidup secara menyeluruh dengan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya termasuk kawasan hutan. Kerusakan hutan dan lahan diperkirakan mencapai 2,83 juta able t/tahunnya, akibat kerusakan hutan dan lahan tersebut terjadi pada berbagai

fungsi dan jenis hutan termasuk hutan bakau dan pantai (mangrove). Bencana Tsunami Aceh tahun 2004 juga menyebabkan hampir 80% ekositem wilayah pesisir dan habitat mangrove mengalami kerusakan.

Dalam tahun 2013 Pemerintah Aceh menargetkan, hutan dan lahan kritis seluas 276 Ha yang akan direhabilitasi. Sesuai dengan karakteristik demografi wilayah Aceh, Pemerintah Aceh telah merehabilitasi seluas 637 Ha hutan dan lahan kritis yang harus difokuskan untuk memperbaiki kualitas dan ekosistem hutan mangrove. Salah satu upaya pemulihan dan peningkatan kemampuan fungsi dan produktifitas hutan dan lahan dimaksud diarahkan untuk penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor dan kerusakan pantai. Hal ini juga merupakan gerakan moral yang dilandasi oleh semangat nasioanal, bertujuan untuk mengembangkan budaya rehabilitasi hutan dan lahan serta menjaga spesies flora dan fauna yang mendiami dan berkembang biak.

Rehabilitasi hutan dan lahan di Aceh masih perlu perhatian dan keseriusan dalam pelaksanaanya. Selain itu, berbagai upaya yang dilakukan masyarakat untuk menanam di lahan kritis dan lahan tidak produktif di dalam atau di luar kawasan hutan, perlu didukung baik dari sisi teknis maupun anggaran.

Konsepsi dasar rehabilitasi lahan kritis di Aceh yang tepat dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip pembangungan berkelanjutan *(sustainable development)* dan model pendekatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Teknik rehabilitasi lahan dikawasan lindung yang terdiri dari kawasan hutan dan kawasan non hutan dilakukan melalui penghijauan untuk memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi

secara optimal, sedangkan sosial ekonomi dilakukan melalui kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dilakukan melalui pengembangan wanafarma, ekowisata, agroforestry di kawasan hutan.

j. Indikator kinerja *jumlah korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat*, ditargetkan sebanyak 224.745 jiwa dan mampu direalisasikan sesuai dengan target dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Optimalnya tingkat capaian indikator kinerja ini merupakan langkah nyata Pemerintah Aceh untuk siaga dan tanggap terhadap bencana. Upaya yang dilakukan dengan penyediaan dana bagi masa tanggap darurat bencana.

k. Indikator kinerja *Jumlah Escape Building yang dibangun,* ditargetkan sebanyak 4 unit dan mampu direalisasikan sebanyak 4 unit atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh telah membuat ”luka” berkepanjangan bagi masyarakat Aceh. Sampai dengan saat ini masyarakat masih merasakan trauma terhadap bencana yang terus melanda bumi Serambi Mekkah. Dalam upaya meminimalisir dampak yang ditimbulkan bencana, Pemerintah Aceh telah menargetkan pembangunan escape building sebanyak 4 unit dan mampu direalisasikan seluruhnya dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Pembangunan escape building tersebut dilaksanakan di beberapa wilayah yang sudah termasuk dalam master plan Peta Rawan Bencana.

l. Indikator kinerja *Panjang pengaman tebing sungai yang dibangun*, yang ditargetkan sepanjang 700 meter mampu direalisasikan sepanjang 700 meter atau dengan tingkat capaian sebesar 100%. Optimlanya tingkat capaian indikator ini merupakan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus mengurangi dampak-dampak yang timbul akibat bencana. Tingkat pencapaian kinerja ini diwujudkan oleh Pemerintah Aceh melalui pelaksanaan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana melalui kegiatan Pengurangan Risiko Bencana dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 13.519.825.000,-. Adapun upayan preventif yang dilaksanakan Pemerintah Aceh diantaranya pembangunan tebing sungai Gp. Kuala Panteu Blang Malo Kec. Tangse dan Tebing Sungai Krueng Rukoh Kec. Titeu Kab. Pidie yang disinyalir sebagai wilayah rawan longsor.

m. Indikator kinerja *Jumlah jenis diseminasi Informasi lingkungan*, yang ditargetkan sebanyak 12 jenis mampu direalisasikan sebanyak 14 jenis atau dengan tingkat capaian sebesar 116,67%. Guna meningkatkan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup, maka kegiatan diseminasi yang dilakukan berupa :

- Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yaitu ada 3 (tiga) jenis diseminasi di sekolah, kantor dan kampus ramha lingkungan.
- Pengembangan data dan informasi lingkungan yang berbentukkegiatan akses informasi lingkungan hidup kepada masyarakat berupa :SLHD, Profil lingkungan, Pameran, Peringatan hari-hari besar lingkungan, baliho lingkungan, buletin, jurnal, leaflet/brosur, publikasi media cetak dan elektronik.

29.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Aceh

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 10 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.45 di bawah ini :

Tabel 3.45
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dua Puluh Sembilan

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
29.1	Jumlah Ketersediaan cadangan pangan utama	150	Ton	150	100,00
29.2	Pola Konsumsi Pangan Harapan	80,60	Skor PPH	69,80	86,60
29.3	Jumlah Daerah Rawan Pangan	825	Klp/Desa	218	26,42
29.4	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang diberdayakan	15	LPM	15	100,00
29.5	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang diberdayakan	35	Desa	28	80,00
29.6	Nilai Tukar Nelayan	109,35	NTN	101,22	92,57
29.7	Nilai tukar petani	104,50	NTP	98,15	93,92
29.8	Nilai tukar petani Tanaman Pangan	113,93	NTP	109,02	95,69
29.9	Nilai tukar petani Tanaman Hortikultura	103,5	NTP	98,07	94,75
29.10	Kelembagaan Pangan Masyarakat				
	a. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	75	GAPOKTAN	73	97,33
	b. Lumbung Pangan Masyarakat	102	Kelompok	73	71,57
	c. Desa Mandiri Pangan	207	Desa	179	86,47
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**85,44**

Berdasarkan hasil pengukuran 10 (sepuluh) indikator kinerja dari sasaran strategis *"Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Aceh"* mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **85,44%** atau kategori ***Baik***. Beberapa capaian terhadap indikator kinerja sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut :

a. Indikator kinerja *Jumlah ketersediaan cadangan pangan utama* ditargetkan sebanyak 150 ton dengan realisasi sebesar 150 ton atau persentase tingkat capaian sebesar 100%. Tingkat capaian

terhadap indikator kinerja ini merupakan wujud dari pelaksanaan program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dijabarkan melalui kegiatan pengadaan cadangan pangan pemerintah dengan dialokasikannya anggaran sebesar Rp.1.162.800.000,-. Pendistribusian bantuan cadangan pangan bagi daerah rawan pangan disalurkan pada 10 wilayah dalam provinsi Aceh, yang dikhususkan bagi daerah-daerah rawan pangan kronis.

b. Indikator kinerja *Pola konsumsi pangan harapan* ditargetkan sebesar 80,60 skor PPH dan realisasi sebesar 69,80 skor PPH atau tingkat capaian sebesar 86,60%. Tingkat capaian indikator kinerja ini dilakukan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan, yang dijabarkan dalam kegiatan Peningkatan Mutu dan keamanan pangan, untuk pencapaian indikator kinerja ini pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp.400.000.000,-, upaya bertujuan agar produk pangan yang sehat dan aman dapat dikonsumsi bagi masyarakat.

   Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan: (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar

daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh; (4) Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam serta (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

c. Indikator kinerja *Jumlah daerah rawan pangan* ditargetkan sebanyak 825 Klp/desa dan hanya mampu direalisasikan sebanyak 218 Klp/Desa dengan tingkat capaian sebesar 26,42%. Upaya pencapaian terhadap indikator kinerja dilakukan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan melalui kegiatan penanganan daerah rawan pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.743.640.000,- adapun kendala dalam pencapaian terhadap indikator ini antara lain :
   - Pelaksanaan SKPG belum berjalan secara optimal dan hasil deteksi dini dari SKPG kurang ditindaklanjuti.
   - PDRP termasuk dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan & bencana, dimana mekanisme penyaluran bansos dalam bentuk barang lewat pihak ketiga
   - Berdasarkan hasil evaluasi bahwa ada kabupaten/kota yang mengalami kejadian bencana tidak ditangani melalui pencairan bansos PDRP, penyebabnya : a) tidak adanya TIM Investigasi, b) Dana Investigasi daerah yang terbatas, dan c) Informasi yang tidak sampai/terlambat, karena sangat jauhnya lokasi bencana.
   - Jarak tempuh lokasi KPPN untuk TP kegiatan Desa Mapan yang di Provinsi sehingga menyulitkan proses pencairan dana apabila terjadi kesalahan.

- Belum semua kabupaten/kota yang menggunakan aplikasi Simonev;

Upaya kedepan yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam hal penanganan daerah rawan pangan yaitu :

- Fasilitasi terhadap peningkatan produksi dan ketersediaan pangan
- Distribusi dan aksesibilitas pangan
- Perbaikan konsumsi pangan
- Memberdayakan kelompok-kelompok rawan pangan
- Melakukan identifikasi dan verifikasi daerah rawan pangan

d. Indikator kinerja *Jumlah lumbung pangan masyarakat yang diberdayakan* ditargetkan sebanyak 15 LPM dan mampu direalisasi sebanyak 15 LPM dengan tingkat capaian sebesar 100%. Optimalnya pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui program peningkatan ketahanan pangan, yang dilakukan melalui pembangunan lumbung pangan bagi masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 742.000.000,- Pemberdayaan terhadap Lumbung pangan dilakukan dengan cara pengisian terhadap 13 unit Lumbung Pangan Masyarakat tahap Pengembangan, bantuan lumbung pangan bagi 2 kelompok masyarakat, diversifikasi lumbung pangan, dan pembangunan baru Lumbung Pangan di Kabupaten Aceh Besar.

e. Indikator kinerja *Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan* yang ditargetkan sebanyak 35 Desa dan mampu direalisasikan sebanyak 28 Desa dengan tingkat capaian sebesar 80%. Pencapaian terhadap indikator kinerja ini dilakukan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan,

yang dijabarkan dalam kegiatan pengembangan desa mandiri pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.756.802.000,- upaya dalam rangka pengembangan daerah mandiri pangan yaitu melalui penguatan modal kelompok (replikasi), bantuan alat pengolahan pangan, bantuan desa mapan tahap penumbuhan dan pembuatan lumbung pangan pola padat karya bagi desa mandiri pangan.

Pengembangan Desa Mandiri Pangan, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor. Untuk desa yang telah dibina telah dilakukan replikasi untuk membina 35 desa rawan pangan di sekitarnya melalui gerakan sekolah lapangan (SL) desa mandiri pangan. Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam rangka pengembangan daerah mandiri pangan yaitu:

- Dilakukannya sosialisasi terhadap desa baru
- Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa
- Pengembangan sistem ketahanan pangan
- Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pedesaan.

f. Indikator kinerja *Nilai tukar nelayan,* ditargetkan sebesar 109,35 NTN dan mampu direalisasikan sebesar 101,22 NTN dengan tingkat capaian sebesar 92,57%. Tingginya capaian kinerja iini disebabkan harga yang diterima nelayan Aceh mengalami kenaikan dari tahun senelumnya. Sejumlah komoditi utama yang mengalami kenaikan tersebut diantaranya

ikan tongkol, iken teri, cumi-cumi dan beberapa komoditi ungggulan lainnya. Sementara sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan yang harus di bayar nelayan adalah bahan bakar berupa solar. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap, dan Pengadaan Alat Bantu Operasional Penangkapan Ikan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2013.

g. Indikator kinerja *Nilai tukar petani*, ditargetkan sebesar 104,50 NTP dan mampu direalisasikan sebesa 98,15% atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 93,92%. *Indikator kinerja nilai tukar petani tanaman pangan* ditargetkan sebesar 113,93 NTP dan mampu direalisasikan sebesar 109,02 NTP dengan tingkat capaian sebesar 95,69%. *Indikator kinerja Nilai Tukar Petani Tanaman Hortikultura* ditargetkan sebesa103,5 NTP dan mampu direalisasikan sebesar 98,07% dengan tingkat capaian sebesar 94,75%.

   Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Nilai tukar petani ini digunakan sebagai salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Pengumpulan data dan perhitungan NTP dilakukan oleh BPS. Secara umum NTP menghasilkan 3 pengertian :

   - NTP > 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami surplus. Harga produksi naik

lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya.

- NTP = 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/ penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- NTP < 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami peningkatan. Kenaikan harga produksi petani lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

Dari capaian tahun 2013, realisasi yang diperoleh baik untuk NTP tanaman pangan maupun NTP tanaman hortikultura tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian capaian NTP Tanaman Pangan mempunyai nilai 109,02 atau diatas 100 yang berarti petani masih memperoleh keuntungan dengan usaha tani tanaman pangan yang diusahakannya, sedangkan NTP tanaman hortikultura mempunyai nilai 98,07 atau berada di bawah nilai 100 yang berarti biaya produksi yang dikeluarkan petani lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperolehnya. Komoditi Hortikuktura kurang diminati petani karena dianggap komoditi yang kurang ekonomis atau kurang memberikan keuntungan.

Meningkatnya pendapatan petani yang merupakan sasaran strategis yang digunakan pada tahun 2013 dengan tujuan untuk

mengetahui gambaran kesejahteraan petani di provinsi Aceh, dan gambaran tersebut tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai wujud dari pencapaian sasaran strategis meningkatnya pendapatan petani.

30.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.46 di bawah ini :

Tabel 3.46
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tiga Puluh

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
30.1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan :				
	a. Padi	1.996.717	Ton	1.956.847	98,00
	b. Jagung	156.243	Ton	167.173	107,00
	c. Kedelai	95.950	Ton	45.018	46,92
	d. Kc. Tanah	7.003	Ton	3.844	54,89
	e. Kc. Hijau	1.464	Ton	946	64,62
	f. Ubi Kayu	38.626	Ton	34.613	89,61
	g. Ubi Jalar	14.184	Ton	11.460	80,80
30.2	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan :				
	a. Padi	48,02	Ku/Ha	46,68	97,21
	b. Jagung	38,2	Ku/Ha	38,48	100,73
	c. Kedelai	14,11	Ku/Ha	14,72	104,32
	d. Kc. Tanah	12,2	Ku/Ha	12,38	101,48
	e. Kc. Hijau	10,59	Ku/Ha	10,53	99,43
	f. Ubi Kayu	128,62	Ku/Ha	127,49	99,12
	g. Ubi Jalar	105,77	Ku/Ha	106,01	100,23
30.3	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura :				
	a. Bawang Merah	2.850	Ton	1.071	37,58
	b. Kentang	8.815	Ton	2.529	28,69
	c. Cabe Besar	32.871	Ton	20.339	61,88
	d. Cabe Rawit	19.538	Ton	16.187	82,85
	e. Pisang	33.858	Ton	12.813	37,84
	f. Jeruk Besar	10.722	Ton	7.508	70,02
	g. Durian	10.378	Ton	2.544	24,51
	h. Rambutan	19.036	Ton	2.842	14,93

30.4	Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura				
	a. Bawang Merah	54,26	Ku/Ha	49,82	91,82
	b. Kentang	144	Ku/Ha	155	107,47
	c. Cabe Besar	103,88	Ku/Ha	103,66	99,79
	d. Cabe Rawit	121,28	Ku/Ha	125,19	103,22
	e. Pisang	610	Ku/Ha	146,6	24,03
	f. Jeruk Besar	373,81	Ku/Ha	113,93	30,48
	g. Durian	126,28	Ku/Ha	38,14	30,20
	h. Rambutan	60,27	Ku/Ha	32,26	53,53
30.5	Produksi Daging per tahun	30.002.424	Kg	31.402.476	104,67
30.6	Produksi telur pertahun	15.840.826	Kg	16.904.852	106,72
30.7	Populasi ternak pertahun	17.773.543	ekor	17.983.565	101,18
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**74,42**

Berdasarkan hasil pengukuran 7 (tujuh) indikator kinerja dari sasaran strategis *"Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan"* mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **74,42%** atau kategori ***Cukup.*** beberapa capaian indikator kinerja dari sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut :

a. Indikator kinerja *Jumlah produksi tanaman pangan* :

Komoditi tanaman padi merupakan komoditi andalan yang menguntungkan dan harapan hidup masyarakat petani, perkiraan margin keuntungan per Ha yang dapat diperoleh petani adalah antara Rp.9.000.000,- s/d Rp. 14.000.000,- hal ini mendorong petani untuk lebih meningkatkan produksi padi mereka. Pemerintah Daerah berusaha mencapai target produksi komoditi padi yang telah direncanakan dengan cara memberikan bantuan berupa saprodi seperti benih, pupuk, dan obat-obatan serta berbagai pelatihan kepada petani, selain itu hal yang paling penting dalam upaya pencapian target produksi adalah adanya dukungan infrastruktur, yang telah dilakukan melalui kegiatan pembangunan/perbaikan berbagai infrastruktur pertanian oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun

ini, jumlah produksi komoditi Padi belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini lebih disebabkan antara lain karena realisasi benih bersubsidi oleh PSO (Public Service Obligation) tidak terlaksana atau dibawah 15%, kekeringan/banjir (Puso 830 Ha: Banjir 469 Ha dan kekeringan 370 Ha), adanya perbaikan irigasi pada Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Utara sehingga tidak dapat dilakukan penanaman seluas 30.000 Ha di musim gadu, serta adanya alih fungsi lahan seperti lahan sawah yang ditanami jagung. Namun demikian angka produksi komoditi padi tahun 2013 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2012 (dari 1.788.738 ton menjadi 1.956.847 ton) atau meningkat sebesar 9,40%. Kenaikan tersebut disebabkan karena alasan ekonomis yaitu harga pasar gabah yang cukup baik di Aceh memotivasi masyarakat untuk bercocok tanam padi (motivasi ekonomi), selain itu adanya perbaikan infrastruktur berupa pembangunan dan rehabilitasi jitut, optimasi lahan, dan adanya dukungan program di masing-masing kabupaten.

Jumlah produksi komoditi kedelai untuk tahun 2013 juga tidak mencapai target serta mempunyai realisasi yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Ini disebabkan antara lain oleh penyediaan benih yang tidak sesuai jadwal, benih subsidi yang masih sulit didapat, penanaman kedelai pada lahan sawah tidak dapat dilaksanakan karena curah hujan masih tinggi sampai dengan bulan Mei, dan terjadi alih fungsi lahan utama yaitu lahan untuk menanam kedelai digunakan untuk menanam komoditi sawit. Persoalan lain adalah terkait menurunnya produksi kedelai tahun 2013 adalah harga talangan Bulog yang baru diterapkan pada bulan Agustus, seharusnya hal tersebut dapat dilakukan lebih awal oleh

Pemerintah sehingga menjadikan komoditi kedelai menjadi komoditi yang dilirik oleh petani dan tidak dianggap sebagai komoditi yang tidak menguntungkan bagi mereka.

Selain Komoditi Kedelai, komoditi lainnya yang juga tidak mencapai target dan pencapaian jumlah produksinya lebih rendah dibandingkan tahun lalu adalah komoditi Kacang Tanah dengan jumlah produksi sebesar 3.844 ton turun 44,56% dari tahun lalu, Kacang Hijau mempunyai jumlah produksi 946 ton turun 34,85% dari tahun lalu, Ubi Kayu dengan jumlah produksi 34.613 ton turun 9,52%. Komoditi Kacang Tanah, Kacang Hijau, dan Ubi Kayu merupakan komoditi swadaya masyarakat. Tidak tercapainya target serta menurunnya jumlah produksi dibandingkan dengan tahun lalu lebih disebabkan karena berfluktuatifnya harga, berkurangnya permintaan pasar terhadap komoditi tersebut, serta tidak adanya penampung yang membeli sesuai harga pasar menjadikan masyarakat beranggapan bahwa berbudidaya komoditi tersebut tidak menguntungkan bagi mereka. Selain itu kurangnya perlakuan khusus semisal pemberian bantuan seperti halnya komoditi Padi, Jagung, dan Kedelai dari pemerintah daerah juga turut mempengaruhi penurunan produksi. Jumlah produksi yang tidak mencapai target juga terjadi pada komoditi ubi jalar dengan jumlah produksi 11.460 ton turun dari tahun lalu sebesar 14,19%, selain karena memang komoditi ini bukan merupakan komoditi prioritas sehingga tidak ada bantuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah, tidak terdapatnya industri pengolahan untuk komoditi ini disinyalir juga menjadi kendala dalam peningkatan produksi, produksi komoditi ini hanya digunakan untuk memenuhi keperluan industri rumah tangga.

Jumlah produksi komoditi jagung berdasarkan Angka Sementara (ASEM) 2013 berada diatas target yaitu 106,13%. Jumlah produksi tahun 2013 sebesar 167.173 ton dibandingkan dengan jumlah produksi tahun 2012 yaitu sebesar 167.285 ton mengalami peningkatan sebesar 112 ton atau naik sebesar 0,07%. Peningkatan produksi jagung pada tahun 2013 terjadi karena adanya beberapa daerah penumbuhan baru dan daerah pengembangan Kawasan Jagung di berbagai Kabupaten di Provinsi Aceh. Kegiatan penumbuhan Kawasan Jagung Hibrida antara lain terdapat di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan kawasan sentra jagung hibrida berada di beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Pidie, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Singkil. Peningkatan produksi ini menjadi suatu prestasi yang harus dipertahankan dan dapat lebih ditingkatkan di masa mendatang.

Tidak tercapainya target produksi pada tahun ini terjadi selain karena hal-hal tersebut di atas juga disebabkan antara lain oleh faktor alam seperti perubahan iklim yang berakibat pada pergeseran musim tanam, bencana banjir di beberapa daerah yang berakibat ratusan hektar sawah menjadi puso. Serta adanya faktor teknis lainnya seperti bantuan saprodi yang terlambat disalurkan sehingga penanaman terlambat dilakukan serta adanya perbaikan irigasi di beberapa Kabupaten/Kota.

b. Indikator kinerja *Jumlah produktivitas tanaman pangan*

Untuk indikator kinerja yang kedua yaitu jumlah produktivitas tanaman pangan, terdapat tiga komoditi yang melebihi target pencapaian yaitu komoditi Jagung, Kedelai, Kacang Hijau, dan ubi jalar, dan komoditi-komoditi ini juga mengalami peningkatan produktivitas dibandingkan dengan tahun lalu kecuali komoditi kacang hijau. Komoditi jagung mengalami peningkatan 0,46%; Kedelai 1,87%; Ubi Jalar 0,33%. Sedangkan untuk komoditi Padi meskipun produktivitasnya tidak mencapai target atau sebesar 97,25% akan tetapi nilai produktivitasnya meningkat sebesar 1,21% dari tahun lalu, begitupun dengan komoditi Kacang Tanah dengan pencapaian 97,79% dari target yang ditetapkan namun demikian produktivitasnya meningkat dari tahu lalu sebesar 1,39%. Komoditi Kacang Hijau mengalami penurunan produktivitas sebesar 0,57% dari tahun lalu, sedangkan komoditi Ubi Kayu selain tidak mencapai target 99,49% juga mangalami penurunan nilai produktivitas dari tahun lalu yaitu sejumlah 0,89%.

Produktivitas merupakan tingkat hasil/produksi yang didapatkan per hektar tanam dalam satu kali penanaman. Tingginya produktivitas yang diperoleh terkait dengan penggunaan alat dan mesin pertanian, benih unggul bermutu dan persediaan air yang cukup yang merupakan faktor yang sangat berperan dalam peningkatan produktivitas, selain saprodi pendukung lainnya seperti pupuk dan pestisida. Nilai produktivitas rata-rata tiap daerah diperoleh dengan cara pengumpulan data ubinan pada beberapa lahan pertanian di daerah tertentu, namun demikian metode yang digunakan masih dianggap belum obyektif dimana ubinan yang dijadikan

sampel terkadang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Oleh sebab itu hasil produktivitas yang diperoleh di suatu daerah terkadang terlalu rendah padahal daerah tersebut mendapat berbagai macam bantuan dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, begitu juga sebaliknya daerah yang kurang mendapat bantuan justru memiliki nilai produktivitas tinggi dari hasil ubinan yang dilakukan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa mendatang adalah dengan; (a) Meningkatkan mutu kualitas data sehingga data yang diperoleh adalah data yang akurat agar perencanaan dapat tepat sasaran, (b) Adanya penerapan *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi) kepada Kabupaten/Kota yang berhasil ataupun gagal dalam usahanya meningkatkan produksi dan produktivitas, (c) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait untuk memperlancar proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan, dan (d) Kegiatan untuk tahun berikutnya harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar kegiatan dapat terlaksana secara maksimal.

Berbagai upaya peningkatan produksi komoditi pangan terus dilakukan dengan berbagai cara, yakni melalui peningkatan luas panen maupun perbaikan usaha tani untuk meningkatkan produktivitasnya. Semua upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi kritis ketahanan pangan mengingat kian beratnya tantangan penyediaan pangan kedepan. Selain pertambahan penduduk yang otomatis mengurangi lahan pertanian dan perkebunan, sementara pada saat yang sama, pertambahan penduduk itu otomatis membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan juga lahan

pertanian, persoalan lainnya adalah perubahan iklim yang menjadikan usaha untuk meningkatkan produksi terasa semakin sulit dilakukan. Terkait hal tersebut sudah saatnya kita bijak mengatur pangan, salah satunya dengan melakukan diversifikasi pangan atau melakukan keragaman konsumsi pangan untuk mengatasi ketergantungan pada beras dan mencapai ketahanan pangan, disamping peningkatan produktivitas lahan. Oleh Sebab itu, ke depan pengembangan komoditi pangan lainnya perlu diperhatikan dan perlu adanya sosialisasi menyangkut diversifikasi pangan kepada masyarakat.

c. Jumlah produksi tanaman hortikultura :

Dari capaian tahun 2013 realisasi untuk indikator jumlah produksi tanaman hortikultura mempunyai pencapaian rata-rata 38,73% dan tidak ada satu komoditipun yang mencapai target, ini disebabkan oleh data yang terkumpul merupakan data yang diperoleh sampai dengan kondisi bulan Oktober 2013 dan baru hanya beberapa Kabupaten yang menyerahkan datanya sehingga dikatakan data jumlah produksi tanaman hortikultura ini merupakan data yang bersifat sangat sementara dan tidak dilakukan justifikasi terkait pencapaian target karena data dianggap belum valid. Terlambatnya pengumpulan data komoditi hortikultura disebabkan oleh proses pengolahan data yang membutuhkan waktu lama disebabkan antara lain oleh jumlah komoditi yang terlalu banyak (90 komoditi), jadwal pemanenan yang berulang, dan adanya pengelompokan kelas (tanaman hias, tanaman buah semusim, tanaman buah tahunan, dan tanaman biofarmaka).

d. Indikator kinerja *Jumlah produktifitas tanaman hortikultura* :
Sedangkan untuk indikator jumlah produktivitas tanaman hortikultura, rata-rata mempunyai pencapaian 67,57%. Komoditi kentang dan cabe rawit mempunyai realisasi yang melebihi target yaitu 107,47% dan 103,22% diikuti oleh komoditi cabe besar 99,79%, bawang merah 91,82%. Untuk komoditi rambutan, jeruk besar, durian, dan pisang masing mempunyai pencapaian 53,52%; 30,48%; 30,20%; 24,03%. Data produktivitas komoditi hortikultura diperoleh berdasarkan perkiraan dan wawancara dengan petani hortikultura yang dijadikan sampel diberbagai daerah sehingga data yang diperoleh masih terdapat banyak kekurangan pada segi kualitas datanya. Untuk itu diperlukan perbaikan SOP pendataan komoditi hortikultura agar data yang diperoleh dapat lebih cepat dan akurat.

e. Indikator kinerja *Produksi daging per tahun*, ditargetkan sebanyak 30.002.424 kg dan mampu direalisasikan sebanyak 31.402.476 Kg dengan persentase tingkat capaian sebesar 104,67%. Tingkat capaian ini terdiri dari Daging Sapi 10.431.918 Kg; Kerbau 4.117.950 Kg; Kambing 1.844.740 Kg; Domba 428.616 Kg; Ayam Buras 4.789.983 kg; Ayam Ras Petelur 63.434 Kg; Ayam Ras Pedaging 7.114.353 Kg; dan Itik 1.211.431 Kg, upaya peningkatan ini dilakukan melalui program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan Peningkatanya populasi ternak non ruminansia yang alokasi anggaranya sebesar Rp.47.054.506.000,-. Pada tahun 2014 program dan kegiatan ini akan terus ditingkatkan dengan dialokasikannya dana sebesar Rp.21.548.798.500,- dengan target daging di tahun 2014 sebanyak 28.675.973 ton.

Jumlah produksi daging Aceh sampai dengan tahun 2013 sebanyak 31.402.476 Kg, berdasarkan jumlah penduduk Aceh sebanyak 4.693 juta rata-rata kebutuhan daging nasional 20 Kg/Jiwa/Tahun maka kebutuhan daging di Aceh sebanyak 93.860.000 Kg, maka kebutuhan daging untuk masyarakat Aceh masih jauh dari target rata-rata nasional.

f. Indikator kinerja *Produksi telur per tahun*, yang ditargetkan sebanyak 15.840.826 kg dan mampu direalisasikan sebanyak 16.904.852 Kg dengan persentase tingkat capaian sebesar 106,72%. Upaya terhadap peningkatan capaian ini telah dilakukan berbagai strategi antara lain penyediaan Ayam ras petelur sebanyak 100.000 Ekor; Jumlah Ayam buras lokal sebanyak 5.000 Ekor; penyediaan Ternak non ruminansia lainnya sebanyak 100 Ekor; dan pembangunan sarana dan prasarana budidaya ternak unggas sebanyak 16 unit. Program yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian ini yaitu Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yang dijabarkan dalam kegiatan Peningkatan populasi ternak non ruminansia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.054.506.000,-

g. Indikator kinerja *Populasi ternak per tahun*, ditargetkan sebanyak 17.773.543 ekor dan mampu direalisasikan sebanyak 17.983.565 ekor dengan tingkat capaian sebesar 101,18%. Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan terhadap pencapaian ini antara lain dengan menjalankan program Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan Peningkatan populasi ternak ruminansia dan Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) yang dialokasikan anggaran sebesar Rp.85.700.505.521,-

Dari populasi ternak per tahun antara lain terdiri dari Sapi potong sebanyak 493.410 Ekor, , Kerbau 140.178, Kuda 4944, Kambing 821.157, Domba 180.325, Ayam Buras 8.839.872, Ayam Ras petelur 354.872, Ayam Ras Pedaging 3.433.432, dan Itik 3.056.543.

31.	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
	Meningkatnya Eksplorasi Sumberdaya Alam secara Lestari dan Berkelanjutan

Untuk mengukur Sasaran strategis ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.47 di bawah ini :

Tabel 3.47
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tiga Puluh Satu

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%
31.1	Jumlah pengembangan energi alternatif/ terbarukan	13	Desa	18	138,46
31.2	Pertambangan tanpa ijin	27,24	%	12,42	45,59
31.3	Rasio ketersediaan daya listrik	83,00	%	83,24	100,29
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian					**94,78**

Berdasarkan hasil pengukuran 3 (tiga) indikator kinerja dari sasaran strategis *"Meningkatnya Eksplorasi Sumberdaya Alam secara Lestari dan Berkelanjutan"* mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **94,78%** atau kategori ***BAIK.*** Untuk melihat tingkat capaian dari beberapa indikator kinerja sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut :

a. Indikator kinerja *Pemanfaatan energi alternatif/terbarukan* ditargetkan sebanyak 13 desa dan mampu direalisasikan sebanyak 18 desa dengan tingkat capaian sebesar 138,46%. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Energi

Baru Terbarukan (EBT). EBT yang dikembangkan meliputi energi surya (tenaga surya) melalui pemasanagan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan energi mikro hidro (tenaga Mikro Hidro) melalui Pembangun an Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLMTH). Pada tahun 2013, sebanyak 13 desa telah menjadi target untuk dijadikan percontohan pengembangan energi terbarukan. Sampai dengan akhir tahun 2013, telah dilaksanakan pembangunan PLTMH dan pemasangan PLTS di 18 Desa pada Kabupaten/Kota di Aceh

b. Indikator kinerja *pertambangan tanpa izin* ditargetkan sebanyak 27,24% dan mampu direalisasikan sebesar 12,42% atau dengan tingkat capaian sebesar 45,59%. Kegiatan PETI di Aceh pada umumnya dilakukan untuk komoditi Emas, mengingat nilai ekonomi emas yang cukup tinggi, Pemerintah Aceh bekerja sama dengan Instansi terkait pengelola pertambangan kabupaten/kota, mendiskusikan dan melaksanakan tinjaun lapangan untuk mengurangi luasan PETI dan dampak berlangsungnya PETI bagi wilayah tersebut. Pada Tahun 2013, pengawasan dan pembinaan PETI dilakukan beberapa Kab/Kota yang ada di Aceh yaitu di kabupaten Pidie, Aceh Selatan, Nagan Raya dan Aceh Barat. Perkembangan penertiban PETI di aceh sampai dengan Desember 2013 dapat dilihat pada tabel 3.48 berikut ini :

Tabel 3.48
Perkembangan Penertiban PETI di Aceh

NO	Kabupaten	Lokasi	Jenis Komoditas	Luas Tahun 2012	Luas Tahun 2013	Keterangan
1.	Aceh Selatan	Sawang	Emas Primer	15 Ha	11 Ha	Luas Peti Berkurang 4 Ha
		Manggamat	Emas Primer	291, 27 Ha	256,87 Ha	Luas PETI Berkurang 34,4 Ha di lokasi IUP KSU Tlaga Manyak
2	Pidie	Geumpang	Emas Primer	917 Ha	837 Ha	Luas PETI berkrang 80 Ha akibat gempa bumi 2013
		Tangse	Emas Primer	16Ha	13 Ha	Luas PETI berkurang 3 Ha di Lokasi UIP PT Mahelanic Garuda Kencana
3	Aceh Barat	Lancong/Tutut	Emas (Placer)	70 Ha	70 Ha	Masih banyak dijumpai kegiatan penambangan ilegal oleh masyarakat
		S. Sei Bintang	Emas (Placer)	15 Ha	0 Ha	Tidak dijumpai lagi akfitas penambangan
4	Nagan Raya	Krueng Cut	Emas (Placer)	16 Ha	0 Ha	Telah dilakukan Penertiban oleh Tim terpadu Pemda Nagan Raya
		Krueng Kila	Emas (Placer)	16 Ha	0 Ha	Telah dilakukan Penertiban oleh Tim terpadu Pemda Nagan Raya

Sumber Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, 2013

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, dari target sebesar 27,24% hanya mampu direalisasikan sebesar 12,42% atau dengan tingkat capaian sebesar 45,59%. Rendahnya tingkat capaian ini disebabkan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam pengurusan izin pertambangan sehingga kegiatan pertambangan cenderung dilakukan secara ilegal, serta masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap birokrasi yang terlalu kompleks pada pengurusan segala sesuatu administrasi.

Permasalahan PETI yang sangat kompleks, maka penanggulangannya memerlukan konsep yang terintegrasi dan harus dilakukan secara terpadu.

c. Indikator kinerja *Rasio ketersediaan daya listrik*, ditargetkan sebesar 83% dan mampu direalisasikan sebesar 83,24% atau dengan tingkat capaian sebesar 100,29%. Berdasarkan jumlah desa di Aceh sebanyak 6.493 yang telah dialiri listrik sebanyak 6.283 desa atau 96,77% desa atau 210 atau 3,23% yang belum dialiri listrik.

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan ketentuan pasal (1) point 23 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Gubernur Aceh dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menetapkan Qanun Nomor 1 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2013 dengan alokasi anggaran **Rp.11.779.837.222.010,-** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Aceh Rp. 902.779.838.140,-

b. Dana Perimbangan Rp. 2.530.685.479.843,-

c. Lain-lain pendapatan yang Sah Rp. 6.677.902.153.000,-

Jumlah Pendapatan Rp.10.111.367.470.983,-

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai Rp. 916.310.730.504,-
2) Belanja hibah Rp.1.573.990.292.821,-
3) Belanja bantuan sosial Rp. 293.971.079.382,-
4) Belanja bagi hasil Rp. 275.000.000.000,-
5) Belanja bantuan keuangan Rp. 553.927.059.873,-
6) Belanja tidak terduga Rp. 100.000.000.000,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 384.171.743.604,-
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.827.025.904.517,-
3) Belanja Modal Rp. 1.855.440.411.309,-

Jumlah Belanja Rp.11.779.837.222.010,-

3. Pembiayaan

1) Penerimaan Rp.1.673.319.751.027,-
2) Pengeluaran Rp. 4.850.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Rp. 1.668.469.751.027,-

Secara lebih terinci rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan pembiayaan Aceh setelah perubahan pada tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel 3.49 di bawah ini :

Tabel. 3.49
Realisasi anggaran pendapatan dan pembiayaan Aceh - Perubahan tahun 2013

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN ACEH			
1.	Pendapatan Asli Aceh	1.167.694.484.330,00	1.309.622.500.492,67	112,15
2.	Dana Perimbangan	2.563.800.263.239,00	2.675.448.212.109,00	104,35
3.	Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah	6.740.046.038.980,00	6.671.050.781.547,00	98,98
	Jumlah	*10.471.540.786.549,00*	*10.656.121.494.148,70*	101,76
	PEMBIAYAAN ACEH			
1.	Penerimaan Pembiayaan Aceh	1.931.663.713.736,00	1.961.758.877.114,95	101,56
2.	Pengeluaran Pembiayaan Aceh	4.850.000.000,00	-	-
	Jumlah	*1.936.513.713.736,00*	*1.961.758.877.114,95*	101,30

Sumber : Dinas Keuangan Aceh, 2013

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan Aceh menunjukkan tingkat capaian yang optimal, karena secara keseluruhan realisasi anggaran pendapatan mencapai sebesar **Rp. 10.656.121.494.148,7** atau meningkat sebesar 101,76% dari target yang direncanakan sebesar **Rp. 10.471.540.786.549,-**.

Sedangkan realisasi anggara pembiayaan yang ditargetkan sebesar 1.936.513.713.736,0 mampu direalisasikan sebesar hanya 1.961.758.877.114,9 atau tingkat capaian sebesar 101,30%.

Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan Aceh tahun 2013, realisasi anggaran belanja Aceh yang terdiri dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara rinci sebagaimana tersebut dalam tabel 3.50 berikut ini :

Tabel. 3.50
Realisasi Anggaran Belanja Aceh Tahun 2013

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Tidak Langsung	4.011.035.518.491,00	3.464.275.628.557,42	86,37
2.	Belanja Langsung	8.387.318.981.794,00	7.753.465.683.348,00	92,44
Jumlah		*12.398.354.500.285,00*	*11.217.741.311.905,40*	90,48

Sumber : Dinas Keuangan Aceh, 2013

berdasarkan komposisi Anggaran Belanja Aceh tahun 2013 yang berjumlah **Rp.12.398.354.500.285,00** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp 4.011.035.518.491,-.** Dengan realisasi sebesar Rp.3.464.275.628.557,42 dan Belanja Langsung sebesar **Rp.8.387.318.981.794,-** dengan realisasi sebesar **Rp.7.753.465.683.348,00**.

Berdasarkan urusan pemerintahan, alokasi anggaran dan realisasi anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagai berikut :

Tabel 3.51

Alokasi APBA tahun 2013 berdasarkan urusan/Satuan Kerja Perangkat Aceh

NO	SKPA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Pendidikan Aceh	541.539.589.327,00	459.779.275.909,00	84,90
2	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah	179.666.282.973,00	177.545.992.377,00	98,82
3	Sekretariat MPD	3.938.878.600,00	3.342.670.294,00	84,86
4	Dinas Kesehatan	552.890.282.161,00	539.117.272.380,00	97,51
5	RSUZA (BLUD)	245.256.077.528,00	286.718.873.088,00	116,91
6	Rumah Sakit Jiwa	72.320.627.050,00	59.935.505.305,00	82,87
7	RSIA	43.863.029.942,00	39.286.497.723,00	89,57
8	Dinas Bina Marga	1.199.943.741.962,00	1.132.726.584.501,00	94,40
9	Dinas Pengairan	762.767.578.096,00	742.563.050.402,00	97,35
10	Dinas Cipta Karya	1.428.024.275.969,00	1.387.155.375.825,00	97,14
11	Bappeda	52.181.490.937,00	40.828.034.306,00	78,24
12	Dihubkomintel	196.198.521.351,00	184.812.886.041,00	94,20
13	Bapedal	23.623.664.390,00	21.500.150.027,00	91,01
14	BP3A	14.179.866.610,00	11.806.816.333,00	93,12
15	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	11.625.890.297,00	10.826.400.444,00	83,26
16	Dinas Sosial	171.330.074.206,00	156.894.153.383,00	91,57
17	Disnakermobduk	102.113.093.905,00	89.796.540.749,00	87,94
18	Bainprom	9.873.717.460,00	9.610.562.147,00	97,08
19	Dinas Koperasi dan UKM	25.493.771.300,00	24.749.024.804,00	97,33
20	Disbudpar	46.739.344.639,00	42.885.542.581,00	91,75

21	Sekretariat MAA	34.077.319.677,00	10.932.108.063,00	32,08
22	Dispora	118.559.209.980,00	114.739.978.933,00	96,78
23	Bakesbangpolinmas	19.253.350.886,00	15.884.601.693,00	82,50
24	Satpol PP dan WH	29.003.533.790,00	27.999.662.407,00	96,54
25	Biro Umum	64.532.021.096,00	59.531.082.462,00	92,25
26	Biro Tapem	7.775.000.000,00	6.810.234.381,00	87,59
27	Biro Perekonomian	7.500.000.000,00	6.713.465.525,00	89,51
28	Biro Isra	18.508.830.700,00	15.713.170.674,00	84,90
29	Biro Organisasi	3.100.000.000,00	2.640.137.041,00	85,17
30	Biro Hukum	7.717.509.000,00	7.232.170.551,00	93,71
31	Biro Adpem	5.669.530.000,00	5.143.599.243,00	90,72
32	Biro Humas	7.208.990.000,00	5.751.561.253,00	84,90
33	Ktr Perw. Aceh di Medan	2.323.014.000,00	1.972.219.863,00	89,51
34	Sekretariat Daerah	23.048.700.000,00	20.632.030.338,00	79,78
35	Sekretariat DPRA	110.620.192.309,00	81.793.615.872,00	73,94
36	Dinas Keuangan Aceh	32.225.684.111,00	20.155.329.001,00	62,54
37	Inspektorat Aceh	16.776.383.668,00	12.267.091.153,00	73,12
38	Ktr Penghubung Aceh di Jakarta	8.722.391.000,00	7.834.212.837,00	89,82
39	BKPP	29.146.619.778,00	21.994.696.046,00	75,46
40	Dinas Syariat Islam	68.657.475.989,00	63.532.164.897,00	92,53
41	Sekretariat MPU	15.283.081.250,00	13.896.078.169,00	90,92
42	Sek Baitul Mal	24.152.626.985,00	23.624.036.746,00	97,81
43	BPBA	56.743.293.000,00	50.848.981.107,00	89,61
44	BP2T	2.737.480.000,00	2.641.936.650,00	96,51
45	SDP KORPRI	4.769.989.847,00	4.326.419.974,00	90,70
46	DPKA	640.427.114.351,00	444.475.038.481,00	69,40
47	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	78.433.670.856,00	75.297.997.154,00	96,00
48	BPM	46.631.928.347,00	45.537.975.917,00	97,65
49	Badan Arpus	52.418.741.691,00	51.849.774.620,00	98,91
50	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	305.588.113.850,00	286.914.976.713,00	93,89
51	Dinkeswanak	189.353.737.242,00	180.420.527.590,00	95,28
52	Disbun	188.626.795.214,00	177.743.376.749,00	94,23
53	Dishut	60.502.466.286,00	58.562.461.957,00	96,79
54	Distamben	69.499.257.257,00	67.998.138.639,00	97,84
55	DKP	274.001.934.023,00	260.010.907.141,00	94,89
56	Disperindag	80.153.196.908,00	78.162.714.889,00	97,52
Jumlah		**8.387.318.981.794**	**7.753.465.683.348**	**92,44**

Sumber : Dinas Keuangan Aceh, Januari 2014

D. Jumlah dan Realisasi APBA Tahun 2010-2013

Perkembangan dan realisasi APBA serta persentase daya serap anggaran setiap tahun tidak sama, namun rata-rata realisasi anggaran selama 4 (empat) tahun mencapai 91,10%, secara rinci sebagaimana tertera dalam tabel 3.52 berikut :

Tabel 3.52
Jumlah dan realisasi APBA dalam kurun waktu 2010-2013

No.	Tahun	APBA		Persentase
		Jumlah	Realisasi	
1.	2010	8.246.389.494.167	7.532.616.309.216	91,34
2.	2011	7.979.778.571.000	7.374.632.649.255	92,42
3.	2012	9.711.938.653.801	8.757.321.935.052	90,17
4.	2013	12.398.354.500.285	11.217.741.311.905	**90, 48**
Jumlah		**48.295.382.613.103**	**40.171.260.855.871**	**91,10**

Sumber : Dinas Keuangan Aceh, Januari 2014

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tahun 2013 kemampuan daya serap APBA mencapai 90,48**%**. Tingkat pencapaian realisasi anggaran yang relatif baik tersebut lebih kecil dari tingkat capaian kinerja rata-rata yaitu sebesar 108,32**%**. Tingkat capaian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Aceh menjadi lebih efisien sebesar 7,84**%** dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, sejalan dengan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan yang sinergi sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan/ penganggaran yang berbasis kinerja.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Aceh tahun 2013 merupakan gambaran tentang capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2012-2017.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja dilakukan pengukuran terhadap 31 sasaran strategis dan 313 indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2013 melalui analisis dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja, sehingga diperoleh rata-rata tingkat pencapaian masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sasaran strategis " *Meningkatnya Jumlah Peraturan Pelaksanaan UUPA yang Harus Diselesaikan 100 persen Sampai Dengan Tahun 2005 (6 PP, 1 Perpes dan 21 Qanun Aceh)*", memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **52, 38%**, dengan predikat ***Kurang.***
2. Sasaran strategis *"Meningkatnya Implementasi UUPA dalam Percepatan Pembangunan dan Menjaga Keberlanjutan Perdamaian",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **140,39%**, dengan predikat ***Sangat Baik***.
3. Sasaran strategis *"Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governace dan Clean Governmet (perolehan dari WDP menjadi WTP, Akuntabilitas, LAKIP Pemerintah Aceh dari CC menjadi B, Indeks Kepuasan Masyarakat",* memperoleh

rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **92,44%**, dengan predikat ***Baik***.

4. Sasaran strategis *"Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Transparan (Lama Waktu Perizinan dari 7 Hari menjadi 3 Hari dan tersedianya Akses Informasi Dokumen Publik (RPJPA, RTRWA, RPJMA, RKPA, Statistik Daerah, APBA, LKPJ, LPPD) Pada Website Pemerintah*", memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **103,15%**, dengan predikat ***Sangat Baik***.
5. Sasaran strategis *"Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Aceh (Meningkatnya Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan, Pengawasan dan Pelaksanaan) Dan Meningkatnya Persentase Usulan Masyarakat Yang diakomodir Dalam Dokumen Anggaran*", memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***95,35%***, dengan predikat ***Baik***.
6. Sasaran strategis *" Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Keberlanjutan Perdamaian",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***99,94%*** dengan predikat ***Baik***.
7. Sasaran strategis *" Meningkatnya Penyelenggaraan Kehidupan Masyarakat Yang Sesuai Dengan Nilai-Nilai Budaya Aceh Yang Sejalan Dengan Nilai-Nilai Dinul Islam*", memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***105,25%,*** dengan predikat ***Sangat Baik***.
8. Sasaran strategis *" Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Ketaat Masyarakat Serta Aparatur Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam"*

memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***94,05%***, dengan predikat ***Baik***.

9. Sasaran strategis *" Meningkatnya Peran Ulama Terhadap Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Pengefektifan Penerapan Nilai-nilai Dinul Islam dan Mengangkat Kembali Budaya-Budaya Aceh Yang Islami",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***108,52%,*** dengan predikat ***Sangat Baik***.
10. Sasaran strategis *"Meningkatnya Struktur Perekonomian Yang Mantap Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Wilayah Pada Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata".* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***122,23%***, dengan predikat ***Sangat Baik***.
11. Sasaran strategis *" Berkembangnya Sistem Agribisnis Yang Mampu Menyediakan Produk-Produk Pertanian yang Cukup, Bermutu dan Aman Konsumsi",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***170,04%***, dengan predikat ***Sangat Baik***.
12. Sasaran strategis *"Pengembangan Sektor Pertanian Berbasis Komoditi Unggulan Sesuai Dengan Sumberdaya Alam dan Agro Ekosistem Wilayah",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***194,19%,*** dengan predikat ***Sangat Baik.***
13. Sasaran strategis *"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terpencil dan Pesisir",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***91,45%***, dengan predikat ***Baik***.
14. Sasaran strategis *"Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***109,18%,*** dengan predikat ***Sangat Baik***.

15. Sasaran strategis *" Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka Aceh",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***75,16%***, dengan predikat ***Cukup***.
16. Sasaran strategis *" Menurunnya Angka Kemiskinan Dengan Perbaikan Pendapatan dan Pemberdayaan Kemandirian Melalui Perluasan Lapangan Usaha",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***98,47%,*** dengan predikat ***Baik***.
17. Sasaran strategis *" Meningkatnya Investasi Dalam Negeri dan Investasi Asing",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***159,12%,*** dengan predikat ***Sangat Baik***.
18. Sasaran strategis *" Meningkatnya Keberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Lokal",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***112,94%***, dengan predikat ***Sangat Baik***.
19. Sasaran strategis *" Tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Bidang Pendidikan Pada Tahun 2015",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***114,08%***, dengan predikat ***Sangat Baik***.
20. Sasaran strategis *" Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Dayah, Pendidikan Vokasional dan Pendidikan Tinggi Dalam Memenuhi Kebutuhan Ketenagakerjaan",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***121,33%***, dengan predikat ***Sangat Baik***.
21. Sasaran strategis *" Tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Bidang Kesehatan 2015",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***101,61%***, dengan predikat ***Sangat Baik***.

22. Sasaran strategis *" Meningkatnya Mutu Pelayanan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Kesehatan Dengan Menjaga Keseimbangan Antar Wilayah",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***153,33%***, dengan predikat ***Sangat Baik***.
23. Sasaran strategis *" Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Medik Spesialistik dan Kesehatan Jiwa Serta Tersedia Obat Esensial Di Sarana Pelayanan Dasar dan Rujukan",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***82,78%,*** dengan predikat ***Baik***.
24. Sasaran strategis *" Terjamin Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyakat Miskin Aceh dengan Jaminan Kesehatan Berbasis Asuransi Sosial atau Jaminan Kesehatan Masyakat Aceh (JKMA)",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***100,00%***, dengan predikat ***Baik***.
25. Sasaran strategis *" Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***96,95%*** dengan predikat ***Baik***.
26. Sasaran strategis *" Meningkatkan Pembangunan Yang Terintegrasi Dengan Berbagai Sektor Pembangunan Secara Berkelanjutan",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***105,48%***, dengan predikat ***Sangat Baik***.
27. Sasaran strategis *" Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur antara Wilayah dan Daerah Yang Seimbang dan Proporsional Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Dan Potensi Daerah",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***99,56%,*** dengan predikat ***Baik***.
28. Sasaran strategis *" Meningkatnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Terhadap Bencana dan Pengelolaan*

Lingkungan Yang Berkualitas", memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **107,28%**, dengan predikat ***Sangat Baik***.

29. Sasaran strategis *" Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Aceh",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***85,44%*** dengan predikat ***Baik***.
30. Sasaran strategis *" Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***74,42%*** dengan predikat ***Cukup***.
31. Sasaran strategis *" Meningkatnya Eksplorasi Sumberdaya Alam Secara Lestari dan Berkelanjutan",* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar ***94,78%,*** dengan predikat ***Baik***.

Diantara 31 sasaran strategis tersebut, terdapat 16 sasaran strategis mendapat predikat ***Sangat Baik***, 12 sasaran strategis yang mendapat predikat ***Baik***, 2 Sasaran Strategis yang mendapat predikat ***Cukup*** dan 1 sasaran strategis yang mendapat predikat ***Kurang***.

Akumulasi tingkat capaian kinerja rata-rata berdasarkan 31 sasaran strategis memperoleh nilai rata-rata sebesar ***108,20%*** dengan predikat ***Sangat Baik***, dibandingkan dengan tingkat capaian akuntabilitas keuangan Pemerintah Aceh pada tahun 2013 sebesar ***92,44%*** **berdasarkan urusan/Satuan Kerja Perangkat Aceh** tahun 2013 sebesar **Rp. 8.387.318.981.794,-** hanya mampu direalisasikan sebesar **Rp. 7.753.465.683.348,-,** dengan demikian terjadi efisiensi sebesar ***15,76%.***

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja secara akumulatif, diakui belum diikuti dengan tingkat pencapaian yang optimal

setiap indikator kinerja pada sasaran strategis. Hal ini disebabkan karena masih adanya hambatan/kendala dalam pencapaian beberapa indikator kinerja, antara lain ; penerapan sistem perencanaan berbasis kinerja yang belum optimal, sistem pengawasan yang belum berjalan dengan baik, kompetensi SDM yang masih rendah, perubahan iklim serta topografi wilayah yang sulit terjangkau dalam pencapaian program dan kegiatan pembangunan.

Dalam meminimalisir kendala tersebut Pemerintah Aceh melakukan berbagai upaya perbaikan melalui penerapan sistem perencanaan yang berbasis kinerja, meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan rencana anggaran sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh, serta peningkatan SDM yang berbasis kompetensi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Aceh Tahun 2013 yang merupakan salah satu media pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis serta pencapaian terhadap setiap Indikator Kinerja Pembangunan Aceh.

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	*Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh*	*5*
Tabel 1.2	*Jumlah jabatan struktural menurut jenjang eselonering di lingkungan Pemerintah Aceh*	*7*
Tabel 1.3	*Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan jenis kelamin*	*7*
Tabel 1.4	*Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan*	*8*
Tabel 2.1	*Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan*	*12*
Tabel 2.2	*Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Aceh tahun 2013*	*13*
Tabel 2.3	*Penetapan Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2013*	*28*
Tabel 3.1	*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama*	*47*
Tabel 3.2	*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua*	*50*
Tabel 3.3	*Perbandingan Tingkat Capaian Tahun 2012 dengan Tahun 2013 Terhadap Sasaran Strategis Pertama*	*51*
Tabel 3.4	*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga*	*52*
Tabel 3.5	*Perbandingan Tingkat Capaian Tahun 2012 dengan Tahun 2013 terhadap Indikator Kinerja sasaran strategis ketiga*	*61*
Tabel 3.6	*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat*	*62*
Tabel 3.7	*Link Aplikasi Pemerintah Aceh Berbasis Web*	*67*
Tabel 3.8	*Perbandingan Tingkat Capaian Tahun 2012 dengan Tahun 2013 terhadap Indikator Kinerja sasaran strategis keempat*	*69*
Tabel 3.9	*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelima*	*70*
Tabel 3.10	*Perbandingan Tingkat Capaian Tahun 2012 dengan Tahun 2013 terhadap Indikator Kinerja sasaran strategis kelima*	*73*
Tabel 3.11	*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keenam*	*74*
Tabel 3.12	*Angka Kriminalitas di Aceh*	*81*
Tabel 3.13	*Rekapitulasi Konflik di Provinsi Aceh Tahun 2013*	*82*
Tabel 3.14	*Rumah Sehat Sederhana*	*84*
Tabel 3.15	*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketujuh*	*85*

Tabel 3.16 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2012 dengan tahun 2013 terhadap indikator kinerja sasaran strategis ketujuh 88
Tabel 3.17 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis kedelapan..... 89
Tabel 3.18 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2012 dengan tahun 2013 terhadap indikator kinerja sasaran strategis kedelapan 95
Tabel 3.19 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis kesembilan 95
Tabel 3.20 Nama-nama perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat halal tahun 2013 97
Tabel 3.21 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2012 dengan tahun 2013 terhadap indikator kinerja sasaran strategis kesembilan 101
Tabel 3.22 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis kesepuluh 102
Tabel 3.23 Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2012 dengan tahun 2013 terhadap indikator kinerja sasaran strategis kesepuluh 111
Tabel 3.24 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis kesebelas 112
Tabel 3.25 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis duabelas 116
Tabel 3.26 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis tigabelas 123
Tabel 3.27 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis empatbelas..... 127
Tabel 3.28 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis limabelas..... 129
Tabel 3.29 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis enambelas 135
Tabel 3.30 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis tujuhbelas 139
Tabel 3.31 Perusahaan yang menanamkan modal 140
Tabel 3.32 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis delapanbelas..... 141
Tabel 3.33 Rekapitulasi database koperasi Aceh tahun 2013 ... 146
Tabel 3.34 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Triwulan III tahun 2013 147
Tabel 3.35 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Sembilan Belas 151
Tabel 3.36 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keduapuluh 158
Tabel 3.37 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

Duapuluh satu *162*
Tabel 3.38 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Duapuluh dua* *168*
Tabel 3.39 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Duapuluh tiga* *170*
Tabel 3.40 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Duapuluh empat* *172*
Tabel 3.41 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Duapuluh lima* *174*
Tabel 3.42 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Duapuluh enam* *177*
Tabel 3.43 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Duapuluh tujuh* *180*
Tabel 3.44 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Duapuluh delapan* *192*
Tabel 3.45 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Duapuluh sembilan* *200*
Tabel 3.46 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tigapuluh* *207*
Tabel 3.47 *Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tigapuluh satu* *217*
Tabel 3.48 *Perkembangan penertiban PETI di Aceh* *219*
Tabel 3.49 *Realisasi anggaran pendapatan dan pembiayaan Aceh Perubahan tahun 2013* *222*
Tabel 3.50 *Realisasi Anggaran Belanja Aceh Tahun 2013* *223*
Tabel 3.51 *Alokasi APBA tahun 2013 berdasarkan urusan/Satuan Kerja Perangkat Aceh* *223*
Tabel 3.52 *Jumlah dan Realisasi APBA dalam Kurun Waktu 2010-2013* *225*